



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022



BUPATI MAROS

H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP.,MM

WAKIL BUPATI MAROS

Hj. SUHARTINA BOHARI, SE



TAHUN ANGGARAN
2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah antara lain dapat dinilai dari tertibnya administrasi laporan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, dan sebagaimana tercantum pada Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LPPD sebagai upaya pertanggungjawaban publik untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah yang sejalan dengan cita-cita menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik (*good governance*). Kewajiban yang dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat.

Respon dan kepekaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah Undang-Undang tersebut sangat dibutuhkan. Kabupaten Maros sebagai salah satu Kabupaten Daerah Otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.1.1 Penjelasan Umum

Kabupaten Maros dengan ibukota kabupaten adalah Kota Maros yang



berperan sebagai pusat pemerintahan dengan segala aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik terletak di Kecamatan Turikale. Jika dilihat dari geografis wilayah yang lebih mikro, Kota Maros terbagi atas 3 (tiga) segmen kawasan yang merupakan bagian dari pusat-pusat pemerintahan Kabupaten Maros dan dihubungkan oleh jaringan jalan arteri. Sedangkan ditinjau dari perkembangan wilayah, juga terjadi pada arah jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bone, yang meliputi wilayah Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa.

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.
2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.581,50 Ha.



4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km², wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km² atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.

a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini,



yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, yang memuat sejarah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdeling dengan 16 buah distrik, masing-masing :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Distrik Turikale | Dipimpin oleh Karaeng |
| 2. Distrik Marusu | Dipimpin oleh Karaeng |
| 3. Distrik Simbang | Dipimpin oleh Karaeng |
| 4. Distrik Bontoa | Dipimpin oleh Karaeng |
| 5. Distrik Lau' | Dipimpin oleh Karaeng |
| 6. Distrik Tanralili | Dipimpin oleh Karaeng |
| 7. Distrik Sudiang | Dipimpin oleh Gelarang |
| 8. Distrik Moncongloe | Dipimpin oleh Gelarang |
| 9. Distrik Bira | Dipimpin oleh Gelarang |
| 10. Distrik Biringkanaya | Dipimpin oleh Gelarang |
| 11. Distrik Mallawa | Dipimpin oleh Arung |
| 12. Distrik Camba | Dipimpin oleh Arung |



- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 13. Distrik Cendrana | Dipimpin oleh Arung |
| 14. Distrik Laiya | Dipimpin oleh Arung |
| 15. Distrik Wanua Waru | Dipimpin oleh Arung |
| 16. Distrik Gantarang
Matinggi | Dipimpin oleh Arung |

Keenam belas distrik di atas merupakan pusat-pusat pemerintahan di Kabupaten Maros pada masa lampau yang kemudian berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian wilayah Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujung pandang (Ujung pandang berubah nama menjadi Kota Makassar). Adapun wilayah distrik Kabupaten Maros tersebut yang terintegrasi di wilayah administrasi Kota Makassar tersebut adalah Distrik Bira, Suding dan Biringkanaya. Pelepasan wilayah Bira, Sudiang dan Biringkanaya tersebut dari wilayah Kabupaten Maros terjadi pada tahun 70-an.

Wilayah Kabupaten Maros dalam sejarahnya telah mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 (tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, dan Mallawa, yang hingga saat ini saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi tersendiri dalam menunjang pembangunan wilayah. Disamping itu, Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat berarti dalam pembangunan Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peluang inilah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Makassar. Sedangkan rencana pembangunan wilayah secara eksternal, sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan kota metropolitan.

Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan berdirinya Kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem Monarki



menjadi daerah Regentschap kemudian menjadi daerah Adat Gemeenschap sampai dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam sebuah masa peralihan antara fase pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945). Maros kemudian berdiri sendiri menjadi Daerah Tingkat II Maros berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

b. Data Geografis Kabupaten Maros

1. Batas Administratif

Secara geografis, kabupaten Maros terletak antara $40^{\circ} 45'$ - $50^{\circ} 07'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 205'$ - $129^{\circ} 12'$ Bujur Timur yang berbatasan dengan:

- Di sebelah Utara : Dengan Kabupaten Pangkep;
- Di sebelah Timur : Dengan Kabupaten Bone;
- Di sebelah Tenggara : Dengan Kabupaten Gowa;
- Di sebelah Selatan : Dengan Kota Makassar;
- Di sebelah Barat : Dengan Selat Makassar.

Jika dilihat dari posisinya terhadap Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Karena posisinya tersebut, Kabupaten Maros termasuk dalam bagian wilayah pengembangan konsep kota terpadu Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Wilayah kecamatan yang termasuk dalam pengembangan ini adalah kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa.

2. Topografi

Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari wilayah datar sampai wilayah pegunungan. Luas daerah kondisi datar sekitar 70.882 Ha atau 43,80% dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan, daerah yang mempunyai



kemiringan lereng diatas 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha atau sebesar 30,80% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Ketinggian wilayah Kabupaten Maros berkisar antara 0 sampai 881 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di atas 700 meter terdapat pada kecamatan Camba dan Mallawa, sedangkan daerah terendah terdapat pada kecamatan Maros Baru, Marusu, Turikale, dan Bontoa.

Jenis air permukaan berasal dari sungai-sungai yang berjumlah 12 sungai, yaitu sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Boringkaluku, Batu Pute, Matturunge, Marana, Campaya, Pattumanagasae, Bontotenga dan Tanralili.

Iklim Kabupaten Maros termasuk iklim tropis basah, dengan curah hujan rata-rata sekitar 395 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan berkisar 148 hari Interval suhu udara antara 23,4^oC sampai 33,3^oC, dengan kelembaban rata-rata 75,55%. Adapun kecepatan angin antara 2 knot sampai dengan 10 knot.

c. Jumlah Penduduk

Hingga akhir tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Maros tercatat sebanyak 391.489 jiwa yang terdiri dari laki-laki 195.360 jiwa, perempuan 196.129 jiwa dan tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 50.540 jiwa yang terdapat pada Kecamatan Mandai. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk 12.688 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2022 telah mencapai **2,42** jiwa per km². Kecamatan Turikale adalah Kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan yang sudah mencapai 1.611 jiwa per km², sedangkan Kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawa yaitu 54 jiwa per km².

Adapun Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



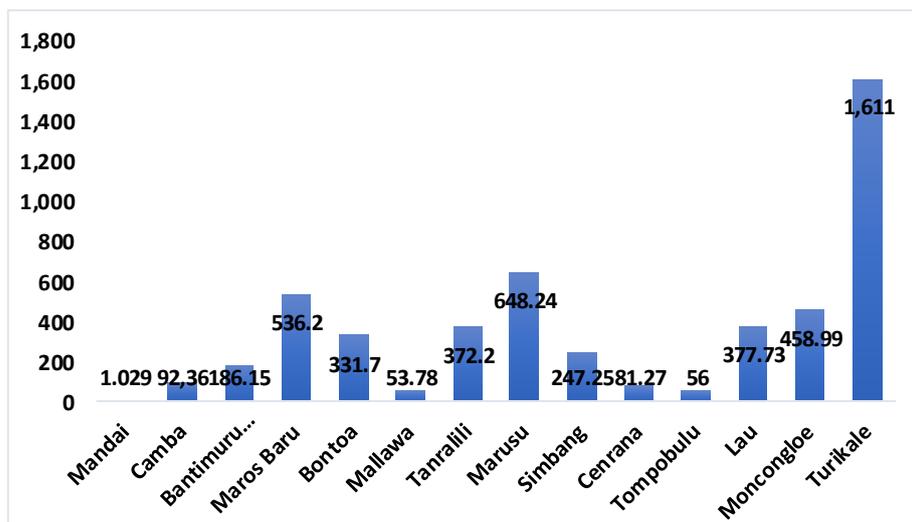
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			Luas Wilayah (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	Mandai	25.262	25,278	50,540	49.11	1,029.12
2	Camba	6,532	6,894	13,426	145.36	92.36
3	Bantimurung	15,968	16,366	32,334	173.70	186.15
4	Maros Baru	14,548	14,278	28,826	53.76	536.20
5	Bontoa	15,380	15,641	31,021	93.52	331.70
6	Mallawa	6,282	6,406	12,688	235.92	53.78
7	Tanralili	16,803	16,546	33,349	89.45	372.82
8	Marusu	17,386	17,444	34,830	53.73	648.24
9	Simbang	13,049	12,989	26,038	105.31	247.25
10	Cenrana	7,254	7,454	14,708	180.97	81.27
11	Tompobulu	8,195	7,915	16,110	287.66	56.00
12	Lau	13,866	14,022	27,888	73.83	377.73
13	Moncongloe	10,853	10,660	21,513	46.87	458.99
14	Turikale	23,982	24,236	48,218	29.93	1,611.03
JUMLAH		195.360	196.129	391.489	1.619,12	6.082,66

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023

Untuk melihat perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tingkat Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Di Kabupaten Maros Tahun 2022



**Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2022**

No.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	Mandai	14.564	
2	Camba	4.7819	
3	Bantimurung	9.825	
4	Maros Baru	8.322	
5	Bontoa	9.000	
6	Mallawa	4.232	
7	Tanralili	9.849	
8	Marusu	10.016	
9	Simbang	7.896	
10	Cenrana	4.662	
11	Tompobulu	4.746	
12	Lau	8.061	
13	Moncongloe	5.920	
14	Turikale	13.642	
TOTAL		115.554	

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023

**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Maros Tahun 2018 – 2022**

Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021	2022
0 – 4	35.196	34.057	27.791	31.961	32.907
5 – 9	33.114	37.249	37.589	37.532	37.961
10 – 14	32.056	36.225	36.955	35.693	36.854
15 – 19	32.665	37.175	29.233	34.697	31.227
20 – 24	31.990	32.965	34.291	34.239	34.135
25 – 29	27.980	31.780	32.473	32.598	32.351
30 – 34	25.573	30.520	30.953	30.757	30.974
35 – 39	25.163	28.028	28.418	28.631	28.684
40 – 44	24.056	25.829	26.372	26.295	26.371
45 – 49	21.408	25.378	24.835	24.850	24.424
50 – 54	17.678	20.621	22.337	22.244	23.264
55 – 59	14.056	15.650	16.049	15.971	17.022
60 – 64	10.006	10.827	12.854	12.467	13.095
65 – 69	7.531	7.544	8.205	8.095	8.723
70 – 74	5.439	4.960	5.761	5.446	5.794
75+	5.911	5.875	6.319	7.262	7.703
Jumlah	349.822	384.682	388.330	388.738	391.489

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk tahun 2022 dengan kelompok umur, jumlah tertinggi pada kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah penduduk sekitar 37.961 orang atau 9,69 % dari total jumlah penduduk, posisi kedua pada kelompok umur 10-14 tahun dengan persentase penduduk sebesar 9,41 % atau 36.854 orang, kemudian diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah penduduk 34.135 orang atau 8,81 % dari total jumlah penduduk.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Maros tahun 2022 sebanyak 283.767 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, jumlah penduduk usia 15-64 tahun mencapai 261.547 orang atau 66,80% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif di Kabupaten Maros cukup memadai.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.619,12 km². Berdasarkan data yang ada, diketahui kecamatan terluas adalah kecamatan Tompobulu dengan luas 287,66 km² atau 17,77 % dari luas Kabupaten Maros. Adapun Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Turikale dengan luas 29,93 km² atau hanya 1,85 % dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	JUMLAH		LUAS (Km ²)
		DESA	KELURAHAN	
1	Mandai	4	2	49,11
2	Moncongloe	5	0	46,87
3	Maros Baru	4	3	53,76
4	Lau	2	4	53,73
5	Turikale	0	7	29,93
6	Marusu	7	0	73,83
7	Bontoa	8	1	93,52
8	Bantimurung	6	2	173,70
9	Simbang	6	0	105,30
10	Tanralili	7	1	89,45
11	Tompobulu	8	0	287,66



NO	KECAMATAN	JUMLAH		LUAS (Km ²)
		DESA	KELURAHAN	
12	Camba	6	2	145,36
13	Cenrana	7	0	180,97
14	Mallawa	10	1	235,92
Total		80	23	1.619.12

Sumber data: Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2023

Adapun untuk mengetahui jumlah bangunan rumah (tempat tinggal) di Kabupaten Maros menurut kecamatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Jumlah Bangunan Rumah Layak dan Tidak Layak Huni
Menurut Kecamatan Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH (UNIT)		TOTAL RUMAH (UNIT)
		LAYAK HUNI	TIDAK LAYAK HUNI	
1	Turikale	11.748	1.810	13.558
2	Maros Baru	3.812	2.706	6.518
3	Mandai	4.950	1.919	6.884
4	Moncongloe	3.808	1.122	6.869
5	Camba	1.318	1.426	2.744
6	Cenrana	1.535	2.096	3.631
7	Bantimurung	2.518	2.435	4.953
8	Simbang	2.490	2.767	5.257
9	Marusu	4.866	1.783	6.649
10	Lau	3.236	2.435	5.689
11	Bontoa	2.604	3.151	5.755
12	Tanralili	3.466	2.331	5.797
13	Tompobulu	2.000	2.435	4.465
14	Mallawa	1.573	1.595	3.168
JUMLAH		49.924	30.011	79.935

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2023

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bangunan terbanyak terdapat pada Kecamatan Turikale dengan jumlah 13.558 unit rumah tempat tinggal, dimana 11.748 unit rumah diantaranya layak huni dan 1.810 unit rumah tergolong tidak layak huni. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah



tempat tinggal di kecamatan Turikale adalah karena letaknya berada di ibukota Kabupaten sehingga dipandang cukup strategis dan menguntungkan bila bermukim di Turikale karena kantor-kantor Pemerintahan di Kabupaten Maros sebagian besar berada di Kecamatan ini. Selain itu, umumnya kegiatan perekonomian berpusat di wilayah ini.

Adapun kecamatan lain dengan jumlah rumah tempat tinggal yang cukup besar adalah kecamatan Mandai dengan 6.884 unit rumah. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di Kecamatan Mandai adalah karena letaknya yang merupakan kecamatan dekat dengan kota Makassar yang dilalui secara langsung oleh jalan provinsi sehingga banyak masyarakat yang bekerja di Makassar memilih bertempat tinggal di kecamatan ini.

Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah sehingga dengan curah hujan dan tingkat penyinaran sinar matahari yang cukup menjadikan wilayah Kabupaten Maros sangat potensial untuk kegiatan pada 12 sektor-sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Produksi padi keseluruhan di kabupaten Maros tahun 2022 sebesar **237.535,84** ton yang dipanen dari areal seluas **42,389** Ha atau rata-rata **56,04** Kwintal/Ha. Selain padi, potensi unggulan lain di Kabupaten Maros adalah jagung dengan luas panen sekitar 10.531 Ha dan jumlah produksi sebesar 63.186 ton, kacang kedelai dengan produksi sebesar 277 ton dari luas panen 154 Ha, kacang tanah dengan produksi 1.834 ton dari luas panen 902 Ha, ubi kayu dengan produksi sebesar 15.642 ton dari luas panen 707 Ha, dan ubi jalar dengan luas panen 57 Ha yang mampumenghasilkan produksi sebesar 402 ton. Produksi bawang merah sebesar 2,5 ton cabe rawit dengan jumlah produksi 105 ton, cabe merah dengan produksi sebesar 464 ton. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, populasi ternak terbesar di Kabupaten Maros adalah sapi potong dengan populasi mencapai 75.282 ekor. Selain sapi potong ternak lain yang memiliki populasi cukup besar adalah kambing dengan populasi 58.115 ekor, kuda dengan populasi 9.246 ekor dan kerbau dengan populasi 4.360 ekor. Selain itu produksi telur untuk ternak dengan jenis unggas adalah ayam buras dengan jumlah 1.438.419 Kg, ayam ras petelur dengan jumlah 12.122.344 Kg dan itik dengan jumlah 3.147.620 Kg.



Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros merupakan kontribusi dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Maros Baru, Marusu, Lau, dan Kecamatan Bontoa dengan produksi sebesar 20.233,6 ton dan perikanan budidaya dengan produksi sebesar 28.409,8 ton. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Maros berjumlah 1 TPI yaitu TPI Labuang berlokasi di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memberikan Bantuan Hibah Barang kepada masyarakat berupa Bibit Unggul kepada kelompok Pembudidaya ikan yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros yang terdiri dari 20 Kelompok Pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan bibit ikan nila sebanyak 15.000 ekor. Dari APBD sebanyak 118.750 ekor bibit unggul ikan nila untuk 9 Kelompok Pembudidaya ikan.

Potensi sumberdaya alam (SDA) unggulan kabupaten Maros lainnya adalah potensi wisata alam Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang menjadi tempat tujuan wisata di Sulawesi Selatan. Lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah air terjun Bantimurung, kolam renang Bantimurung, dan Taman Pra Sejarah Leang-Leang. Selain ketiga lokasi wisata tersebut, masih banyak lagi lokasi wisata lainnya, namun secara umum potensi-potensi wisata alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Adapun potensi wisata alam lain yang belum dimaksimalkan adalah taman wisata alam Pattunuang, cagar alam Karaenta, air terjun Bonto Somba, taman safari Pucak, sungai Pute, dan permandian air panas Reatoa.

Kawasan permandian alam Bantimurung. Terletak di lembah bukit kapur dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Lokasi ini mudah dicapai karena kendaraan umum dari dan ke lokasi selalu tersedia. Dengan kondisi alam tropis yang subur menjadikan daerah ini sebagai pemukiman ideal dari berbagai jenis kupu-kupu dimana saat ini tercatat sekitar 150 jenis yang di daerah lain sudah amat sulit ditemui. Goa mimpi merupakan goa terletak di dalam kawasan permandian alam Bantimurung. Di dalam goa ini terdapat stalaktit yang mempunyai kumpulan kristal yang indah.

Taman wisata alam Pattunuang (Biseang Labboro'). Di kawasan ini selain terdapat stalaktik yang indah juga terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi. Serta menawarkan panorama alam pegunungan yang menawan. Untuk menuju lokasi ini hanya ditempuh jarak kurang lebih 18 km dari Ibukota



Kabupaten Maros.

Cagar alam Karaenta. Merupakan salah satu cagar alam nasional dan kawasan hutan yang dilindungi karena disamping dapat mempertahankan kelestarian cadangan air di bawah tanah juga merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna sebagai sumber daya hayati serta aset lingkungan hidup nasional. Dalam kawasan ini terdapat beberapa goa, salah satu diantaranya adalah Goa Salikang Kallang. Selain itu, terdapat sungai yang indah membelah gunung sampai ke Danau Toakala. Di kawasan ini terdapat pula kera jenis Maccala Maura yang sudah langka.

Air terjun Bonto Somba Terletak di desa Bonto Somba Kecamatan Tanralili. Untuk menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan jarak kurang lebih 25 km arah dari ibukota Kabupaten Maros atau sekitar 55 km dari Kota Makassar. Air Terjun Bonto Somba telah dipersiapkan sebagai kawasan objek wisata yang diharapkan akan setara dengan objek wisata alam Bantimurung sehingga dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya masyarakat desa Bonto Somba.

Taman safari Pucak. Terletak di Desa Pucak Kecamatan Tanralili. Perjalanan menuju lokasi ini ditempuh dengan jarak kurang lebih 20 km dari Ibukota Kabupaten Maros dan sekitar 50 km dari Kota Makassar. Dengan luas areal 150 Ha yang dipersiapkan sebagai lokasi kebun binatang terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Sungai Pute (Batu Napara). Terletak di Desa Salenrang Kecamatan Maros Utara dengan jarak sekitar 5 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Dengan air yang jernih dan latar belakang jejeran pegunungan yang indah, ditambah pohon bakau dan nipa yang hijau sepanjang sungai menjadikan lokasi ini sangat potensial untuk menjadi tempat transit bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah, utamanya wisatawan mancanegara.

Permandian air panas Reatoa. Terletak di Dusun Rea Toa Kecamatan Mallawa dengan jarak tempuh menuju lokasi sekitar 60 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Kawasan objek wisata ini memiliki potensi besar sehingga perlu untuk segera dikembangkan.

Taman prasejarah Leang-Leang. Terletak pada deretan bukit kapur yang curam di Kelurahan Kallabirang Kecamatan Bantimurung dengan jarak tempuh sekitar 17 km dari Ibukota Kabupaten Maros dengan luas kawasan 5.498 m².



Para arkeolog berpendapat bahwa beberapa goa yang terdapat disana telah dihuni sekitar 8000-3000 tahun sebelum masehi. Selain itu di Kabupaten Maros banyak juga terdapat situs, benda dan kawasan cagar budaya yang bisa dijadikan tujuan wisata.

Daftar Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

No	NAMA OBYEK	KATEGORI	LOKASI
1	Jarie	Situs	Kecamatan Simbang
2	Tampuang	Situs	Kecamatan Simbang
3	Saripa	Situs	Kecamatan Simbang
4	Karrasa	Situs	Kecamatan Simbang
5	Kado	Situs	Kecamatan Simbang
6	Burung 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
7	Burung 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
8	Pangie	Situs	Kecamatan Bantimurung
9	Sampeang	Situs	Kecamatan Bantimurung
10	Ulu Leang	Situs	Kecamatan Bantimurung
11	Ambe Paco	Situs	Kecamatan Bantimurung
12	Elle Pusae	Situs	Kecamatan Bantimurung
13	Bettue	Situs	Kecamatan Bantimurung
14	Uluwae	Situs	Kecamatan Bantimurung
15	Pajae	Situs	Kecamatan Bantimurung
16	Pettae	Situs	Kecamatan Bantimurung
17	Pettakere	Situs	Kecamatan Bantimurung
18	Tinggi Ada	Situs	Kecamatan Bantimurung
19	Baratedong 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
20	Baratedong 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
21	Alla Birang	Situs	Kecamatan Bantimurung
22	Pallenge	Situs	Kecamatan Bantimurung
23	Bara Jarang	Situs	Kecamatan Bantimurung
24	Pabbuno Juku	Situs	Kecamatan Bantimurung
25	Lompoa	Situs	Kecamatan Bantimurung
26	Bembe	Situs	Kecamatan Bantimurung
27	Timpuseng	Situs	Kecamatan Bantimurung
28	Batu Karope	Situs	Kecamatan Bantimurung
29	Bulu Tungke'e	Situs	Kecamatan Bantimurung
30	Barugayya	Situs	Kecamatan Bantimurung
31	Pa'limukang	Situs	Kecamatan Bantimurung
32	Tanre	Situs	Kecamatan Bantimurung
33	Balang	Situs	Kecamatan Bantimurung
34	Jing	Situs	Kecamatan Bantimurung
35	Sengkae	Situs	Kecamatan Bantimurung
36	Bata-battae	Situs	Kecamatan Bantimurung
37	Pacce-pacce	Situs	Kecamatan Bantimurung
38	Bulu Buttue	Situs	Kecamatan Bantimurung
39	Boddong	Situs	Kecamatan Bantimurung
40	Canggoreng	Situs	Kecamatan Bantimurung



41	Samongkeng 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
42	Samongkeng 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
43	Samongkeng 3	Situs	Kecamatan Bantimurung
44	Samongkeng 4	Situs	Kecamatan Bantimurung
45	Lambatorang	Situs	Kecamatan Bantimurung
46	Pucu	Situs	Kecamatan Bantimurung
47	Wanue	Situs	Kecamatan Bantimurung
48	Tenggae	Situs	Kecamatan Bantimurung
49	Bulu Kamase	Situs	Kecamatan Bantimurung
50	Panampu 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
51	Panampu 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
52	Bungaeja 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
53	Bungaeja 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
54	Maddauseng	Situs	Kecamatan Bantimurung
55	Botto	Situs	Kecamatan Bantimurung
56	Batu Tianang	Situs	Kecamatan Bontoa
57	Karama/Akkarasa	Situs	Kecamatan Bontoa
58	Pasaung		Kecamatan Bontoa
59	Sipong 1		Kecamatan Bontoa
60	Sipong 2		Kecamatan Bontoa
61	Sipong 3		Kecamatan Bontoa
62	Monroe		Kecamatan Bontoa
63	Cempae		Kecamatan Bontoa
64	Wajan Raksasa		Kecamatan Turikale
65	Beduk tertua		Kecamatan Turikale
66	Pedang V.O.C		Kecamatan Turikale
67	Kerangka Manusia Leang		Kecamatan Simbang
68	Bendungan Batu Bassi		Kecamatan Simbang
69	Gudang mesiu		Kecamatan Simbang
70	Prasasti Jepang		Kecamatan Simbang
71	Bunker Jepang		Kecamatan Mandai
72	Makam La Makkulau Arung		Kecamatan Bantimurung
73	Makam Arung Macege		Kecamatan Camba
74	Makam Karaeng Bontoa		Kecamatan Bontoa
75	Makam Kareang Lalang		Kecamatan Bontoa
76	Makam Nahkoda		Kecamatan Bontoa
77	Balla Lompoa		Kecamatan Turikale
78	Kantor Pengadilan Lama		Kecamatan Turikale
79	Kantor Kejaksaan Lama		Kecamatan Turikale
80	Rumah Sakit Lama		Kecamatan Turikale
81	Penjara Lama		Kecamatan Turikale
82	Rumah Kodok		Kecamatan Turikale
83	Kantor Pemerintah Belanda		Kecamatan Turikale

Sumber data :Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Maros telah berhasil menarik investor untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Maros. Hal ini ditandai dengan terbangunnya sebuah tempat wisata baru yang dikelola oleh



swasta yaitu Maros Waterpark. Tempat wisata ini sangat mudah untuk dicapai karena jaraknya yang tidak jauh, hanya berjarak sekitar 1 km dari Taman Wisata Alam Bantimurung.

Perhelatan Akbar Tahunan sebagai Ajang Promosi Potensi dan Investasi unggulan bertajuk Apkasi Expo 2022 (AOE2022) yang sedianya akan digelar akhir tahun 2022 dibatalkan dengan alasan tidak adanya penganggaran terkait kegiatan tersebut .

Daftar Penyelenggaraan Expo

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Ket.
1.	Pameran Apkasi Otonomi Expo 2022	-	Tidak dilaksanakan

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros bukan hanya wisatawan lokal melainkan dari Luar Negeri pun banyak yang berkunjung menikmati panorama alam Kabupaten Maros.

DAFTAR KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2018-2022

TAHUN	TARGET KUNJUNGAN	REALISASI KUNJUNGAN	PERSENTASE
2018	407.580	407.580	100%
2019	391.700	518.635	132%
2020	402.000	238.456	59,32%
2021	282.033	65.507	23,22%
2022	500.000	584.016	116,80%

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

**JUMLAH PROMOSI EVENT DAERAH YANG TERLAKSANA
DI DALAM NEGERI**

No.	Nama Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pemilihan Duta Pemuda Demokrasi	1 (Satu) Kali	
2.	Pemilihan Duta Pelajar	1 (Satu) Kali	
3.	Zumba Dance Party	1 (Satu) Kali	
4.	Road Show UMKM Kreatif 14 Kecamatan	1 (Satu) Kali	
5.	Rammang-Rammang Tourism Exhibition Lomba Desain Landscape Spot Pariwisata	1 (Satu) Kali	
6.	Youth Demokrasi Festival	1 (Satu) Kali	
7.	Kejuaraan Enduro Competition Tingkat Provinsi Sulsel	1 (Satu) Kali	
8.	Maros Property Expo	1 (Satu) Kali	
9.	Festival Spirit Ramadhan II	1 (Satu) Kali	
10.	Job Fair Bursa Kerja	1 (Satu) Kali	
11.	Kotto Boko	1 (Satu) Kali	
12.	Bazar Musik	1 (Satu) Kali	
13.	Festival Beduk	1 (Satu) Kali	
14.	Festival Ramadhan	1 (Satu) Kali	
15.	Anugerah Desa Wisata	1 (Satu) Kali	
16.	Maros Youth Festival	1 (Satu) Kali	
17.	Bantimurung Keren	1 (Satu) Kali	
18.	Maros-Pangkep Orienteering Competition	1 (Satu) Kali	
19.	Ma'seli Geopark dan Celebes Explorer 2022	1 (Satu) Kali	
20.	Kejuaraan Futsal	1 (Satu) Kali	
21.	Pemilihan Duta Wisata Dara & Daeng	1 (Satu) Kali	
22.	Kejuaraan Bulutangkis	1 (Satu) Kali	
23.	Fun Bike Geopark	1 (Satu) Kali	
24.	Maros-Pangkep Geopark Run 2022	1 (Satu) Kali	
25.	Trail Wisata Adventure	1 (Satu) Kali	
26.	Adventure Wisata Off Road	1 (Satu) Kali	



	dan Speed Off Road Piala Bupati		
27.	Tomtrack Hard Enduro	1 (Satu) Kali	
28.	Camara Jip Adventure OffRoad	1 (Satu) Kali	
29.	Kirab Budaya Mannapu Ase	1 (Satu) Kali	
30.	Lomba Mural	1 (Satu) Kali	
31.	Temu Literasi	1 (Satu) Kali	
32.	Kejuaraan Sepak Bola (Bupati Cup)	1 (Satu) Kali	
33.	Pesta Rakyat Geopark Maros-Pangkep	1 (Satu) Kali	
34.	Festival Seni Budaya	1 (Satu) Kali	
35.	Tudang Sipulung Kebudayaan	1 (Satu) Kali	
36.	Bulan Merdeka	1 (Satu) Kali	
37.	Appalili	1 (Satu) Kali	
38.	Maulid Adat	1 (Satu) Kali	
39.	Jambore Geopark Maros-Pangkep	1 (Satu) Kali	
40.	Lomba Apresiasi Alat Musik Tradisional Koleksi Museum	1 (Satu) Kali	
41.	Pameran Temporer	1 (Satu) Kali	
42.	Festival Film Koleksi Museum	1 (Satu) Kali	
43.	Kejuaraan Renang	1 (Satu) Kali	
44.	Tourism Explorer For Studen	1 (Satu) Kali	
45.	Rakornas Geopark Indonesia	1 (Satu) Kali	
46.	Gerakan Sulsel anti Mager	1 (Satu) Kali	
47.	Fun Run Hari Kesehatan Nasional	1 (Satu) Kali	
48.	Lomba Desain Kreasi Baju Adat 2022	1 (Satu) Kali	
49.	Turnamen Sepak Bola Waspada 2022	1 (Satu) Kali	
50.	Asosiasi Futsal Kab. Maros	1 (Satu) Kali	
51.	Liga Santri 2022	1 (Satu) Kali	
52.	Trail, Why, Trail Run 2022	1 (Satu) Kali	
53.	Forkopimda Trail Maros 2022	1 (Satu) Kali	



54.	Lomba Dayung	1 (Satu) Kali	
55.	Event Enduro Competition 2022	1 (Satu) Kali	
56.	Sepak Takraw Butta Salewangang Cup 2022	1 (Satu) Kali	
57.	Pacuan Kuda Tradisional Tukamasea	1 (Satu) Kali	
58.	Gaba Race 2022	1 (Satu) Kali	
59.	Pacuan Kuda Tradisional Tanadidi	1 (Satu) Kali	
60.	Drag Race Competition Kejurda	1 (Satu) Kali	
61.	Pemilihan Duta Genre 2022	1 (Satu) Kali	
62.	Pemilihan Duta Anti Narkoba 2022	1 (Satu) Kali	
63.	Pemilihan Dara Daeng Cilik	1 (Satu) Kali	
64.	Pelantikan Dewan Adat/Pengukuhan Srikandi	1 (Satu) Kali	
65.	Kejuaraan Berkuda Exebition	1 (Satu) Kali	
66.	Launchig Kalender Event	1 (Satu) Kali	
67.	Jumpa Bakti Gembira PMR 2022	1 (Satu) Kali	
68.	Turnamen Sepak Bola Alatengae Cup	1 (Satu) Kali	
69.	Turnamen Sepak Bola Mini Simbang Cup	1 (Satu) Kali	
70.	Turnamen Sepak Bola Labuaja	1 (Satu) Kali	

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

**JUMLAH LOKASI YANG MEMPEROLEH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA
MASYARAKAT**

No.	Uraian	Jumlah Yang Terlibat	Keterangan
1.	Kawasan Wisata Kuliner PTB	108	Pedagang
2.	Kawasan Wisata Alam Bantimurung	37	Pedagang
3.	Gedung Pusat Oleh-oleh Maros (Balla' Mabalanca)	26	UMKM
JUMLAH		171	

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Berkat kreatifitas dan ide cemerlang dari Pemerintah Kabupaten Maros, pada tahun 2012 Kabupaten Maros memiliki sebuah ikon baru yaitu Pusat Kuliner Maros. Pusat kuliner ini terletak tepat di pusat kabupaten Maros dan merupakan hasil dari penataan pedagang kaki lima yang dilakukan secara kekeluargaan dan hingga saat ini Pusat kuliner Maros terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena adanya inovasi-inovasi kreatif dari Kepala Daerah untuk menghadirkan suatu kawasan yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian bagi MasyarakatSosiat Kabupaten Maros.

Potensi kehutanan di Kabupaten Maros dapat dilihat dari Jenis hasil hutan yang terproduksi tiap tahunnya, seperti kayu jati, kayu bakar dan bambu mengalami yang pertumbuhan tiap tahunnya. Ketiga jenis hasil hutan ini memiliki keterkaitan langsung dengan orientasi usaha yang berkembang di Kabupaten Maros maupun daerah sekitarnya, terutama Kota Makassar. Kayu Jati merupakan bahan baku bagi industri furniture, kayu bakar memenuhi kebutuhan kegiatan masak, baik oleh penduduk maupun usaha-usaha lainnya, dan untuk bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kegiatan bangunan yang banyak dilaksanakan. Selain itu juga Kabupaten Maros memiliki potensi Tegakan Pinus yang terdapat di 4 kecamatan yakni, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,



pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2022, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan dari masing-masing urusan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2022**

SKPD KABUPATEN	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERSONIL (PNS)
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Maros	183
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Maros	58
Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Maros	77
Dinas Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.912
	Dinas Kesehatan	866
	Dinas Sosial	51
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54
	Dinas Komunikasi dan Informatika	56
	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perhubungan dan Pertanahan	162
	Dinas Perumahan, Kawasan	99



SKPD KABUPATEN	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERSONIL (PNS)
	Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	62
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	205
	Dinas Perikanan	64
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74
	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	84
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	51
Rumah Sakit Daerah	RSU La Palaloi	360
Kecamatan	Kecamatan Mallawa	26
	Kecamatan Cenrana	26
	Kecamatan Camba	22
	Kecamatan Simbang	29
	Kecamatan Bantimurung	24
	Kecamatan Turikale	22
	Kecamatan Maros Baru	26
	Kecamatan Lau	27
	Kecamatan Bontoa	25
	Kecamatan Mandai	29
	Kecamatan Marusu	29
	Kecamatan Moncongloe	27
	Kecamatan Tanralili	31
	Kecamatan Tompobulu	30
Lembaga Teknis Lainnya	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	52
	Badan Kesbang dan Politik	30
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	59
	Badan Keuangan dan Asset Daerah	60
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38



SKPD KABUPATEN	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERSONIL (PNS)
	Badan Pendapatan Daerah	58
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	103
TOTAL		6.614

Sumber data : Data BKPSDM Kab. Maros dan Data Kepegawaian OPD terkait, 2023

Adapun pencapaian-pencapaian Pemerintah Kabupaten Maros yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 berupa prestasi / penghargaan yang telah diterima adalah sebagai berikut :

1. Diberikan kepada RSUD Salewangan Kab. Maros, sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori baik dengan catatan dari Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018;
2. Diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros atas peran Aktif dan kepeduliannya terhadap Perlindungan Pegawai Pemerintah bukan Aparatur Sipil Negara dalam program jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 15 Oktober 2018;
3. Kabupten/Kota layak anak Kategori PRATAMA, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Surabaya 23 Juli 2018;
4. National Recurement Award, kategori (UKBJ) sebagai pusat Keunggulan (Centre Of Excellence) pengadaan barang dan jasa dari LKPP Bandung 30 oktober 2018;
5. ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA 2017 sebagai Pembina Umum terbaik Karang Taruna Kabupaten dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Denpasar Januari 2018;
6. Apresiasi dan perhatian terhadap Pendidikan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Maros dari Universitas Muslim Maros, 15 September 2018;
7. Tokoh Penggerak Program TPKAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, atas Kinerja pasilitasi Akses KUR terbanyak melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Sulawesi Selatan , dari Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar, 20 Oktober 2018;



8. Dukungan Pelaksanaan Program JKN-KIS Kab. Maros tahun 2018, dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar di Makassar, Januari 2018;
9. Kepala Daerah Inovatif dari koran Sindo;
10. Peran aktif dan dukungan dalam menyukseskan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 5 Desember 2018;
12. Kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemkab. Maros Tahun 2018;
14. Piala Adipura nilai tertinggi Nasional dengan Kategori Kota Kecil, diserahkan Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla di damping Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar, Jakarta 2019;
15. Juara Peserta Inspiratif dalam Pameran APKASI Otonomi EXPO 2018 di BSD (City Tangerang 6-8 Juli 2018), diserahkan oleh Wakil Ketua Penyelenggara APKASI Otonomi EXPO 2018, Waluyo;
16. Sebagai Kabupaten / Kota yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi, Jakarta 28 November 2018;
17. Penghargaan Menteri Dalam Negeri RI kepada Pemerintah Kabupaten Maros atas keterlibatan dan partisipasi aktif Aparatur Pemadam Kebakaran dalam membantu Penanggulangan Bencana dan Evakuasi korban pada bencana di Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Juara kreasi APKASI OTONOMI EXPO;
19. Piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan pelaksanaan JKN – KIS atas tercapainya Cakupan Semesta Kabupaten Maros tahun 2019;
20. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori PRATAMA;
21. BKN Award, Kategori Penilaian Tingkat Kabupaten / Kota Tipe B;
22. APDESI Award;



23. TPAKD sebagai Percepatan Akses Pembiayaan KUR melalui Data SIKP, Sebagai Penggerak Percepatan Akses Keuangan;
24. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lima kali berturut- turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 s/d 2018;
25. Penghargaan Swasti Saba Wistara (Pengembangan) Penghargaan tertinggi Kab/Kota Sehat dengan cakupan Wilayah sebanyak 14 Kecamatan 103 Desa/Kelurahan;
26. Piagam penghargaan sebagai Kategori Humas Kab/Kota dengan Publikasi Media Internal terbaik pada Event Humas Sul – Sel Expo 2019;
27. Pelayanan Publik Terbaik 2019;
28. Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
29. Penghargaan Atas Prestasi dan Kinerja Pengolahan Sistem Informasi dan Program (SIKP) selama Periode 2019 se- Sulawesi Selatan;
30. ADIWIYATA MANDIRI 2019;
31. BANTIMURUNG BULUSARAUNG NATIONAL PARK;
32. Kabupaten yang melaksanakan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan sebagai Desa Percontohan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
33. Pemenang Lomba Kelembagaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu Berprestasi.
34. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
35. Piagam penghargaan atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka berbasis digital dalam era pandemi covid-19
36. Piagam penghargaan sebagai kabupaten penerima anugerah parahita ekapraya tahun 2020 kategori utama.
37. Penghargaan atas partisipasi dalam kegiatan "literacy camp" pada tanggal 27-28 agustus 2021
38. Piagam penghargaan terbaik 1 dalam pengelolaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Prov. Sulawesi Selatan tahun 2020 pada tahun 2021
39. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 pada tahun 2021.
40. Piagam penghargaan sebagai kabupaten layak anak peringkat PRATAMA tahun 2021.
41. Piagam Penghargaan pemerintah kabupaten dengan implementasi Qris dalam Rangka mendukung ekosistem Tranksaksi digital.



42. Keterbukaan Informasi badan publik tahun 2021 kategori pemerintah kabupaten/kota sebagai badan publik CUKUP INFORMATIF dalam Implementasi UU no. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
43. Piagam Penghargaan atas dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai non ASN pemerintah kabupaten Maros.
44. Penghargaan Penyelesaian Program Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022.
45. Sebagai Provinsi dengan desa Wisata Terbanyak Pada Anugerah desa Wisata Indonesia 2022.
46. KPID Award 2022, sebagai kepala daerah peduli Penyiaran
47. Penghargaan FKPTPI (Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Indonesia) dalam kiprahnya Mendukung Percepatan Pembangunan Pertanian Daerah.
48. LPM Award 2022, Sebagai Kepala daerah Kontributif terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
49. Penghargaan tertinggi Nugra jasa Dharma Pustaloka kategori Pejabat Publik, atas dedikasi dan peran aktif terhadap pengembangan perpustakaan.
50. Terbaik III Nasional Komunitas Peduli Sungai (Komunitas Anak Sungai Rammang2 Sulawesi selatan BBWS Pompengan Jeneberang).
51. SMART CITY
52. Satya Lancana Dharma Aditya karya Mahatva Yodha, Atas Karya bakti dan pengabdian sosial yang telah dilakukan bersama2 dan berkolaborasi dengan karang taruna.
53. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik , Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kabupaten Maros sebagai Badan Publik Cukup Informatif.
54. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022
55. GenPI (Gerakan Pesona Indonesia) Pada Kegiatan Leader Talks- Digital Trasform & digital Innovation Four Tourism dalam Rangka rakornas Gerakan Pesona Indonesia 2022
56. PKH AWARD Kategori penghargaan bagi pemerintah Daerah Kab/ kota atas dukungan Alikasi Dana Sharing APBD II Tertinggi IV Untuk Pelaksanaan PKH Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022
57. Anugerah Meritokrasi, Penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat BAIK



58. Penghargaan Piala ADIPURA Kategori Kota Kecil Tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Maros Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan program dan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Hal tersebut merupakan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros sebesar Rp. 1.517.257.948.614,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.486.324.304.898,16 atau sebesar 97,96%. Adapaun rincian target dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

f.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

f.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta Lain-lain PAD yang Sah. Target peningkatan PAD harus diikuti dengan analisis yang tepat terutama dampaknya terhadap kegiatan-kegiatan perekonomian pada masyarakat secara menyeluruh. Meskipun kontribusi PAD terhadap pendapatan keseluruhan dalam APBD masih tergolong sangat kecil. namun PAD masih merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dari waktu ke waktu masih sangat potensial untuk bisa mengalami peningkatan.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2022, PAD dianggarkan sebesar Rp. 300.275.072.614 terealisasi sebesar Rp. 266.637.121.347,16 atau mencapai 88,80 % dari target yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.275.072.614	266.637.121.347,16	88,80
1	Pajak Daerah	162.109.148.158	156.161.828.082,63	96,33
2	Retribusi Daerah	17.835.000.000	13.232.642.645,50	74,19
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.487.620.496	10.859.311.136,65	103,54
4	Lain-lain PAD yang Sah	109.843.303.960	86.383.339.482,38	78,64

Sumber : BPKAD, 2023

Dari keempat komponen PAD pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang capaiannya 100 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Melihat belum nencapaiannya target 100 persen realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2022, maka perlu adanya optimalisasi pemenuhan target pendapatan yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menggali obyek potensial yang baru.

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian PAD Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2022 meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral bukan Logam; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 162.609.148.158,00 dan terealisasi sebesar Rp. 156.161.828.082,63 atau 96,33%. Pencapaian Pajak Daerah yang mencapai target tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang berangsur baik pasca Pandemi COVID-19. Hal ini memicu semua sektor perekonomian mengalami



peningkatan karena tidak adanya lagi pembatasan kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Kondisi tersebut diatas juga dipicu oleh kerja maksimal yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan yang secara maksimal memanfaatkan kondisi yang ada untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan pajak daerah. Rincian anggaran dan realisasi hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Pendapatan Pajak Daerah	162.609.148.158	156.161.828.082,63	96,33
1	Pajak Hotel	2.000.000.000	2.870.273.000	143,51
2	Pajak Restoran	15.000.000.000	17.472.393.503,63	116,48
3	Pajak Hiburan	800.000.000	876.423.043,00	109,55
4	Pajak Reklame	1.300.000.000	1.310.903.617,00	100,84
5	Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000	31.846.602.165,00	102,73
6	Pajak Parkir	14.000.000.000	11.870.669.700	84,79
7	Pajak Air Tanah	800.000.000	789.792.080,00	98,72
8	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	11.620.000	38,73
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.179.148.158	13.316.358.606	50,87
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28.000.000.000	21.505.775.885,00	76,81
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.000.000.000	54.291.016.483,00	126,26

Sumber: BPKAD, 2023

Sebagian besar jenis pajak daerah yang direncanakan dapat direalisasikan diatas target, kecuali pajak parkir (84,79%), Pajak Sarang Burung Walet sebesar 38,73 %; dan Pajak Mineral bukan Logam sebesar 50,87 %. Perolehan pajak Hotel memiliki persentase realisasi tertinggi yaitu 143,43 %, kemudian diikuti oleh Penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan persentase realisasi sebesar 128,13%. Penerimaan pajak Restoran



menempati urutan ketiga dengan persentase realisasi penerimaan sebesar 118,76 %.

b. Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kabupaten Maros meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan Retribusi Izin Trayek.

Pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 17.835.000.000 dan terealisasi sebesar 13.232.642.645,50 atau 74,19 %. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persen (%)
	Pendapatan Retribusi Daerah	17.835.000.000	13.232.642.645,50	74,19
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000	119.692.000	239,38
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000	9.990.000	99,90
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000	735.092.000	105,01
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.950.000.000	2.480.912.030	62,81
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30.000.000	64.020.000	213,40
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	353.580.000	70,72
7	Retribusi Tempat Pelelangan	300.000.000	257.508.500	61,05
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	500.000.000	399.476.500	79,90
8	Retribusi Tempat Penginapan/	140.000.000	7.800.000,00	5,57



No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persen (%)
	Pesanggrahan/ Villa			
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	305.000.000	259.995.000	85,24
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	8.350.000.000	4.932.549.000	59,07
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan / PBG	3.000.000.000	3.611.848.115,50	120,39

Sumber: BPKAD, 2023

Retribusi tempat parkir khusus yang hanya ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000 terealisasi sebesar Rp. 399.476.500 atau sebesar 79,90 %. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 3.611.848.115,50 atau 120,39 %. Demikian halnya dengan retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp 353.580.000 atau sebesar 70,72%. Sedangkan retribusi dengan realisasi tertinggi adalah retribusi Retribusi pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 119.692.000 atau sebesar 239,38 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang penerimaannya menjadi bagian dari PAD. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 103,54%, dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 10.859.311.136,65 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.487.620.496,00.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	10.487.620.496,00	10.859.311.136,65	103,54



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	yang Dipisahkan			
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.487.620.496	10.859.311.136,65	103,54

Sumber: BPKAD, 2023

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari: Penerimaan Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; Pendapatan BLUD; Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; dan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 109.843.303.960 dan terealisasi sebesar Rp. 86.383.339.482,38 atau sekitar 78,64 persen. Adapun rincian anggaran dan realisasi dari Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Lain-lain PAD Yang Sah	109.843.303.960	86.383.339.482,38	78,64
1	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000	3.448.567.504,63	68,97
2	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	500.000.000	13.656.000	2,73
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	970.000.000	848.700.000	87,49
4	Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000	2.227.791.628,86	742,60
5	Pendapatan BLUD	90.573.303.960	78.902.249.865,00	87,11



Sumber : BPKAD, 2023

Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan sumber pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan tidak terealisasi. Hanya Pendapatan dari Pengembalian yang terealisasi sebesar 742,60 %, Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 87,11%. Sedangkan pada tahun 2022 pendapatan dana kapitas JKN pada FKTP tidak relaisasi atau 0%.

f.1.2 Pengelolaan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer ini terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Rincian pendapatan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel. 2.6
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Perimbangan	1.033.266.400.000	1.016.183.947.388,00	98,35
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	27.021.597.000	36.111.371.304	133,64
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	659.108.296.000	658.690.796.000	99,94
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	150.458.557.000	137.357.898.503,00	91,29

Sumber : BPKAD, 2023



1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

a. Bagi Hasil Pajak

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 27.021.597.000 dan terealisasi sebesar Rp. 36.111.371.304 atau sekitar 133,64 %. Penerimaan bagi hasil pajak diperoleh dari penerimaan Bagi hasil pajak bumi dan pembangunan sektor pertambangan yaitu sebesar Rp. 8.063.672.000 atau 163,35 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 13.171.990.430,00. Sedangkan Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Paal 29 Wajib Pajak terealisasi sebesar Rp. 10.159.679.000,00 atau sebesar 100%. Bagi Hasil cukai tembakau terealisasi sebesar Rp 200.472.187,00 atau sebesar 105,27 %. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.7

**Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak
Maros Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Bagi Hasil Pajak	27.021.597.000	36.111.371.304	133,64
1	pajak bumi dan pembangunan sektor pertambangan	8.063.672.000	13.171.990.430	163,35
2	Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Paal 29 Wajib Pajak	10.159.679.000	10.159.679.000	100
3	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	190.428.000	200.472.187	105,27

Sumber: BPKAD, 2023

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak terdiri atas lima komponen yaitu; Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi.



Penerimaan dari Bagi bukan Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp **27.021.597.000** dan terealisasi sebesar Rp **36.111.371.304** atau sebesar 133,35 %. Persentase penerimaan terbesar diperoleh dari Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, dengan realisasi Rp 40.042.000 atau sebesar 154,61%. Kemudian diikuti oleh Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp 729.644.000,00 atau 99,99% dari target yang ditetapkan. Rincian pendapatan dari bagi hasil bukan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.8
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak
Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27.021.597.000	36.111.371.304	133,64
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	40.042.000	61.906.947	154,61
2	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.958.311.000	1.958.311.000	100
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	5.879.768.000	9.829.367.740	167,17
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	729.697.000	729.644.000	99,99

Sumber: BPKAD, 2023

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari DAU pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 659.108.296.000 dan terealisasi sebesar Rp.



658.690.796.000 atau 99,94 %. Rincian anggaran dan realisasi DAU Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.9
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Alokasi Umum	659.108.296.000	658.690.796.000	99,94
1	Dana Alokasi Umum	659.108.296.000	658.690.796.000	99,94

Sumber: BPKAD, 2023

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah.

Untuk Tahun 2022 DAK Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK fisik terdiri dari DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan, Rumah Sakit dan Keluarga Berencana), DAK Bidang Pendidikan (PAUD, SD, SMP dan Perpustakaan), DAK Bidang Perhubungan, DAK Bidang Perumahan, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Perikanan, DAK Bidang Industri Kecil dan menengah, DAK Bidang Lingkungan Hidup. Namun dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, maka pada tahun 2022, DAK Fisik bidang perhubungan dan Bidang Pendidikan sub bidang perpustakaan dihapus. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel. 2.10
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Alokasi Khusus Fisik	150.458.557.000	137.357.898.503	91,29
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	150.458.557.000	137.357.898.503	91,29

Sumber : BPKAD, 2023

b. DAK Non Fisik

Untuk Tahun 2022 DAK Non Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK Bantuan operasional PAUD, DAK tunjangan profesi guru, DAK tambahan penghasilan guru, DAK Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Bantuan Operasional KB, DAK tunjangan khusus guru, DAK dana pelayanan Administrasi kependudukan, DAK Non fisik bidang pariwisata, DAK Non fisik bantuan operasional Pendidikan kesetaraan. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.11
Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	196.677.950.000	184.023.881.581	93,57
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	196.677.950.000	184.023.881.581	93,57

Sumber : BPKAD, 2023

f.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan Bantuan Keuangan.



Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. **11.896.406.000** dengan realisasi sebesar Rp **13.255.406.000** atau sebesar **111,42 %**. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.12**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.896.406.000	13.255.406.000	111,42
1	Pendapatan Hibah	11.896.406.000	13.255.406.000	111,42
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98.915.617.000	98.915.617.000	100
	Dana Insentif Daerah	18.413.677.000	18.413.677.000	100
	Dana Desa	80.501.940.000,00	80.501.940.000,00	100
3	Bantuan Keuangan	149.016.684.800	143.673.836.429,00	96,41

Sumber: BPKAD, 2023

Penerimaan dari bagi hasil pajak dari propinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah, bagi hasil dari pajak rokok, Rincian penerimaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel. 2.13**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	56.804.453.000	20.762.619.599,00	137,23
1	Bagi Hasil dari Pajak	10.975.000.000	15.449.285.965,00	111,34



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Kendaraan Bermotor			
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.148.000.000	13.274.629.541,00	77,35
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.871.953.000	28.322.594.288,00	96,78
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	95.000.000	142.142.270,00	137,93
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	15.714.500.000	20.762.619.599,00	119,53

Sumber: BPKAD, 2023

f.1.4 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi akuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai yaitu menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran. Pengelolaan belanja daerah akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah daerah seperti *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*. Pengelolaan belanja



daerah harus mengacu kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif.

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 berpedoman kepada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja daerah selain digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 adalah:

1. Upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja secara proporsional akan dilakukan melalui memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
2. Belanja daerah dititik beratkan kepada prioritas pembangunan daerah.
3. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.



2. Target dan Realisasi Belanja

Secara deskriptif belanja daerah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: **1) Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, **2) Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 162.109.148.158 dan realisasi sebesar Rp. 156.161.828.082,63 atau sebesar 96,33 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.

3. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 773.429.692.640 dan terealisasi sebesar 94,51% atau senilai Rp. 731.015.145.655. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	773.429.692.640	731.015.145.655	94,51
1	Belanja Pegawai	605.101.876.840	569.611.005.635	94,13
2	Belanja Hibah	15.511.131.000	14.917.925.951	96,18
3	Belanja Transfer	149.016.684.800	143.673.836.429	96,41
4	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000	2.812.377.640	74,01

Sumber: BPKAD, 2023

**a. Belanja Pegawai**

Pada tahun 2022, belanja pegawai Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 605.101.876.840 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 569.611.005.635 atau 94,13%. Komposisi terbesar pada belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Adapun rincian komposisi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Pegawai (BTL)	605.101.876.840	569.611.005.635	94,13
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	425.669.191.610	408.536.761.726	95,98
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	44.967.199.782	40.255.211.223	89,52
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000	801.600.000	100
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	743.009.000	742.750.000	99,97
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	165.000.000	0	0

Sumber: BPKAD, 2023

b. Belanja Hibah

Pada tahun 2022 belanja hibah Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 15.511.131.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.917.925.951 atau 96,18 %. Komposisi belanja yang terealisasi terdapat pada belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar 95,96%, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar 99,90 %.



Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Hibah	15.511.131.000	14.917.925.951	96,18
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	14.661.131.000	14.068.782.436	95,96
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	850.000.000	849.143.515	99,90

Sumber: BPKAD, 2023

c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Pada tahun 2022, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik dianggarkan sebesar Rp. 15.511.131.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.917.925.951 atau sebesar 96,18%. Realisasi belanja tersebut, terdiri dari realisasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp. 143.673.836.429, atau sebesar 96,54%, dan realisasi belanja bantuan kepada partai politik sebesar 99,90 % atau sebesar Rp. 849.143.515. Rincian anggaran dan realisasi Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
Politik Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pemerintahan Desa dan Partai Politik	156.673.155.700	67.831.741.034	43,30
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada	148.816.684.800	143.673.836.429	96,54



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Desa			
2	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	850.000.000	849.143.515	99,90

Sumber: BPKAD, 2023

d. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2022, belanja tidak terduga Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 3.800.000.000 dan hanya terealisasi sebesar 74,01 % atau sebesar Rp. 2.812.377.640.

4. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 954.219.23.262,23, dan terealisasi sebesar Rp. 806.271.843.050,50 atau 84,50 % dari total anggaran yang direncanakan. Rincian realisasi anggaran belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	BELANJA LANGSUNG	954.219.23.262,23	806.271.843.050,50	84,50
1	Belanja Pegawai	605.101.876.840	569.611.005.635	94,13
2	Belanja Barang dan Jasa	408.369.582.566	377.130.399.027	92,35
3	Belanja Modal	376.239.383.080	327.524.592.440	87,05

Sumber: BPKAD, 2023

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2022, belanja pegawai pada belanja langsung Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 605.101.876.840 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 569.611.005.635 atau 94,13 %. Belanja honorarium PNS yang dianggarkan sebesar Rp. 8.286.110.000 dan terealisasi sebesar Rp.



7.580.652.364 atau 91,49 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Pegawai	605.101.876.840	569.611.005.635	94,13
1	Honorarium PNS	8.286.110.000	7.580.652.364	91,49
2	Uang lembur	0	0	0
3	Belanja Pegawai BLUD	4.990.000.000	4.383.105.000	87,84

Sumber: BPKAD, 2023

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 belanja barang dan jasa Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 408.369.582.566 dan terealisasi sebesar Rp. 377.130.399.027 atau 92,35 %. Komposisi belanja barang dan jasa dengan persentase realisasi tertinggi pada Belanja Premi Asuransi sebesar 95,87 %.

Tabel 2.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Barang dan Jasa	408.369.582.566	377.130.399.027	92,35
1	Belanja Bahan Pakai Habis	103.612.961.967	86.445.329.329	83,43
2	Belanja Bahan/Material	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor	95.546.253.376	87.581.476.043	91,66
4	Belanja Premi Asuransi	20.729.062.800	19.872.524.170	95,87
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	344.500.000	273.000.000	79,25
8	Belanja Perjalanan Dinas	52.962.171.300	39.127.736.541	73,88
9	Belanja Pemeliharaan	7.213.669.303	5.785.970.761	80,21



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
10	Belanja Jasa Konsultansi	2.135.775.204	1.595.125.699	74,69
11	Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.082.330.200	643.032.050	59,41
12	Belanja barang dan jasa BLUD	61.560.773.311	56.387.396.920	91,60

Sumber: BPKAD, 2023

c. Belanja Modal

Pada tahun 2022 belanja modal Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 376.239.383.080 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 327.524.592.440 atau 87,05 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	BELANJA MODAL	376.239.383.080	327.524.592.440	87,05

Sumber : BPKAD, 2023

f.1.5 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dengan jumlah pendapatan yang terbatas. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Maros adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 tidak terealisasi atau 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 39.857.009.672. Rincian target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.22
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	PEMBIAYAAN DAERAH	39.857.009.672	0	0
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.857.009.672	0	0
	Penggunaan Silpa	39.857.009.672	0	0
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.831.702.753	0	0
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	19.783.268.393	0	0
	Sisa Dana BOS	48.434.360	0	0

Sumber: BPKAD, 2023

Untuk penerimaan pembiayaan daerah capaian tidak realisasi atau 0% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada realisasi.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), membuktikan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia telah beralih dari sentralisasi menuju kepada desentralisasi, dan berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.



Untuk itu dibutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang yang komprehensif, adaptif serta sinergis, dan penyusunannya dilakukan dengan menerapkan pendekatan ; (1) Pertumbuhan yang tinggi, (2) Pemerataan, (3) Partisipatif, (4) Pembangunan dari bawah ke atas (*bottom up*), (5) Pembangunan dari atas ke bawah (*top-down*), dan (6) Berwawasan lingkungan/berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros disusun sebagai perwujudan dari amanat kedua Undang-Undang tersebut. Kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Maros ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2016-2021 (Lembaran Daerah No. 4 Tahun 2016).

Dalam menyusun RPJMD ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang telah disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD dan semasa pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD Daerah ini juga mengacu pada RPJP Kabupaten Maros, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan/Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama penyusunan RPJMD Kabupaten Maros adalah:

1. Menyajikan program dan kegiatan turunan Visi dan Misi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang akan dilaksanakan sebagai program dan kegiatan prioritas utama;
2. Menyajikan gambaran tentang arah kebijakan umum yang wajib diikuti oleh semua pejabat daerah dan DPRD dalam menyusun RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD serta R-APBD dan DPA pada setiap tahun anggaran.

Sedangkan sasaran penyusunan RPJMD Kabupaten Maros 2016-2021 adalah :

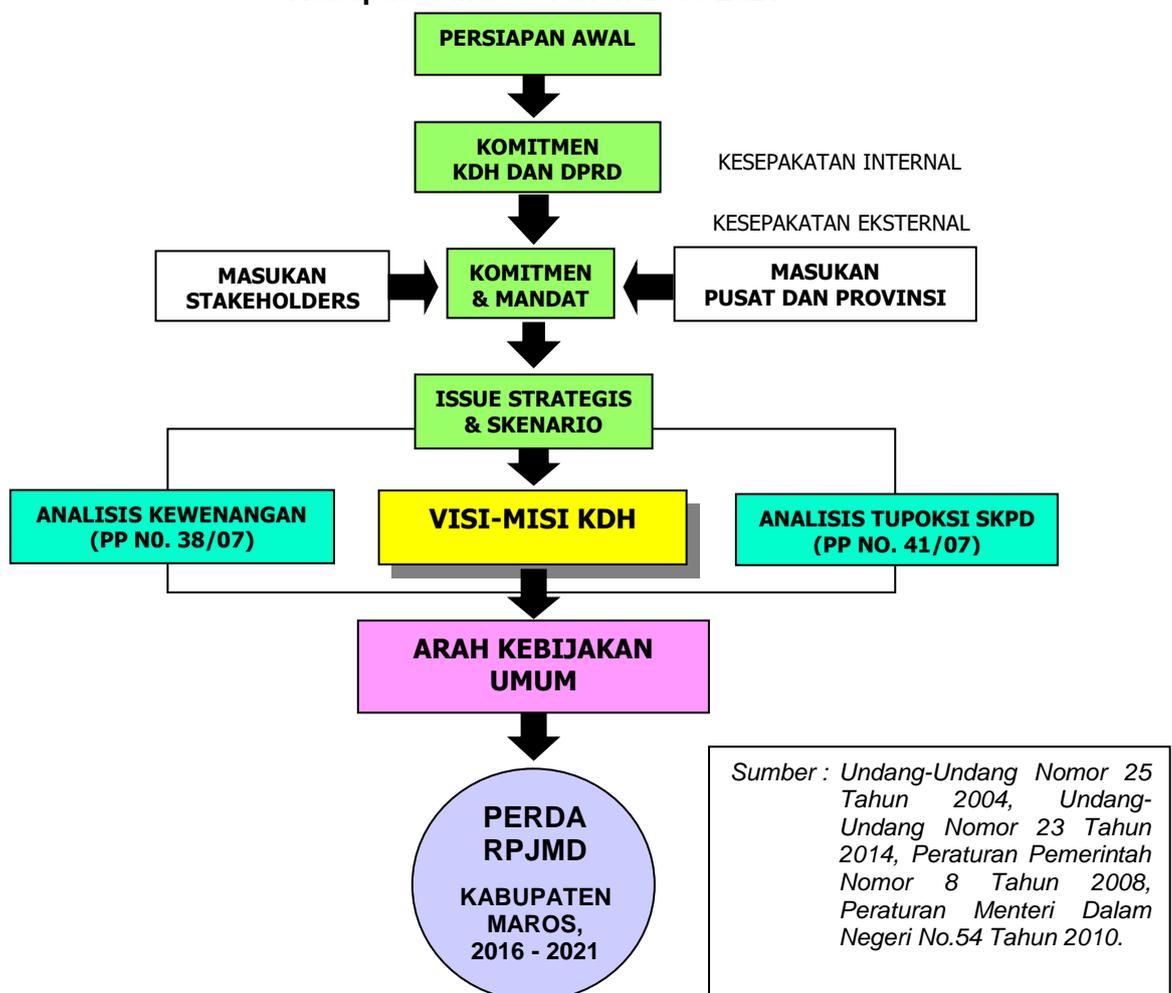
1. Kesiapan Kebijakan dan Program Pembangunan dalam skala periode yang lebih jelas dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



2. Ketersediaan rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD.
3. Merupakan persetujuan dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros serta masyarakat terhadap pembangunan daerah

Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar I.1.

Gambar I.1
Pola Pikir dan Proses Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2021



Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen RPJMD juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada



Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Maros.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Maros digambarkan melalui kajian data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah Kabupaten Maros. Gambaran umum kinerja Kabupaten Maros tidak semua menggambarkan penurunan capaian, namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan Kabupaten Maros dengan dasar bahwa Kabupaten Maros sudah tidak lagi mentolelir kondisi-kondisi minor seperti angka kemiskinan, pemukiman kumuh dan kondisi minor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Maros secara umum dapat terpilah pada kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan, Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu di tingkatkan.

b. Visi dan Misi

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Namun proses pembangunan yang dilakukan selama ini, tidak hanya menghasilkan kemajuan dan keberhasilan, tetapi juga menyisakan dampak berupa permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ragam permasalahan tersebut menuntut perhatian untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ke arah yang lebih baik, demokratis



dan berkeadilan. Dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta kemampuan mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang tetap harus menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.

Dibutuhkan pula sebuah Visi menyangkut kemana daerah dan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan rumusan umum dan gambaran mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Maros, dengan memperhatikan RPJP Kabupaten Maros 2005-2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan RPJM Nasional, serta dinamika lingkungan strategis maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, yaitu:

“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING”

Yang dimaksud **sejahtera** menurut pengertian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kondisi masyarakat Kabupaten Maros pada tahun 2022 yang **lebih baik** dari kondisi sebelumnya pada seluruh sektor kehidupan masyarakat yang ditandai dengan :

1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yang Bermutu, Kecukupan Kebutuhan dan Ketersediaan Akan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Aman, Damai, dan Nyaman Serta Akses Untuk Berpartisipasi.
2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendukung Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah yang Lebih Berkualitas dan Merata.



3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka *Good Governance And Clean Government*.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta/Dunia Usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.

Guna Menyatukan langkah, gerak, dan tindakan yang nyata bagi seluruh stakeholders pembangunan Daerah dan seluruh komponen Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi dengan tetap memperhitungkan kondisi, permasalahan, serta tantangan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2016-2021

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja, kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam



pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program - program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan dan pengendalian.

Untuk mendukung visi “MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maros periode 2021 – 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada Bab V, diperlukan strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Maros periode tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:



1. Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik

- Tujuan 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran 2: Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas

Strategi: Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

2. Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia

- Tujuan 2: Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Strategi : Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan keagamaan Strategi: Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan daam perspektifgender

Strategi: Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.



3. Misi 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif

- Tujuan 3: Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat

Sasaran 6: Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat

Strategi : Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.

Sasaran 7: Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat

Strategi : Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM

4. Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

- Tujuan 4: Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah

Sasaran 8: Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah

terhadap PDRB Strategi : Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Sasaran 9: Menurunnya jumlah pengangguran

Strategi : Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor –sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Sasaran 10:



Terkendalinya Laju Inflasi

Strategi : Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.

Sasaran 11: Menurunnya jumlah masyarakat miskin

Strategi : Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

5. Misi 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah

- Tujuan 5: Menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di tiap wilayah

Sasaran 12: Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat

Strategi : Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.

6. Misi 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

- Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan

Strategi: Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup

Tujuan 7: Menurunkan resiko bencana

Sasaran 14: Menurunnya resiko akibat bencana



Strategi : Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Selanjutnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi dalam RPJMD periode 2021 – 2026, disajikan dalam tabel berikut ini:

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
dan Strategi Kabupaten
Maros**

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
MISI 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik				
1	Menciptakan tatakelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
		2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	
MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia				
2	Menciptakan kualitas sumber daya manusia	3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.
		4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan	Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat



	masyarakat yang berdaya saing	5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan dalam perspektif gender	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif				
3	Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	6	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.
		7	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM

**MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal**

4	Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah	8	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB	Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
		9	Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan penyerapan tenaga kerjanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.
		10	Terkendalnya Laju Inflasi	Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.
		11	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

MISI 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah



5	Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah	12	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				
6	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	13	Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan	Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
7	Menurunkan resiko bencana	14	Menurunnya resiko akibat bencana	Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. Program tersebut tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah tersebut



adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan tema atau fokus pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Maros sebagaimana digambarkan berikut ini:

Tema Pembangunan Kabupaten Maros Periode tahun 2021 – 2026

TEMA TAHUN 2022	TEMA TAHUN 2023	TEMA TAHUN 2024	TEMA TAHUN 2025	TEMA TAHUN 2026
Meningkatkan Daya Saing melalui ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan SDM secara Inklusif	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial Masyarakat melalui infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas SDM	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pembangunan wilayah dan pengembangan SDM	Percepatan pembangunan wilayah yang berkualitas untuk mewujudkan pemerataan wilayah	Meningkatkan pembangunan Manusia yang produktif dan berkarakter

Strategi dan arah kebijakan daerah dimaksudkan sebagai landasan operasional pembangunan Kabupaten Maros agar dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan mencakup seluruh aspek dan bidang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam kurun waktu 2016 - 2021.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Maros memiliki strategi untuk mencapai sasaran dari **misi pertama**, yaitu :

1. Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua



- wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
2. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.
 3. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.
 4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
 5. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.
 6. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM.
 7. Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
 8. Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Sasaran 10: Terkendalnya Laju Inflasi.
 9. Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui



optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.

10. Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
11. Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
12. Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
13. Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.



Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2021 – 2026 Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi pada setiap Misi

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			TAHUN 2022	
MISI 1 : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik				
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<p>Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).</p> <p>Penguatan pengelolaan akuntabilitas kinerja</p> <p>Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati.</p> <p>Pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan ke dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p> <p>Penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan</p> <p>Penguatan pengawasan melalui Peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p>



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			TAHUN 2022	
				<p>Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan, yang meliputi: pembinaan terhadap struktur organisasi, pembinaan terhadap budaya organisasi, dan pembinaan terhadap inovasi organisasi.</p> <p>Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang meliputi: Pemantauan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, Pendampingan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, dan Evaluasi pelaksanaan penataan perangkat Daerah.</p> <p>Penyempurnaan Kebijakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan</p> <p>Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar</p> <p>Pendelegasian kewenangan terkait pelaksanaan pelayanan publik</p>
	2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas		
MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia				
				<p>Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun</p> <p>Peningkatan kualitas dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Peningkatan</p>



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2022
2 Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing	3 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi	kesejahteraan tenaga pendidik (PNS dan PPPK)
			Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah
			Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan.
			Penghapusan iuran komite sekolah.
			Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa
			Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat
			Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat
			Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budaya pendidikan
			Peningkatan akses bagi disabilitas dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan
			Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi
			Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB
			Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit
			Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			Pemenuhan dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan tenaga kesehatan
Pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan			
Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.			
Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan			
	Meningkatnya		



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2022
	4	kualitas layanan keagamaan	<p>Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan</p> <p>Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong</p> <p>Peningkatan Kesejahteraan (Insentif) bagi Imam masjid, guru mengaji, pastor, pendeta, guru sekolah minggu/remaja dan pegawai syara'</p> <p>Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan</p> <p>Pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat</p> <p>Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat aktifitas keagamaan dan syiar.</p> <p>Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal yang bernilai religius</p> <p>Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya dalam pendidikan keagamaan</p> <p>Pembinaan terhadap organisasi sosial dan kemasyarakatan</p> <p>Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup</p> <p>Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam mengemukakan pendapat atau saran pada pengambilan kebijakan publik.</p>
	5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan daam perspektif gender	<p>Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>Pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan</p> <p>Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha tentang gender</p> <p>Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO</p> <p>Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik</p> <p>Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab.</p> <p>Peningkatan upaya penurunan kasus perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan</p>



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			TAHUN 2022		
				Peningkatan akses bagi pemuda perempuan mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi	
				Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi pemuda perempuan utamanya pada sektor formal	
MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif					
3	Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	6	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa untuk konsumsi masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat
					Pengidentifikasi jumlah stok barang dan jasa beserta ketersediaannya di setiap wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya aksi spekulasi.
					Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke tingkat pedagang di pasar rakyat.
					Pelaksanaan penetrasi pasar menjelang peringatan hari - hari besar untuk menegaskan kecukupan stok dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat
					Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja
					Pemenuhan standar pelayanan pendidikan anak usia dini
	7	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar (SD Sederajat dan SMP sederajat)	
				Pemenuhan standar pelayanan pendidikan kesetaraan	
				Pemenuhan standar pelayanan kesehatan	
				Pemenuhan standar pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	
				Pemenuhan standar pelayanan pengolahan air limbah domestik	
				Pemenuhan standar pelayanan	



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2022
			penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
			Pemenuhan standar pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
			Pemenuhan standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
			Pemenuhan standar pelayanan informasi rawan bencana
			Pemenuhan standar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
			Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
			Pemenuhan standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
			Percepatan pembangunan wilayah (Desa/Kelurahan) dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar.
			Peningkatan kualitas SDM pengelola pelayanan dasar
			Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar di wilayah
			Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			TAHUN 2022		
				Perluasan jangkauan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakselerasi pelayanan dasar	
MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal					
4	Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah	8	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB	Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan
				Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	
				Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi	
				Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi	
				Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usahamikro	
				Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	
				Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpotensi ekspor	
				Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan	
				Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst maros sebagai tujuan wisata internasional	
				Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama	
Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk					



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2022
			<p>perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</p> <p>Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan</p> <p>Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital</p> <p>Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif</p> <p>Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif</p> <p>Peningkatan populasi pelaku usaha digital</p> <p>Pengembangan maros creative center</p> <p>Perluasan aktivitas ekonomi kreatif</p> <p>Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi untuk ekonomi kreatif dan digital</p> <p>Pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0</p>
	9	Menurunnya jumlah pengangguran	<p>Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.</p> <p>Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja</p> <p>Penyediaan balai latihan kerja</p> <p>Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan</p> <p>Pengembangan Kawasan Industri Maros yang mampu memberikan daya serap terhadap ketersediaan tenaga kerja lokal</p> <p>Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja.</p> <p>Peningkatan pelayanan kepemudaan termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda melalui pengembangan maros creative center</p>
	10	Terkendalinya Laju Inflasi	<p>Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi</p> <p>Peningkatan ketersediaan komoditas pangan</p> <p>Peningkatan dukungan infrastruktur dan logistik</p> <p>Penguatan kerjasama dengan institusi lain</p>
	11	Menurunnya jumlah masyarakat	<p>melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan</p> <p>Peningkatan akses pasar melalui kemitraan antar petani dengan pedagang/industri pengolahan/pasar modern.</p>



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2022
	miskin	dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.	Optimalisasi peran TPID
			Penguatan sistem informasi dan peningkatan akses pemasaran
		Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.	Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan
			Peningkatan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga
			Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta kemitraan usaha
			Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha
			Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu
			Percepatan pelaksanaan dan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan berperspektif gender.
			Peningkatan akses dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan pada usaha ekonomi produktif.
			Penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu termasuk penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru
			Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat miskin dan rentan
			Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan subsidi pembayaran iuran BPJS
			Penguatan pelaksanaan jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi
			Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			TAHUN 2022	
MISI 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah				
5	Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah	12	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	
				Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
				Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan.
				Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
				Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan
				Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
				Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
				Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi
				Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni.
				Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan
				Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
				Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa
				Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.
Peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.				
Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan				
MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				
6			Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan	
				Penyediaan status mutu udara Daerah
				Penyediaan data kualitas udara ambien Daerah
				Peningkatan proporsi jumlah industry yang memenuhi baku mutu emisi.
				Pengendalian kualitas emisi dari berbagai macam sumber
				Pengembangan ruang terbuka hijau, termasuk pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove pada wilayah pesisir.
				Penerapan Car Free Day
Peningkatan peran serta masyarakat secara aktif				



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			TAHUN 2022	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	13	Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Pengenalan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan
				Pengendalian pencemaran air secara administrasi, yang meliputi: Penerapan Standard Kualitas Air Sungai, penerapan Baku mutu kualitas air limbah industri, dan Pelaporan hasil pemantauan kualitas air.
				Penerapan Produksi Bersih, yaitu pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinyu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk barang atau jasa.
				Penyediaan dan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
				Penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya sumber daya air dan bahaya pencemaran air utamanya yang berdomisili di sekitar sungai
				Penyuluhan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah
				Sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran air
				Pemantauan kualitas tanah
				pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah
				Publikasi informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat
				Pemulihan kualitas tanah yang mengalami pecemaran atau kerusakan
				Penetapan kriteria kerusakan lahan pada aktifitas pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
				Penetapan izin lingkungan
			Peningkatan sistem ketahanan bencana	Pengarusutamaan resiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah
				Pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan peta resiko bencana yang di fokuskan pada wilayah rawan bencana.
				Pemanfaatan kajian dan peta resiko bencana pada penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana.
				Integrasi kajian resiko bencana



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			TAHUN 2022	
7	Menurunkan resiko bencana	14	Menurunnya resiko akibat bencana	yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.
				kedalam RTRW
				Penyusunan Rencana Kontijensi bencana yang mungkin akan terjadi sebagai pedoman kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
				Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana.
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan mitigasi bencana
				Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan
				Peningkatan sosialisasi dan desiminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.
				Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana
				Pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun mitigasi bencana.
				Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturn penanggulangan bencana
				Penyediaan sistem dini bencana pada kawasan resiko bencana dan memastikan berfungsinya dengan baik sistem tersebut.
				Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana				
Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang				



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			TAHUN 2022	
				diperlukan untuk memastikan terlaksananya aktifitas pelayanan publik, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana
				Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
				Pengembangan Desa tangguh bencana dan gerakan Desa hebat.



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Konsep Otonomi Daerah memberikan perwujudan kepada Pemerintah Daerah untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti Negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan di daerah.

Dari dua pertimbangan di atas, selanjutnya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan Pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Maros menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang SPM bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;



3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat.
4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
5. Bersifat dinamis.

c. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan



guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Maros menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun salah satu kebijakan



yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk mendukung pencapaian SPM dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yaitu, Program Penyempurnaan Sistem Manajemen Pelayanan Publik dan Program Peningkatan Kapasitas Administrasi Pelayanan Publik.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2022, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari : Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).



a. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (Daya beli).

Berdasarkan tiga komponen tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2021 sebesar 70,41 dan tahun 2022 sebesar 71,00 dengan perubahan sebesar 0.838%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

KOMPONEN IPM	TAHUN		Perubahan %
	2021	2022	
Angka Harapan Hidup	69,04	69,28	
Rata-rata Lama Sekolah	8,01	8,02	
Harapan Lama Sekolah	13,16	13,30	
IPM	70,41	71,00	0,838%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2023

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan harus segera dilakukan penanggulangan. Dengan berbagai program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2021 sebesar 9,57 persen dan tahun 2022 sebesar 9,43 persen dengan perubahan sebesar -1,46%.

Pencapaian Angka Kemiskinan Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Kemiskinan Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2021	2022	
Angka Kemiskinan %	9,57	9,43	- 1,46

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2023

Kinerja penanggulangan kemiskinan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendorong perekonomian daerah. Program yang digalakkan di Kabupaten Maros untuk mengatasi kemiskinan diantaranya bedah rumah, pengembangan ekonomi produktif, dan penyediaan sarana air bersih.

c. Angka Pengangguran

Masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi adalah produktifitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Angka Pengangguran di Kabupaten Maros pada tahun 2021 sebesar 6,30% dan pada tahun 2022 sebesar 5,04% dengan perubahan sebesar -20,06%.

Pencapaian Pengangguran di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Pengangguran Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2021	2022	
Angka Pengangguran %	6,30	5,04	-20,025%.

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2023

d. Pertumbuhan Ekonomi

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun



persentase, berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder). Struktur perekonomian di suatu daerah dicerminkan oleh kontribusi/peranan nilai tambah masing-masing sektor terhadap total PDRB, pergerakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana telah melampaui dari target pada RPJMD Kabupaten Maros. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mengalami perlambatan sebesar 1,36 persen dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 9,13 persen dengan perubahan sebesar 571,32%.

Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2021	2022	
Pertumbuhan Ekonomi %	1,36	9,13	571,32

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2023

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita adalah untuk mengetahui peningkatan kemakmuran/kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang ada terkait dengan PDRB perkapita Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2021 PDRB perkapita sebesar Rp. 19.005.000,- dan terakhir pada tahun 2022 sebesar Rp. 391.489,- yang artinya bahwa kondisi kemakmuran Masyarakat mengalami tren peningkatan yang positif.

Pencapaian PDRB Per Kapita di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**PDRB Perkapita Tahun 2021-2022
Kabupaten Maros**

Uraian	2021	2022	Perubahan %
Nilai PDRB (Juta Rp.)	19,005,000	23.544.300	
Jumlah Penduduk (jiwa)	396,924	391.489	
PDRB perkapita (Juta Rp/ Jiwa)	47,88	60,14	25,60%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2023

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini/koefisien Gini adalah untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan data bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Maros berada pada ketimpangan rendah berdasarkan koefisien Gini pada 2021 sebesar 0,365 dan tahun 2022 sebesar 0,362 dengan perubahan sebesar -0,82%.

Pencapaian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2021	2021	
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) %	0,365	0,362	-0,82%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2023

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan



menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2022, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDIDIKAN	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	182 PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	984 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	185 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	163 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD = 236 SMP=70 304	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	10.101 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9.182 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	19.795 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.524 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.291 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	857 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.556 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.521 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.291 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	857 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	310 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	257 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.277 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	585 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	228 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	28 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	11 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya	84 Orang	DINAS	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	164 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	125 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	121 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	228 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	KESEHATAN	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2 RS	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.165	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.165	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1.165	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1.206	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.165	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.276	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1276	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINAS	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		logistik kesehatan yang tersedia	3	KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1235	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1235	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	541	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	564	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	564	DINAS KESEHATAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
3	PEKERJAAN UMUM	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS	-	DINAS PEKERJAAN UMUM,	Tidak Terdapat Wilayah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		kewenangan kabupaten/kota (ha)		PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Sungai Kewengan Kabupaten
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
		kabupaten/kota	ii. Tanggul sungai (m)		RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Kewengan Kabupaten	
			iii. Kanal banjir (m)				
			iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)				
			v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)				
			vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)				
			vii. Breakwater (m)				
			viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)				
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) X100%	82,72%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
	Panjang jaringan irigasi primer (m) 100.114 X100% 121.032						
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) X100%	80,32%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 55.741 X100%				
			69.402				
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Irigasi Tersier merupakan kewenangan Provinsi	
			Panjang jaringan irigasi tersier (m) 0 X100%				
			0				
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				PERTANA HAN	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	94.528	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	275	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	94.803	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	15	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	94.803		PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}}$	X100 %	95,24%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
			94.528	X100 %		
			99.249			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}}$	X100 %	0%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
			0	X100 %		
			0			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDT}}$	X100 %	4,10%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
			275	X100 %		
			6.704			
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}}$	X100 %	1,61%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
			1.464	X100 %		
			90.907			
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}}$	X100 %	100%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
			2	X100		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			%	HAN	
			2		
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	12%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
			6	X100 %	
			50	X100 %	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$	4,1%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
			275	X100 %	
			6.704	X100 %	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot (m)}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	0,02%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
			15	X100 %	
			94.528	X100 %	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
			4.778	X100 %	
			4.778	X100 %	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	4.778		PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada		PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANA HAN
		Penetapan Keputusan	Ada		PEKERJAA N UMUM,



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	3.675 Bangunan	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	8 Unit Bangunan	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.032,13 Km	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan yang dibangun	1,07 Km	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jembatan yang dibangun	176 Meter	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan yang ditingkatkan	35,54 Km	PEKERJAAN UMUM,	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		(struktur/fungsi)		PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0 Km	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0 Km	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	39,30 Meter	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan yang dipelihara	8.478 Km	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	650	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	550	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Terselenggaranya Sistem Informasi	1	PEKERJAA N UMUM,	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa	0	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	550	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	550	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		PERTANAHAN	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	NGAN DAN PERTANAHAN PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	PERUMAHAN RAKYAT	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Belum ada relokasi sesuai rencana aksi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				N HIDUP	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Ada Program Pemerintah yang berdampak Relokasi Untuk Masyarakat di Tahun 2022
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Ada Program Pemerintah yang berdampak Relokasi Untuk Masyarakat di Tahun 2022
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	17,07 Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	393 Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	5,36 Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah di kab/kota	91.432 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit PK RTLH	393 Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tidak layak huni	30.011 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	606 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Rasio rumah dan KK	Jumlah KK X100%	DINAS	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah total unit rumah	98,03%	PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			$\frac{89.628}{91.432} \times 100\%$			
		Jumlah rumah pembangunan baru	3.248 Rumah		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	14		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak Ada		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	118		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	5.768		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 PPNS		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Tersedianya sarana prasarana minimal	136		POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$		100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			$\frac{1}{1} \times 100\%$				
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$		23,52%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	$\frac{91.235}{91.235} \times 100\%$						



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			387.984			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			$\frac{1}{1} \times 100\%$			
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Ada Pembuatan dokumen Renkon
			$\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			$\frac{100}{100} \times 100\%$			
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	0.03%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			$\frac{100}{387.984} \times 100\%$			
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	5,63%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			$\frac{21.842}{387.984} \times 100\%$			
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			$\frac{387.984}{387.984} \times 100\%$			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah penetapan KLB}} \times 100\%$	0%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA	Tidak Ada Penetapan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		KLB	Jumlah seluruh penetapan status KLB		DAERAH	Status Darurat Bencana
			0	X100%		
			0			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	X100%	0%	Tidak Ada Penetapan Status Darurat Bencana
			Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	X100%		
			2	X100%		
			2			
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	X100%	100%	
			Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	X100%		
			48	X100%		
			48			
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	X100%	83,33%	
			Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	X100%		
			15	X100%		
			21.842			
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	159 Operasi Penyelamatan 3 Jenis Pelayanan			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 6 Sektor			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	60			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Petugas Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada Kelurahan/ Desa di Kab. Maros Tahun 2021 belum tersedia ataupun dibentuk
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	235	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Ada 207 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Ada 181 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6	SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3	DINAS SOSIAL	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	10.787	DINAS SOSIAL	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	4 Tim	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	292	DINAS SOSIAL	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	105	DINAS SOSIAL	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3	DINAS SOSIAL	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang		DINAS	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	61	SOSIAL	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	4	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	4	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang		DINAS	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	61	SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	49	DINAS SOSIAL	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1.015	DINAS SOSIAL	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1.015	DINAS SOSIAL	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	DINAS SOSIAL	UPT Rumah Penampungan Trauma Center
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	2	DINAS SOSIAL	paket permakanan khusus bagi kelompok rentan
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	100	DINAS SOSIAL	korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	47	DINAS SOSIAL	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
7	TENAGA KERJA	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN		
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi Indikator - Target Indikator X100%		0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
			Realisasi				
			100 X100%	100			
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak Ada		DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN		
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan Program PBK kualifikasi KKNi atau Okupasi pada tahun n X100%		0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
			Keseluruhan Program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n				
			0 X100%	0			
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur yang bersertifikat pada tahun n X100%		100%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
			Jumlah Instruktur Seluruhnya Pada Tahun n				
144 X100%	144						
Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah Instruktur pada tahun n X100%		4,15%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN			
	Jumlah peserta pelatihan pada tahun n						
	141 X100%	3.466					
Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n X100%		20%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN			
	Jumlah seluruh LPK pada tahun n						
	4 X100%	20					
Persentase LPK yang	Jumlah LPK yang	X100%		DINAS			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		memiliki perizinan	$\frac{\text{memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun n}}$ $\frac{19}{20} \times 100\%$	95%	PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah penganggur yang dilatih	3.466 Orang	-	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 100\%$ $\frac{3.466}{3.466} \times 100\%$	100%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan pada tahun n}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$ $\frac{3.466}{3.466} \times 100\%$	100%	DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\Sigma \text{ CPMI dilatih}}{\Sigma \text{ CPMI terdaftar}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak Ada		DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah Perusahaan n pada tahun n}} \times 100\%$ $\frac{304}{304} \times 100\%$	100%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			304			
		Data Tingkat Produktivitas Total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)		0,27%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n}}{\text{Jumlah Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$		13,24%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			$\frac{27}{204} \times 100\%$			
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n}}{\text{Jumlah Perusahaan yang memiliki serikat Pekerja/ Serikat Buruh}} \times 100\%$		0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			$\frac{0}{304} \times 100\%$			
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	7			DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah Perusahaan n pada tahun n}} \times 100\%$		311%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			$\frac{118}{38} \times 100\%$			
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah Perusahaan n pada tahun n}} \times 100\%$		43,75%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			$\frac{133}{304} \times 100\%$			
		Persentase jumlah	Jumlah perusahaan X100%			DINAS



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		perusahaan yang berselisih	yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	5,92%	PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
			Jumlah Perusahaan n pada tahun n			
			18 X100% 304			
		Jumlah mogok kerja	2		DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Jumlah penutupan perusahaan	1		DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Jumlah perselisihan kepentingan	18		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah perselisihan PHK	11		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	240		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2 Kali		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 Kali		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Persentase	Jumlah perusahaan		DINAS	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	5,56%	PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
			Jumlah Perusahaan n pada tahun n			
			17	X100%		
			304			
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1.220		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2.149		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus(BKK) wilayah kab/kota	1		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antarkerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	19		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	341		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
					KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI/CTKI}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL, PTP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	22		DINAS PENANAMAN NODAL, PTP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL, PTP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL, PTP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL, PTP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL, PTP DAN KETENAGA KERJAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	45 OPD		DP3ADALDUK		
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	240		DP3ADALDUK		
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1		DP3ADALDUK		
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1		DP3ADALDUK	Forum Anak	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	100%	X100 %	DP3ADALDUK	
			Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kab./kota				
			30 30				
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1		DP3ADALDUK		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1		DP3ADALDUK		
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2		DP3ADALDUK		
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	1		DP3ADALDUK		
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2		DP3ADALDUK		
Jumlah lembaga layanan			DP3ADALDUK				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1			
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1		DP3ADALDUK	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan		100%	DP3ADALDUK
			Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan			
			14	X100 %		
			14			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
9	PANGAN	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak ada Regulasi yang harga minimum daerah terkait tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak ada Regulasi yang harga minimum daerah terkait tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak terdapat kegiatan pengawasan keamanan pangan segar
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
10	PERTANAHAN	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+jumlah surat penolakan pemohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee)}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee)}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
11	LINGKUNGAN HIDUP	Hasil perhitungan kabupaten/kota terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = 55,45 IKU = 87,77 ITH = 53,55	68,13 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	63,146	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota $\times 100\%$ Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi $\frac{34}{43} \times 100\%$	79,07 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada $\times 100\%$ Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Jumlah MHA yang diakui $\times 100\%$ Jumlah usulan MHA $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan $\times 100\%$ Jumlah MHA yang ada $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana}}{\text{Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\%$	100%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	X100%	43,69 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Peristiwa perkawinan yang dilaporkan					
			79.982	X100%				183.047
		Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	X100%	47,69 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan					
			2.365	X100%				5.023
		Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Peristiwa kematian yang dilaporkan					
			8.709	X100%				8.709
		Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			2 tahun					
			2	X100%				2



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	80 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Ada
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Semua Desa di tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	534	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PKK dan Posyandu
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	65 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	118 Kelompok Binaan PKK di 56 Desa



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	Tidak Ada		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat Dokumen GDPK hanya belum diperdakan
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	27 Tahun	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f \times k}$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun $b_i = 385$ $p_i^f \times k = 15.450$	28,68 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$ $\frac{364.101}{364.101} \times 100\%$	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	38 Stakeholders		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$ $\frac{25}{25} \times 100\%$	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$ $\frac{6.625}{30.122} \times 100\%$	21,99 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	24 Pokja	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	X100%		Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan			
			2.483	X100%		
		2.483			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	43,68 %				
Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	94,85 %				
	X100%		25.410	X100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			26.789			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
15	PERHUBUNGAN	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	83,33 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	42,37 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	88,67 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan Jalan Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$	9,54%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<p>Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p>	<p>Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p>	<p>X100%</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		<p>Jumlah Perangkat Daerah</p>	<p>X100%</p>					
		<p>39</p>	<p>X100%</p>					
		<p>Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</p>	<p>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</p>	<p>X100%</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		<p>Jumlah Perangkat Daerah</p>	<p>X100%</p>					
		<p>39</p>	<p>X100%</p>					
		<p>Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</p>	<p>Ya, 184</p>		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
		<p>Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015</p>	<p>Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan instansi Penyelenggara Negara domain dan sub domain sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No.5 Tahun 2015</p>	<p>X100%</p>			23,08 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		<p>dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015</p>	<p>Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah</p>	<p>X100%</p>				
		<p>9</p>	<p>X100%</p>					
		<p>Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p>	<p>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p>	<p>X100%</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		<p>Jumlah perangkat daerah</p>	<p>X100%</p>					
<p>55</p>	<p>X100%</p>							



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			55			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	X100%	53,85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah perangkat daerah			
			21	X100%		
			39			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	X100%	471,79 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah layanan			
			184	X100%		
			39			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	X100%	12,82 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah layanan			
			5	X100%		
			39			
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah sistem elektronik			
			33	X100%		
			33			
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi			
			184	X100%		
			184			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	X100%	53,85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		pemerintah	Jumlah perangkat daerah			
			21	X100%		
			39			
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data	X100%	53,85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah perangkat daerah	X100%		
			21	X100%		
			39			
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah perangkat daerah	X100%		
			39	X100%		
			39			
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	X100%		
			39	X100%		
			39			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	X100%	15,38 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah perangkat daerah	X100%		
			6	X100%		
			39			
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	X100%	25%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah ASN Pengelola TIK	X100%		
			6	X100%		
			24			
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat:		1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			<input type="checkbox"/> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran			
			<input type="checkbox"/> Penganggaran			
			<input type="checkbox"/> Strategi			
			<input type="checkbox"/> Peta Jalan			
			<input type="checkbox"/> Arah Kebijakan			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			<input type="checkbox"/> Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	Ada	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\Sigma \text{komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{6} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota}}{6} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\Sigma \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{6} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota}}{6} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{6} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik}}{6} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
----	---------------------	-------------------------------------------	-----------------	-------------	------------



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1	2	3	4	5	6			
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	X100%	1300%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam					
			26	X100%			2	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam tahun yang dilaporkan	X100%	100%		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan					
			4	X100%				4
	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	X100%	10,56 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN			
		koperasi yang ada						
		38	X100%			360		
	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	X100%	17,72 %		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
		Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada						
		45	X100%				254	
Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	X100%	7,5%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN				
	Jumlah koperasi yang ada							
	27	X100%			360			
Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	X100%	19,17 %		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah koperasi yang ada							
	69	X100%				360		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan X100%	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah koperasi yang ada 0 X100%			
			360			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) X100%	61,11%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah koperasi yang ada 220 X100%			
			360			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan X100%	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah koperasi yang ada 0 X100%			
			360			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran X100%	0,83%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah koperasi yang ada 3 X100%			
			360			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha X100%	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah koperasi yang ada 0 X100%			
			360			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan X100%	1,67%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah koperasi yang ada 6 X100%			
			360			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	$\frac{30}{270} \times 100\%$	11,11 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	$\frac{7.442}{27.357} \times 100\%$	27,20 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	$\frac{2.713}{27.375} \times 100\%$	9,92%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	$\frac{20.380}{13.600} \times 100\%$	149,85 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	$\frac{2.205}{31.775} \times 100\%$	6,49%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	$\frac{1.438}{27.357} \times 100\%$	5,26%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$		17,48 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		pendampingan	Jumlah usaha mikro yang ada		N	
			$\frac{4.783}{27.357} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
18	PENANAMAN MODAL	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak Ada Fasilitas/Intensif	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	Naskah Akademik Perda Telah disusun Tahun 2021 dan Perdanya sudah dibuat 2021 Namun sampai dengan saat ini belum selesai
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Intensif penanaman modal	Ada, 1 SOP	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Intensif penanaman modal per tahun	Tidak Ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tersedia Laporan Karena Belum Selesaiyana Perda yang mengatur
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Ada, 6 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	0 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada Kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	Tidak dilaksanakana n Karena adanya recofusing Anggaran dan Pandemi Covid 19
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	149 Konsultasi	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	1.627 Izin	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat	30.888.623.531.353	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Kabupaten/Kota		DAN KETENAGAKERJAAN	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Ada, 10 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	141 Perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	29 Permintaan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	414 orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	414 orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	664 Orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	14 orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	157 Orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	6 Cabang Olah raga	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
20	STATISTIK	Tersedianya buku profil daerah	Ada, 1		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	26		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	26		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	34,09 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			$\frac{15}{44} \times 100\%$			
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	47,55 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
$\frac{97}{204} \times 100\%$						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
21	PERSANDIAAN	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			$\frac{0}{14} \times 100\%$			
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian}}{\text{Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang ada}} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			$\frac{33}{33} \times 100\%$			
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah Sistem Elektronik (SE) atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang ada}} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			$\frac{33}{33} \times 100\%$			
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)}} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			$\frac{50}{50} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
22	KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan	335 Obyek PK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	233 Obyek PK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	233 Obyek PK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi+ Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar Jumlah CB diselamatkan = Jumlah CB diamankan = Jumlah CB dizonasi = Jumlah CB dipelihara = Jumlah CB dipugar =	335 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Layanan perijinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	3 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	40 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah CB diteliti = 0 Jumlah CB direvitalisasi = 0 Jumlah CB diadaptasi = 0			
		Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	233 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	225	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah koleksi museum dikelola = 5 Jumlah koleksi museum diamankan = 4 Jumlah koleksi museum dikembangkan = 4 Jumlah koleksi museum dimanfaatkan = 4			
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	2.089 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah partisipasi dalam pengelolaan museum	1.650		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	225		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	14 Tim	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	5 Tim Ahli	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	5 Orang Ahli	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah SDM Museum	5 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	5 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) Sarana dan prasarana CB Sarana dan Prasarana Museum	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	16 Kegiatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
23	PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) X100%	66,41 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)						
259.993 X100%	391.489					
Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan secara online maupun onsite X100%	10,45 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	40.708 X100%					
391.489						
Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya X100%	0,22%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	871 X100%					
391.489						
Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan X100%	59,53 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	278 X100%					
467						
Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	61,78		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
24	KEARSIPAN	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	X100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip aktif	X100%			
		1.107	X100%	1.107		
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	X100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip in-aktif	X100%			
		2.545	X100%	2.545		
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	X100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip statis	X100%			
		98	X100%	98		
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	X100%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten	X100%			
		0	X100%	0		
Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip		53.016	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana		600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah		658	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik		98	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Pencarian arsip statis yang pengelolaannya	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala		Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKA		



N O	URUSAN PEMERINTAH AN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANG AN
1	2	3	4		5	6
		menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		AN DAN KEARSIPAN	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
25	PERIKANAN	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	26 Rumah Tangga		DINAS PERIKANAN		
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	100%	DINAS PERIKANAN		
			$\frac{1}{1} \times 100\%$				
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak Ada		DINAS PERIKANAN	Semua izin usaha di Kabupaten Maros diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	538 Orang		-	DINAS PERIKANAN	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	200.000 Ekor		DINAS PERIKANAN		



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
26	PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3 Entitas		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	42		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/ kota	0 Tanda Daftar Usaha		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2,138 Orang		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Bisa sebagai peserta atau penyelenggara)	70 Kali	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/ kota	Tidak Ada		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	22		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	X100%	142,86 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata				
			$\frac{280}{196} \times 100\%$				
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	X100%	7,69%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan							
$\frac{280}{3.640} \times 100\%$							
Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10 Lokasi		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Kecamatan			



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
27	PERTANIAN	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	61		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Prasarana pertanian yang digunakan	48		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi izin usaha pertanian	7	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	X100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah prasarana yang dibangun	48			
			48	X100%			
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	X100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			usulan usaha pertanian	7			
			7	X100%			
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	X100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
Luas area terkena bencana	25.532,98						
25.532,98	X100%						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
28	PERDAGANGAN	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">0 / 0</p>	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">0 / 0</p>	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">5 / 5</p>	100%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">5 / 0</p>	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">0 / 0</p>	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	0%		
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}} \times 100\%$	0%		
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah KA yang terbit } \leq 1 \text{ hari kerja (1x24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p>	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) a = 0 b = 0			
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$x = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b=Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c= RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		190,90%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			a = 47.92 5,97			
			b = 11.89 1,7			
			c = 13.21 3			
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan X100 % Jumlah potensial UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab./kota X100 % $\frac{561}{1.543}$	36%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku X100 % Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan X100 % $\frac{11}{337}$	3%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN					
1	2	3	4		5	6					
29	PERINDUSTRIAN	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	X100 %	0%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
		$\frac{0}{0} \times 100\%$	X100 %	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			Tidak Ada Izin Perluasan Industri yang diterbitkan 2022				
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		100%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$		X100 %				100%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		$\frac{370}{370} \times 100\%$	X100 %		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan						
		$\frac{0}{0} \times 100\%$	X100 %		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0			DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab./Kota yang masuk dalam SIINas		X100 %	0,54 %		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota	Total populasi perusahaan industri		PERDAGANGAN	
			$\frac{2}{370} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
30	TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	6	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	150	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	85,22 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			$\frac{13.015}{15.272} \times 100\%$			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	102,80 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			$\frac{48.841}{44.592} \times 100\%$			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	100,23 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			$\frac{21.619}{21.614} \times 100\%$			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			$\frac{420}{420} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah Daya tampung Rumah Sakit Rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{285}{389.580} \times 100\%$	0.073 %	DINAS KESEHATAN	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \times 100\%$	100%	DINAS KESEHATAN	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{6.535}{6.434} \times 100\%$	101,57 %	DINAS KESEHATAN	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan}}{\text{Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{6.584}{6.434} \times 100\%$	102,33 %	DINAS KESEHATAN	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{6.533}{7.805} \times 100\%$	83,703 %	DINAS KESEHATAN	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{29.341}{40.257} \times 100\%$	72,88 %	DINAS KESEHATAN	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar}} \times 100\%$	44,42 %	DINAS KESEHATAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota $\frac{59.644}{134.273} \times 100\%$			
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{140.280}{248.452} \times 100\%$		56,46 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{23.381}{35.315} \times 100\%$		66,207 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{8.872}{24.315} \times 100\%$		36,488 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{1.714}{2.041} \times 100\%$		71,387 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{823}{871} \times 100\%$		94,489 %	DINAS KESEHATAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah penderita TBC di Kabupaten / Kota	95,182 %		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita di Kabupaten / Kota	100,64 %		
			$\frac{5.433}{5.708} \times 100\%$			
			$\frac{8.175}{8123} \times 100\%$			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
3	PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	X100%			
			1	X100%			
			1				
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	X100%			
			1	X100%			
			1				
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)	X100%	81,45 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kotaluas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	X100%			
			4.953,16	X100%			
			6,081				
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	X100%	81,61 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	X100%			
			80.999	X100%			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			99.249			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100\%$	99,65 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			98.900	X100%		
			99.249			
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			4.778	X100%		
			4.778			
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	77,104 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			795,81	X100%		
			1.032,13			
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	60,573 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			550	X100%		
			908			
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			214	X100%		
			214			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
4	PERUMAHAN RAKYAT	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	X100%	100%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n				
			245	X100%			
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak ada program kegiatan terkait pada Tahun 2022
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	X100%			
			0	X100%			
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	X100%	31,4%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	X100%			
			5,36	X100%			
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	X100%	32,823 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	X100%			
			30.011	X100%			
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	X100%	1,811 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Jumlah unit rumah kab/kota	X100%					
	1.656	X100%					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			$\frac{118}{118} \times 100\%$			
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			$\frac{5}{5} \times 100\%$			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	387.984 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	387.984 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	15 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas}}{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas}} \times 100\%$	72%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota $\frac{36}{50} \times 100\%$			
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran $\frac{668}{50}$	13,36 Menit	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
6	SOSIAL	<p>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)</p> <p>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p style="text-align: right;">X100%</p> <hr/> <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</p> <p style="text-align: right;">305 X100%</p> <hr/> <p>305</p>	100%	DINAS SOSIAL	
			<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</p> <p style="text-align: right;">X100%</p> <hr/> <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota</p> <p style="text-align: right;">1.015 X100%</p> <hr/> <p>1.015</p>	100%	DINAS SOSIAL	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100\%$	10,526 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			$\frac{2}{19} \times 100\%$			
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$		
		$\frac{3.466}{12.386} \times 100\%$				
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	190088,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			$\frac{23.544.300}{12.386} \times 100\%$			
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	43,75 %	
		$\frac{133}{304} \times 100\%$				
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten		$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	15,868 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			$\frac{341}{2.149} \times 100\%$			



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di APBD}} \times 100\%$	6,893 %	DP3ADALDUK	
			$\frac{9.9906.974.802}{1.449.473.299.517} \times 100\%$			
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	100%	DP3ADALDUK	
			$\frac{30}{30} \times 100\%$			
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$	7,138 %	DP3ADALDUK	
			$\frac{14}{196.129} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	X100%	364,91 4%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
Jumlah kebutuhan pangan	X100%						
15.868,3	4.348,5						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi				
			0	X100%			
		Luas penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			0	X100%			
			0				
		Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	Luas izin lokasi yang diterbitkan	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			0	X100%			
			0				
		Jumlah penerima tanah obyek land reform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	Jumlah penerima tanah obyek landreform	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			2.250	X100%			
			2.250				
		Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			0	X100%			
			0				
		Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			1	X100%			
			1				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan IKA = 55,54 IKU = 87,77 IKL = 53,55		68,13 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{102.532}{162.374} \times 100\%$	63,146 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$ $\frac{5}{14} \times 100\%$	35,714 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	96,67 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			$\frac{267.254}{276.471} \times 100\%$			
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			
		$\frac{25.967}{117.735} \times 100\%$				
		Kepemilikan akta kelahiran		$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$		
			$\frac{123.535}{132.286} \times 100\%$			
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$		
		$\frac{5}{26} \times 100\%$				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	50%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
			X100%				
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)				
		1	X100%	2		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	31,707 %				
		X100%					
Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)							
13	X100%	41					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
14	PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,57 Per Perempuan Usia 15 -49 tahun		DP3ADALDUK	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	X100%	DP3ADALDUK	
			Jumlah Pasangan Usia Subur	50,487 %		
			28.591	X100%		
			56.630			
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani	X100%	DP3ADALDUK	
			Jumlah Pasangan Usia Subur	48,806 %		
			27.639	X100%		
			56.630			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 = 0,78 Bobot angkutan jalan = 7 IK2 = 0.35 Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan = 0,3	0,66	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	9,54		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
			X100%				
			Jumlah OPD				
			39				
			39				
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	X100%	84,615 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
			Jumlah layanan publik	X100%			
				33			
			39				
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	X100%	70,187 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
	Jumlah penduduk	X100%					
		274.773					
	391.489						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	X100%	18,33 %	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah seluruh koperasi					
			66	X100%				360
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	X100%	0,11%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	X100%				
			30	X100%				27.357



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN			
			Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	$\frac{-921.225.458.647}{31.809.848.990.000} \times 100\%$				



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	X100%	0.424 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	X100%		
			414	97.713		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	X100%	0.68%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	X100%		
			644	97.713		
Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		1 Medali	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Medali Perunggu Kejuaraan Nasional Karate Tahun 2022	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	X100%	64,103 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah OPD			
		25	X100%			
		39				
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan pembangunan daerah	X100%	64,103 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	Jumlah OPD					
25	X100%					
39						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	X100%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	5480%	Jumlah area penilaian	X100%			
274	5					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	X100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Jumlah cagar budaya yang terdata		69,55 %				
233	X100%					
233						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	61,78	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) . UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan . UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{UPLM}{AM} \times 100$ UPLM 1= 45 UPLM 2= 36.887 UPLM 3= 100 UPLM 4= 16.181 UPLM 5= 35 UPLM 6= 3.248 UPLM 7= 4.053	32,46 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p> <p style="text-align: right;">a = 1.107 i = 2.545 s = 98 j = 0</p>	75%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab.yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p> <p style="text-align: right;">m = 0 b = 0 g = 0 a = 0 c = 0 i = 0</p>	90,62 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
25	PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	48.634,4 Ton 32.754 Ton	148.511 Ton	DINAS PERIKANAN	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	14153,333%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			$\frac{2.123}{15} \times 100\%$			
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	623,17%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			$\frac{516.371}{65.507} \times 100\%$			
		Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	40,245%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			$\frac{79.030}{196.370} \times 100\%$			
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		0,38%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		1,73%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	X100%	560,371%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Luas panen			
			237.535,84 42.389	X100%		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun berjalan - jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya	X100%	70,483%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya						
2.001 2.839	X100%					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
28	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	5,742 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{1.951}{33.980} \times 100\%$			
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{47.925,97}} \times 100\%$	212,607 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{22.542}{\text{47.925,97}} \times 100\%$			
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	36,358 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{561}{1.543} \times 100\%$			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
29	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020}}{\text{Jumlah IKM 2021} - \text{Jumlah IKM 2020}} \times 100\%$	1508,696 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			$\frac{347}{23} \times 100\%$				
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	100 %		DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{85}{370} \times 100\%$	22,97%	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0 %		DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Terdapat Permohonan Izin Perluasan Industri
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak Terdapat Kawasan Industri Di Kabupaten Maros
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)		DINAS KOPERASI, UKM				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6			
		terkini	<p>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</p> <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p> <table border="1" data-bbox="639 703 1158 792"><tr><td data-bbox="639 703 1070 741">1) Keterkinian informasi industri = 5%</td><td data-bbox="1070 703 1158 741" rowspan="2">150%</td></tr><tr><td data-bbox="639 741 1070 792">2) Kelengkapan informasi industri = 5%</td></tr></table>	1) Keterkinian informasi industri = 5%	150%	2) Kelengkapan informasi industri = 5%	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1) Keterkinian informasi industri = 5%	150%							
2) Kelengkapan informasi industri = 5%								



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$ $\frac{224.397.654.924}{1.435.670.137.122} \times 100\%$	15,63 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$ $\frac{266.637.121.347,16}{1.517.257.948.614} \times 100\%$	17,57 4%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$ $\frac{946.741.404.662}{1.435.670.137.122} \times 100\%$	65,94 4%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Opini Laporan Keuangan	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	DISCLAIMER WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
2	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021}}{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021}} \times 100\%$	0%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022 $\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan tanpa kompetitif}} \times 100\%$ $\frac{315}{338} \times 100\%$		93,195%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$ $\frac{340.993987.474,97}{363.281.909.226,00} \times 100\%$		93,862%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)-Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$ $\frac{576.309.642.054}{1153050555915} \times 100\%$		49,981%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
3	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/ke bawah}} \times 100\%$ $\frac{1.899}{1.058} \times 100\%$		179,49%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS/Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Total pegawai}} \times 100\%$			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN				
1	2	3	4		5	6				
		kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\frac{512}{2.957} \times 100\%$		17,315%	AN SUMBER DAYA MANUSIA				
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi $\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$		46,68%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
4	MANAJEMEN KEUANGAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$ <table border="1" data-bbox="639 1144 1171 1272"> <tr> <td>Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi =</td> <td>1.435.670.137.122</td> </tr> <tr> <td>Total belanja APBD =</td> <td>1.558.038.658.286</td> </tr> </table>		Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi =	1.435.670.137.122	Total belanja APBD =	1.558.038.658.286	7,854%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi =	1.435.670.137.122									
Total belanja APBD =	1.558.038.658.286									
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$ <table border="1" data-bbox="639 1518 1171 1644"> <tr> <td>Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi =</td> <td>269.177.753.027,13</td> </tr> <tr> <td>Total PAD dalam APBD =</td> <td>300.275.072.614</td> </tr> </table>		Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi =	269.177.753.027,13	Total PAD dalam APBD =	300.275.072.614	10,356%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi =	269.177.753.027,13									
Total PAD dalam APBD =	300.275.072.614									
		Asset Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya Ya Ya Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{50.654.167.776,16}{1.213.365.604.137,7} \times 100\%$		4,175%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				



N O	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	X100%	0%	KOMINFO
			Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	X100%		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	X100%	100%	KOMINFO
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	X100%		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Kabupaten Maros tahun 2022 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Utama Kabupaten Maros tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2021 - 2026. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2022 diuraikan berdasarkan sasaran tiap-tiap misi.

**a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maros 2021 - 2026. Ini berarti, dokumen RKPD Tahun 2022 merupakan tahun pertama penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021 -2026.

Sejumlah sasaran strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Maros dapat dicapai melalui pencapaian target indikator program dan kegiatan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022 melaksanakan **178 (seratus tujuh puluh delapan) program prioritas**. Adapun sasaran dan indikator sasaran serta indikasi program dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 meliputi :

**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Maros**

MISI 1			
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prioritas Pembangunan 1 : Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang professional, bersinergi, dan berkinerja tinggi			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (64) nilai Level
2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (3,25) nilai indeks
MISI 2			
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Prioritas Pembangunan 2 : menciptakan kulaitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan	62,87 nilai Indeks
		Indeks Kesehatan	75,77 Nilai Indeks
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keagamaan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan	B (3,25) Nilai Indeks



3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	89,77 Nilai Indeks
MISI 3			
MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF			
Prioritas Pembangunan 3 : mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Indeks harga konsumen	107,24
2	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	B (3,25) Nilai Indeks
MISI 4			
MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL			
Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB Pembangunan Desa	Persentase pertumbuhan kondisi lapangan usaha daerah	4,29 Persen
		PDRB Perkapita	49,05 Rp/Jiwa
2	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	4,46 Persen
3	Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi	3,18 Persen
4	Menuunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan	9,34
MISI 5			
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH			
Prioritas Pembangunan 5: Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di riap wilayah			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Indeks kualitas layanan infrastruktur	B (3,25) Nilai Indeks
MISI 6			
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prioritas pembangunan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			
1	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Udara	87,60 Nilai Indeks
		Indeks kualitas Air	50,20 Nilai Indeks
		Indeks kualitas Lahan	50,62 Nilai Indeks
Prioritas pembangunan 7: menurunkan resiko bencana			
		Indeks Ancaman Bencana	18,12 Nilai Indeks



2	Menurunnya resiko akibat bencana	Indeks Kerugian	7,00 Nilai Indeks
		Indeks kualitas kapasitas	0,63 Nilai Indeks

b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

➤ **Capaian Kinerja Sasaran**

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilan serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Kabupaten Maros tahun 2022 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Utama Kabupaten Maros tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2021 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Maros. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2022 diuraikan berdasarkan sasaran tiap-tiap misi.

MISI 1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH

Maksud dari Misi meningkatkan perekonomian daerah adalah pembangunan pada aspek ekonomi daerah yang mengarah pada penguatan kemandirian ekonomi daerah sebagai akibat dari kinerja perekonomian daerah yang berkualitas melalui tata kelola pemanfaatan seluruh sumberdaya yang kreatif, inovatif, dan profesional. Untuk mencapai tujuan pada Misi 1, maka telah ditetapkan beberapa sasaran dan indikator untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut. Capaian masing-masing sasaran dari Misi 1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai SAKIP	Poin	B	B	B	100,00	A

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2022

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1



tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran

SAKIP merupakan budaya kerja yang mencerminkan kinerja pemerintahan Kabupaten Maros, Sehingga semua indikator dan strategi harus terencana dan jelas.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaporan kinerja juga memperhatikan hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) yang telah dilakukan sebelumnya. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi atas Implementasi SAKIP dituangkan dalam LKE, yang telah dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian pada Template Kertas Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP untuk masing-masing level organisasi. Isu-isu penting yang perlu diungkap melalui Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil;
2. Indikator kinerja terukur, relevan dan berorientasi hasil;
3. Penjabaran (cascading) kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran;
4. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejangan kinerja;
5. Evaluasi program terhadap pencapaian sasaran strategis;
6. Tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP sebelumnya

Untuk Misi 1, Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah, terkhususnya daerah Kabupaten Maros, dengan nilai yang dicapai ialah predikat B (baik), Kategori B dengan nilai absolut 60-70 memiliki interpretasi Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, untuk predikat B ini bermakna bahwa masih perlu adanya sedikit



perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

SASARAN 2 : Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	B	B	B	100	A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Maros, 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pencapaian IKM Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi IKM Kabupaten Maros tahun 2022 dengan nilai Indeks B.
2. Realisasi tahun 2022 mencapai target yang telah ditentukan yaitu nilai B.
3. Seperti halnya dengan IRB, untuk peningkatan kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Maros telah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat hampir di seluruh sektor pelayanan, utamanya pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial serta ekonomi.

MISI 2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Maksud dari Misi meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah suatu proses birokrasi yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup berbagai sistem yang saling berkaitan, saling mendukung, dan saling menentukan untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, berupa Pelayanan barang publik; Pelayanan jasa publik; dan Pelayanan administrasi publik.

SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Akuntabel, Efisien dan efektif



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Pendidikan	Nilai Indeks	63,26	62,87	63,78	101,45	65,97
2	Indeks Kesehatan	Nilai Indeks	75,44	75,77	75,82	100,07	76,45

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat akan pelayanan publik maka diperlukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat indikator yang di gunakan adalah kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan, dimana dalam tingkat kesehatan di pengaruhi oleh factor fasilitas kesehatan dan tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan Indikator tingkat kesehatan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari angka kematian kasar, angka kematian bayi dan anak-anak, serta rasio/usia harapan hidup. Penduduk yang sejahtera rata-rata memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibanding yang tidak sejahtera. Sedangkan untuk Tingkat pendidikan masyarakat berdampak pada kualitas atau kesejahteraan hidupnya. Penduduk yang berpendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan profesi dengan penghasilan lebih layak, lebih memahami arti kesehatan dan lebih matang dalam kesehatan mental psikologi. Dengan demikian pendidikan merupakan aset hidup manusia dan penting untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Dari perhitungan indeks kesehatan dan indeks pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi Indeks pendidikan tahun 2022 dengan target 62,87 dan realisasi 63,78 sehingga capaiannya mencapai 101,45. Ini menggambarkan bahwasanya apa yang diharapkan untuk pemerintahan pada tahun 2022 telah tercapai.
2. Realisasi indeks kesehatan tahun 2022 dengan target 75,77 dan realisasinya 75,82 dengan pencapaian 100,07 atau melebihi arget yang ditentukan.

**SASARAN 2** : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keagamaan	Nilai Indeks	B	B	A	100,00	A

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah pengukuran tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Realisasi IKM Kabupaten Maros tahun 2021 dengan nilai Indeks B sedangkan untuk tahun 2022 mendapatkan nilai indeks A dengan pencapaian 100 persen.
2. Realisasi tahun 2022 melebihi target yang telah ditentukan yaitu nilai A.
3. Pemerintah Kabupaten Maros telah meningkatkan pelayanan terhadap layanan keagamaan sehingga kita dapat mencapai nilai A . Salah satu kegiatan dalam peningkatan layanan keagamaan Pemerintahan Kabupaten Maros menghonor guru mengaji, imam masjid dan pendeta/pastur dan beberapa kegiatan yang mendukung dalam pelayanan keagamaan ialah Isbat Nikah sebanyak 84 orang, Bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an sebanyak 10 orang/hari dan Bimbingan Jamaah Haji sebanyak 142 orang.

SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	89,2	89,77	89,2	99,37	90,85

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Ketimpangan antara capaian IPM dan IPG yang dilihat dari rasio keduanya. Semakin mendekati angka 100 maka kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki akan semakin kecil.

Pencapaian IPG Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Maros tahun 2022 sebesar 89,20, ini berarti tahun 2021 ke tahun 2022 tidak terjadi kenaikan yaitu nilai 89,20.
2. Realisasi IPG tahun 2022 sebesar 89,20 poin, tidak mencapai target tahun 2022 sebesar 89,77 poin. Namun demikian capaian kinerja IPG tahun 2022 termasuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**, dengan capaian kinerja sebesar 99,37 %.
3. Penurunan IPG Kabupaten Maros menunjukkan masih terdapat ketimpangan pada beberapa sektor, diantaranya sektor ketenagakerjaan dimana Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki masih jauh diatas TPAK Perempuan. Namun disisi lain pada sektor pendidikan, beberapa indikator pendidikan mencatat capaian perempuan telah melampaui laki-laki, misalnya pada Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

MISI 3. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

Maksud dari Misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah pembangunan pada bidang sosial budaya yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia guna menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan kreatif melalui pelayanan yang maksimal, berupa (1) Peningkatan kualitas pembangunan sumberdaya manusia, (2)



Peningkatan kreatifitas dan prestasi masyarakat, (3) Peningkatan ketersediaan pangan berkualitas., (4) Peningkatan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, (5) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, (6) Pemeliharaan stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis, dan (7) Pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

SASARAN 1 : Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Kebutuhan Konsumsi Masyarakat

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Harga Konsumen	Nilai Indeks	107,92	107,24	113,35	94,61	98,91

Indeks harga konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Pencapaian Indeks harga konsumen Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Maros tahun 2022 sebesar 113,35 dengan pencapaian 94,61, ini disebabkan pada tingkat ketersediaan barang dipasar rendah dan harga pasar naik sehingga indeks konsumen naik.

SASARAN 2 : Terpenuhinya Standar pelayanan Minimum Masyarakat Pembangunan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Minimum Masyarakat	Nilai Indeks	B	B	B	100,00	A



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) disusun berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik agar dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, dapat mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dapat mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, serta mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pencapaian IKM Layanan Minimum masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) layanan minimum masyarakat dengan nilai indeks B capaian 100 %, dari nilai survey kepuasan masyarakat (SKM), dari Perangkat Daerah, RSUD dan Puskesmas nilai IKM Maros Tahun 2022 adalah 80.67, dengan perolehan nilai B ini menunjukkan bahwasanya pelayanan publik yang diselenggarakan sudah berjalan baik,

MISI 4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN

Maksud dari Misi 4 meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan dalam hal ini adalah pembangunan pada aspek daya saing daerah yang menitikberatkan pada pemanfaatan ruang/wilayah Kabupaten Maros, utamanya pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan strategis daerah yang didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas dan merata guna mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

SASARAN 1: Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase pertumbuhan Kontribusi lapangan usaha Daerah	Nilai Indeks	5,35	4,29	1,93	44,98	7,79
2	PDRB Perkapita	Juta Rp/jiwa	47,88	49,05	58,31	121,78	57,44

Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Untuk Misi 4, Sasaran pertama yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi). Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan melihat persentase pertambahan nilai PDRB yang dalam hal ini PDRB Atas Harga Konstan dari tahun 2020 ke tahun 2021, rumus yang digunakan sebagai berikut : $Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1) \times 100\%$. Pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 9,13 persen, Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 33,42 persen.
2. Struktur PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Maros tidak mengalami perubahan yang berarti Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar pada total PDRB Kabupaten Maros adalah Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan sebesar 35,56 persen; diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,50 persen; industri



pengolahan sebesar 15,59 persen, konstruksi sebesar 10,47 persen; dan pertambangan dan penggalian sebesar 7,70 persen.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Pencapaian PDRB per kapita Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian PDRB perkapita pada tahun 2022 sebesar 58,31 Juta Rupiah/jiwa, meningkat dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 47,88 Juta/jiwa.
2. Capaian Tahun 2022 melampaui target RPJMD untuk tahun 2022 yaitu sebesar 58,31 Juta Rupiah/jiwa dengan capaian kinerja sebesar 121,78 %. Berdasarkan hal tersebut maka capaian kinerja untuk PDRB Per Kapita termasuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**.
3. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita juga sangat dipengaruhi oleh sektor lapangan usaha pertanian dan transportasi udara.
4. Dalam rangka peningkatan PDRB perkapita beberapa usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, diantaranya melakukan intervensi terhadap sektor-sektor lapangan usaha yang merupakan kewenangan pemerintah, seperti peningkatan produksi pertanian dan perikanan melalui peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian, pembagian bibit ikan serta pelatihan teknologi tepat guna bagi petani dan nelayan. Selain itu adanya pemberian kredit usaha ringan bagi para UMKM pada sektor perdagangan cukup membantu peningkatan sektor lapangan usaha tersebut.

SASARAN 2 : Menurunnya Jumlah Pengangguran

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Persen	6,30	4,46	5,04	88,49	3,52



TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Kabupaten Maros tingkat kemiskinan sebesar 9,43% dan tingkat pengangguran terbuka 5,04 % pada tahun 2022, pada tingkat pengangguran (TPP) Kabupaten Maros dengan target sebesar 4,46 persen dengan realisasi tingkat pengangguran sebesar 5,04 persen berarti pencapaian target tidak terpenuhi, namun ada penurunan TPP dari tahun 2021 TPP sebesar 6,30% sedangkan tahun 2022 5,04 % sehingga terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka walaupun belum mencapai target yang diinginkan sebesar 4,46 persen, namun berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Maros untuk menekan tingkat pengangguran terbuka dengan melaksanakan pelatihan pengembangan SDM untuk perkoperasian dan usaha kecil menengah melalui PK2UMKM, Pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha, pelatihan teknis produksi dan standarisasi produk, pelatihan manajemen mutu dan pengelolaan sentra industry kecil menengah, pelatihan barista, pelatihan komunikasi public, pelatihan di bidang pertanian, workshop dan kegiatan pengembangan kapasitas pada bidang perikanan seperti hasil olahan perikanan, dengan kegiatan-kegiatan wirausaha yang dilakukan diharapkan kedepannya pencapaian target yang diinginkan pada pengurangan TPP dapat dicapai dengan baik.

SASARAN 3 : Terkendalinya Laju Inflasi

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Laju Inflasi	Persen	0,92	3,18	5,99	53,09	3,00

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Angka inflasi disajikan pada tingkat Propinsi dan kota. Untuk wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, inflasi dihitung pada wilayah Kota Makassar, Kota



Pare-pare, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bulukumba. Untuk daerah-daerah atau kabupaten lainnya dapat mengikuti inflasi pada wilayah terdekat yang dihitung inflasinya. Laju inflasi Kabupaten Maros mengikuti laju inflasi Kota Makassar sebagai wilayah terdekat. Pencapaian inflasi Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 tingkat inflasi dari 0,92 naik menjadi 5,99 persen pada tahun 2022
2. Capaian inflasi tahun 2022 sebesar 5,99 persen lebih tinggi dibandingkan dengan target sebesar 3,18, dengan capaian kinerja sebesar 53,09 persen. Dengan demikian capaian kinerja Inflasi pada tahun 2022 cukup stabil.

MISI 5. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Maksud dari Misi meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam adalah dititikberatkan pada pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, serta kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui: (1) Peningkatan pengawasan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mempertahankan keanekaragaman hayati; (2) Pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (3) Mitigasi terhadap kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang aktifitas Ekonomi Masyarakat

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kualitas Layanan Infrastruktur	Nilai Indeks	C	B	B	100,00	A



Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada.

Untuk indeks kepuasan masyarakat (IKM) kualitas layanan infrastruktur dapat dilihat pada gambaran berikut ini :

Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kualitas Layanan Infrastruktur dengan nilai indeks target yang ingin dicapai B dan Realisasi B dengan capaian 100 %.

MISI 6. MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA.

Peningkatan pembangunan infrastruktur dan teknologi informatika dalam dalam hal ini adalah pembangunan pada aspek daya saing daerah yang difokuskan pada teknologi informatika, infrastruktur utama, sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman yang terpadu dan terintegrasi yang memberikan dampak pada akses pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mengelola serta memanfaatkan seluruh sumber daya daerah yang ada secara lebih efisien, efektif, dan produktif.

SASARAN 1 : Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	84,96	87,6	87,77	100,19	88,00
2	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	56,37	50,2	55,45	110,46	50,60
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks	53,55	50,62	53,55	105,79	55,30

Maksud dari Misi meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam adalah dititikberatkan pada pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga



keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, serta kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui: (1) Peningkatan pengawasan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mempertahankan keanekaragaman hayati; (2) Pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (3) Mitigasi terhadap kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memberikan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pencapaian IKLH Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi IKLH dengan indeks kualitas udara sebesar 87,77 meningkat dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 84,97, sedangkan untuk tahun 2022 indeks kualitas air 55,45 dan indeks kualitas tutupan lahan 53,33, dengan Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten maros Tahun 2022 adalah 68,13.
2. Realisasi IKLH tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan perindikator. Dengan demikian capaian kinerja IKLH tahun 2022 dengan rata-rata perhitungan indeks kualitas sebesar 105,48 persen dengan kategori **SANGAT TINGGI**.
3. Dari Pencapaian nilai IKLH kabupaten maros termasuk kategori Baik, namun demikian kualitas lingkungan Kabupaten Maros masih memerlukan perhatian, terlebih untuk Satus mutu air sungai dari perhitungan indeks pencemaran air sungai di kabupaten maros dapat disimpulkan dalam kondisi tercemar ringan, hal ini diakibatkan oleh beban pencemaran yang semakin tinggi dan kawasan konservasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) makin kurang , dari Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai di Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat disimpulkan Air sungai Maros Masuk dalam kategori Sedang dengan nilai IKA 55,45
4. Pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan beberapa program/kegiatan terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup,



diantaranya program penanaman pohon di wilayah hulu, peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH serta penancangan Maros Go Green.

SASARAN 2 : Menurunnya Resiko Akibat Bencana

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Ancaman Bencana	Nilai Indeks	0,00	18,12	18,12	100,00	12,26
2	Indeks Kerugian	Nilai Indeks	0,48	7,00	6,00	85,71	5,60
3	Indeks Kapasitas	Nilai Indeks	0,00	0,63	0,00	0,00	0,77

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Pencapaian IRB Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Indeks ancaman bencana dengan capaian 100 % dengan target dan realisasi 18,12., untuk indeks kerugian dengan capaian 85,71 sedangkan indeks kapasitas dengan capaian 0 Pada Kabupaten Maros telah dilakukan berbagai pencegahan dan penanganan bencana dengan berkoordinasi dengan baik dengan seluruh stakeholder yang ada. Dalam rangka pencegahan bencana, Pemerintah Kabupaten Maros melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan beberapa upaya, seperti penguatan pusat pengendali operasi bencana (PUSDALPOS), penyebaran informasi kepada masyarakat baik melalui media sosial, dan elektronik, terkait lokasi dan titik rawan bencana di Kabupaten Maros. Selain itu penduduk yang terdampak bencana telah mendapatkan bantuan dari pemerintahan Kabupaten Maros.



Sasaran meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan untuk data tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.6
Angka Pengangguran di Kabupaten Maros

No	URAIAN	TAHUN	
		2021	2022
1	Angka Pengangguran	6,30	5,04

Berdasarkan program Bupati dan Wakil Bupati Maros melalui visi misi, angka pengangguran di Kabupaten Maros berhasil ditekan dari tahun sebelumnya. Capaian angka pengangguran pada tahun 2021 adalah 6,30%, menurun berdasarkan capaian pada tahun 2022 yaitu 5,04%.

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Miskin

Uraian	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kemiskinan Maros	9,89	9,74	9,57	9,43
Jumlah Penduduk Miskin	34.850	34.620	34.110	33.900
Garis Kemiskinan Maros	405.944	414.342	424.637	450.275
Indeks Kedalaman (P1) Maros	2,50	1,45	1,61	1,77
Indeks Keparahan (P2) Maros	0,89	0,34	0,41	0,44
Gini Ratio	0,382	0,386	0,365	0,362

Tingkat Kemiskinan Maros berhasil ditekan oleh Pemerintah daerah kabupaten Maros pada tahun 2022 sampai pada tingkat kemiskinan sebesar 9,43 %. Menurun dari angka tahun 2021 yang menyentuh angka 9,57 %. Sedangkan untuk Gini ratio Kabupaten Maros tahun 2021 0,365 % menurun dibandingkan 2022 yaitu 0,362 %.

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,99	13,02	13,04	13,16	13,30
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rp)	10.331	10.981	10.963	11.032	23,54

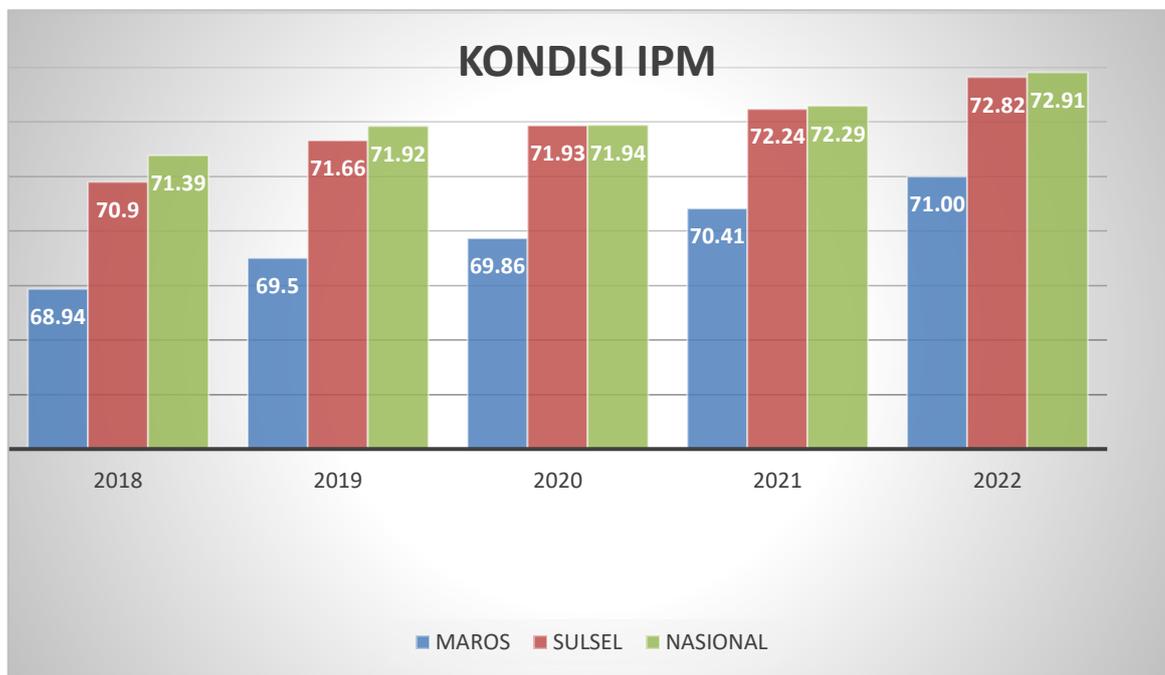


Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,5	7,46	13,16	8,01	80,02
Umur Harapan Hidup (tahun)	68,74	68,98	69,02	69,04	69,28
IPM	68,94	69,8	69,86	70,41	71,00

Pertumbuhan IPM Kabupaten Maros Untuk tahun 2022 mencapai 71,00%. Dalam perhitungan IPM, komponen indikator IPM yaitu Angka harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada Grafik 2.3 berikut ini:

Grafik 2.13
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Berdasarkan grafik tersebut diatas, terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros sejak tahun 2018-2022 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Maros sebesar 68,94 kemudian meningkat



hingga mencapai 71,00 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

Salah satu program dalam mendukung terwujudnya IPM dengan mengoptimalkan kesehatan masyarakat, salah satu kegiatan penunjang yaitu dengan program GERMAS (Gerakan masyarakat Hidup Sehat) salah satu implemenatsi atas program ini dilaksanakan senam kebugaran , pemeriksaan kesehatan dan mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat seperti makan buah dan sayuran, membersihkan lingkungan dan rutin berolahraga, Selain GERMAS untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan derajat kesehatan beberapa puskesmas melakukan inovasi dalam pelayanan dimasyarakat antara lain puskesmas LAU membuat sebuah kegiatan inovasi MTKS GAMMARA PKM LAU, yang mengedukasi anak secara dini untuk mau berperilaku hidup sehat melalui manajemen secara terpadu dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Selain itu dilaksanakan Car Free Day setiap hari minggu pagi yang mana kegiatan ini mengajak masyarakat untuk berolahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pemerintah Kabupaten Maros juga bergerak aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan memberikan edukasi dan mengajak masyarakat dalam membersihkan lingkungan, memanfaatkan sisa sampah untuk menjadi barang yang berguna, pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan pupuk kompos dan membuat barang-barang bekas menjadi suatu barang atau daur ulang sampah yang bernilai jual. Dan sebagai wujud kepedulian pemerintah atas kesehatan masyarakat dibentuk tim pembina kabupaten sehat, forum kabupaten sehat serta forkom kecamatan sehat Kabupaten Maros.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan dukungan seluruh sektor pemerintahan yang terkait, dalam menggerakkan, memfasilitasi serta membantu masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri.



Selain kesehatan dalam rangka mngurangi buta aksara di Kabupaten Maros melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di lakukan pelatihan dan pembelajaran untuk masyarakat yang buta aksara.

Dalam Hal pendidikan, untuk menunjang proses belajar mengajar setiap tahun dikuncurkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik itu dalam hal rehabilitasi, revitalisasi serta pembangunan ruang kelas baru dan pemenuhan meubeler sekolah pada jenjang pendidikan Paud/TK, SD, SMP maupun SKB.

Dalam upaya meningkatkan minat baca Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros melaksanakan Road Show Gerakan Membaca dan Kabupaten Maros terpilih dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (RI) sebagai satu dari 65 kabupaten dan kota se Indonesia sebagai penerima manfaat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, sebagai inovasi untuk menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat belajar dan berkegiatan yang berkelanjutan, pada 6 (enam) desa yaitu desa Pajukukang, Desa Labuaja, Desa Bori Kamase, Desa Bonto Tallasa , Desa Allatenggae dan Desa Baruga. Transformasi perpustakaan di desa dimulai dengan upaya merubah paradigma yang melekat di benak masyarakat selama ini bahwa perpusatakaan sekadar layanan peminjaman dan pengembalian kolaksi buku, tapi kini perpustakaan telah bertransformasi menjadi pusat informasi serta tempat belajar dan bekegiatan.

Selain itu dalam hal mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan didirikan taman baca. Salah satu taman baca yang didirikan SDN Inpres 105 Alatengae Maros dengan konsep Taman Baca Apung, selain itu didusun salometti, desa toddolimae kec. Tompobulu didirikan taman baca pustaka alam, TBM Binaan PKBM Delia Cenrana Desa Limapoccoe Kec. Cenrana didesain unik perpaduan tempat membaca dan cafe. Pembanguna Taman Baca merupakan wujud kecintaan masyarakat Maros untuk mewujudkan masyarakat Maros gemar membaca dengan konsep yang berbeda di beberapa tempat sehingga mengundang minat baca terlebih dikalangan anak-anak dan remaja.

Permasalahan :

1. Kapasitas SDM Tenaga guru masih perlu ditingkatkan dan distribusi penempatan guru yang belum merata



2. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai
3. Masih Rendahnya Angka melanjutkan sekolah pendidikan dasar ke pendidikan selanjutnya
4. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
5. Masih ada tenaga pendidik belum bersertifikasi
6. Masih Putus sekolah
7. Belum maksimalnya pelaksanaan program pencegahan tumbuh kerdil atau stunting
8. Masih terdapat angka kematian bayi baru lahir dan Masih terdapat angka kematian ibu pasca melahirkan

Solusi :

1. pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal
2. Perlu adanya regulasi dan penataan penempatan guru serta peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Penyedia sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan informasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Meningkatkan dan mendorong Masyarakat putus sekolah untuk mau melanjutkan pendidikannya melalui program pendidikan kesetaraan
5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidikan
6. Optimalisasi pelayanan kesehatan
7. Pemetaan wilayah setempat dan pendampingan tenaga kesehatan (bidan) tentang K1 Akses
8. Pemberian makanan tambahan dan gizi tambahan terhadap ibu hamil serta balita.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
2. Peningkatan mutu dan professional pendidik serta tenaga kependidikan
3. Pendidikan Non Formal
4. Pengelolaan dan Distribusi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.



5. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
6. Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Peningkatan Efisiensi Dan Pengamanan Perdagangan Serta Perlindungan Konsumen

Dari indikator diatas dapat dilihat ringkasan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Target Sasaran dan Realisasi
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (64) nilai Level	B (100)	100	ST
	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (3,25) nilai indeks	B	100	ST
2	Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan	62,87 nilai Indeks	63,78	101,45	ST
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keagamaan	Indeks Kesehatan	75,77 Nilai Indeks	75,82	100,07	ST
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan	B (3,25) Nilai Indeks	A	100	ST
3	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Indeks harga konsumen	107,24	113,35	94,61	ST
	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	B (3,25) Nilai Indeks	B	100	ST



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
4	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB Pembangunan Desa	Persentase pertumbuhan kondisi lapangan usaha daerah	4,29 Persen	1,93	44,98	SR
		PDRB Perkapita	49,05 Rp/Jiwa	58,31	121,78	ST
	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	4,46 Persen	5,04	88,49	T
	Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi	3,18 Persen	5,99	53,09	R
	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan	9,34			
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Indeks kualitas layanan infrastruktur	B (3,25) Nilai Indeks	B	100	ST
6	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Udara	87,60 Nilai Indeks	87,77	100,19	ST
		Indeks kualitas Air	50,20 Nilai Indeks	55,45	110,46	ST
		Indeks kualitas Lahan	50,62 Nilai Indeks	53,55	105,79	ST
7	Menurunnya resiko akibat bencana	Indeks Ancaman Bencana	18,12 Nilai Indeks	18,12	100	ST
		Indeks Kerugian	7,00 Nilai Indeks	6,00	85,71	ST
		Indeks kualitas kapasitas	0,63 Nilai Indeks	0,00	0	SR

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 19 Indikator Kinerja Utama Bupati Maros Tahun 2022, disimpulkan bahwa 14 (Empat Belas) indikator dalam kategori Sangat Tinggi , sedangkan 1 (Satu) indikator sasaran mencapai nilai yang Tinggi, 1 (satu) indikator



dalam kategori Rendah, dan 2 (Dua) indikator dalam kategori sangat Rendah.

IKU yang masuk kriteria Sangat tinggi dari target yang ditetapkan yaitu Indeks PDRB dengan nilai 121,78%, Indeks Kualitas Air (IKA) 110,46%, Indeks Kualitas Lahan (IKL) 105,79 persen, Indeks Pendidikan 101,45 persen, indeks Kualitas Udara (IKU) 100,19 persen, indeks Kesehatan 100,07 persen, Nilai SAKIP 100 Persen, Indeks Kepuasan Masyarakat 100 persen, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan 100 persen, Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar 100 persen, Indeks kualitas layanan infrastruktur 100 persen, Indeks Ancaman Bencana 100 persen, Indeks harga konsumen 94,61 persen, Tingkat pengangguran terbuka 88,49 persen, dan Indeks Kerugian sebesar 85,71 persen.

Dengan demikian masih terdapat indikator sasaran yang pencapaiannya belum maksimal seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian sehingga pada tahun berikutnya nilai yang diharapkan dapat tercapai.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Maros selalu berupaya untuk dioptimalkan.

Oleh karenanya, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Beberapa pelayanan dan kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Maros mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai wujud nyata dalam pembangunan menuju Maros lebih Sejahtera diantara penghargaan yang diraih Kabupaten Maros adalah akuntabilitas kinerja yang mendapatkan penilaian baik, Tahun 2022 Kabupaten Maros juga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Kabupaten Maros juga mendapatkan Penghargaan tertinggi Nugra jasa Dharma Pustaloka kategori Pejabat Publik, atas dedikasi dan peran aktif terhadap pengembangan perpustakaan, Anugerah Meritokrasi, Penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat BAIK, Penghargaan Piala ADIPURA Kategori Kota Kecil Tahun 2022



oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 ataupun Tahun Terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun - tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2021 dan tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	B
	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B
2	Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan	63,26	63,78
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keagamaan	Indeks Kesehatan	75,44	75,82
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan	B	A
3	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan	Indeks harga konsumen	107,92	113,35
	Terpenuhinya standar pelayanan minimum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	B	B
4	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB Pembangunan Desa	Persentase pertumbuhan kondisi lapangan usaha daerah	5,35	1,93
		PDRB Perkapita	47,88	58,31
	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	6,30	5,04
	Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi	0,92	5,99



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan		
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Indeks kualitas layanan infrastruktur	C	B
6	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Udara	84,96	87,77
		Indeks kualitas Air	56,37	55,45
		Indeks kualitas Lahan	53,55	53,55
7	Menurunnya resiko akibat bencana	Indeks Ancaman Bencana	0,00	18,12
		Indeks Kerugian	0,48	6,00
		Indeks kualitas kapasitas	0,00	0,00



d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Periode terakhir dokumen RPJMD Kabupaten Maros, Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka menengah Daerah. Perbandingan antara Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dibandingkan dengan target RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR RPJMD
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	A
	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A
2	Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan	63,78	65,97
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keagamaan	Indeks Kesehatan	75,82	76,45
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan	A	A
3	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan	Indeks harga konsumen	113,35	98,91
	Terpenuhinya standar pelayanan minimum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	B	A
4	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB Pembangunan Desa	Persentase pertumbuhan kondisi lapangan usaha daerah	1,93	7,79
		PDRB Perkapita	58,31	57,44
	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,04	3,52
	Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi	5,99	3,00



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR RPJMD
	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan		
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Indeks kualitas layanan infrastruktur	B	A
6	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Udara	87,77	88,00
		Indeks kualitas Air	55,45	50,60
		Indeks kualitas Lahan	53,55	55,30
7	Menurunnya resiko akibat bencana	Indeks Ancaman Bencana	18,12	12,26
		Indeks Kerugian	6,00	5,60
		Indeks kualitas kapasitas	0,00	0,77

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

1. Struktur Organisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah dilakukan penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga pada tahun 2016 telah ditetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros dan Peraturan Bupati Maros tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Maros.

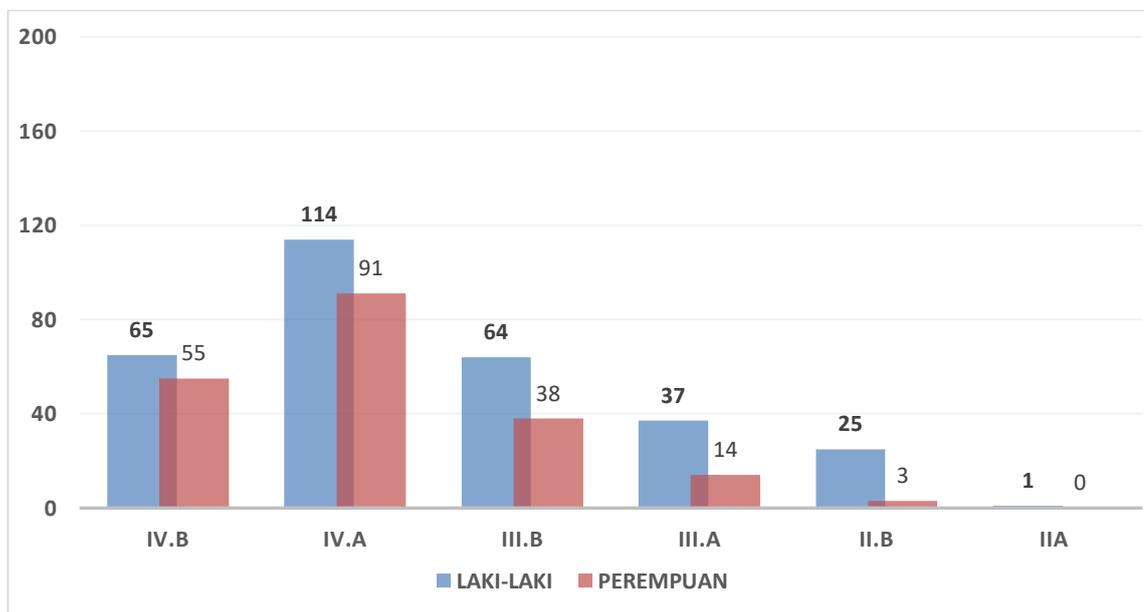
Fungsi aparatur negara/pemerintah dalam menjalankan pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan negara dalam melayani warga negaranya melalui aparatur pemerintah. Pelayanan merupakan salah satu produk organisasi berupa jasa, sehingga pada dasarnya pelayanan tidak kasat mata, diraba, dan dimiliki, melainkan hanya sebatas digunakan, dirasakan, dibeli, atau



disewa. Sekalipun demikian, dalam kehidupan organisasi, fungsi pelayanan memiliki nilai strategis dibandingkan dengan fungsi organisasi lainnya. Ini karena fungsi pelayanan sangat berpotensi dalam menentukan kelanggengan, perkembangan dan keunggulan bersaing organisasi di masa yang akan datang. Jumlah ASN Negeri Sipil dan PPPK berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.614 orang.

Jumlah ASN berdasarkan eselon Kabupaten Maros sebanyak 507 orang yang terdiri dari 1 Orang yang menduduki eselon II-A, 28 orang yang menduduki jabatan pada eselon II-B, 51 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-A, 102 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-B, 205 orang yang menduduki jabatan pada eselon IV-A serta 120 orang ASN yang menduduki jabatan pada eselon IV-B.

Grafik 1.7
Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2022



Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2022

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros memiliki 26 (Dua Puluh Enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah, 14 (empat belas)



Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan serta 80 (delapan puluh) Desa.

Berdasarkan uraian jabatan dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diurai sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Dinas Terdiri Dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A yang merupakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan dan Pertanahan;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman pertanahan dan lingkungan hidup;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan bidang sosial;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan



- pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kpendudukan dan pencatatan sipil;
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - 11) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, UKM dan perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - 12) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (PTSPK) merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata, Pemuda dan olah raga;
 - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - 15) Dinas Perikanan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - 16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
5. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan



pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pembangunan;

- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- 3) Badan Pendapatan daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana ;
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerinatahn bidang kesatuan bangsa dan politik;

6. Balai Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri dari :

- 1) RSUD Salewangang merupakan RSUD Tipe C

Disamping Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta Lembaga Penunjang Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros, terdapat pula 3 (tiga) kelompok jabatan Staf Ahli Bupati yakni :

- a. Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam;

Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Marusu dengan tipe A
2. Kecamatan Moncongloe dengan tipe A
3. Kecamatan Mandai dengan tipe A
4. Kecamatan Tanralili dengan tipe A
5. Kecamatan Tompobulu dengan tipe A
6. Kecamatan Turikale dengan tipe A
7. Kecamatan Maros Baru dengan tipe A

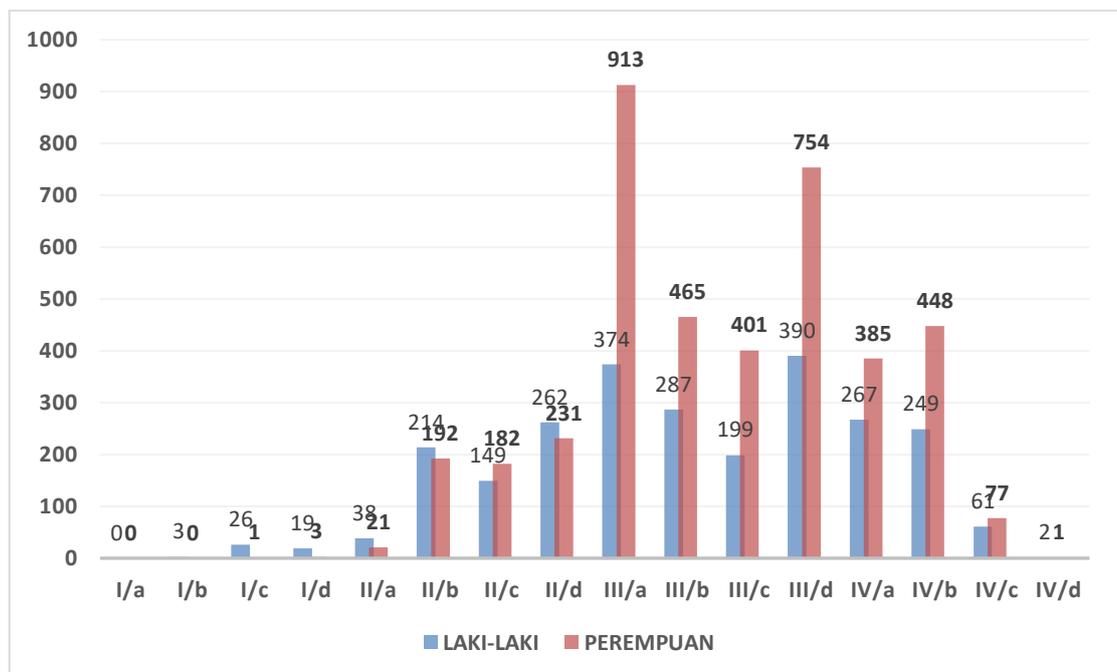


- 8. Kecamatan Lau dengan tipe A
- 9. Kecamatan Bontoa dengan tipe A
- 10. Kecamatan Bantimurung dengan tipe A
- 11. Kecamatan Simbang dengan tipe A
- 12. Kecamatan Cenrana dengan tipe A
- 13. Kecamatan Camba dengan tipe A
- 14. Kecamatan Mallawa dengan tipe A

2. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah ASN Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.614 orang. Jumlah ASN berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin Kabupaten Maros paling besar terdapat pada golongan III/A dengan jumlah ASN sebanyak 1.287 orang, kemudian diikuti oleh golongan III/D dimana pada golongan tersebut terdapat 1.144 orang pegawai, kemudian golongan III/B dengan jumlah ASN sebanyak 752 orang. Secara lengkap jumlah ASN berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2022



Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2022

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja



Secara umum Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Maros, namun demikian program/kegiatan tersebut akan selalu dilakukan Review apakah dalam tahun pelaksanaan terdapat program/kegiatan yang harus segera dilaksanakan atau dihentikan yang dinilai berdasarkan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Maros.

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 1		
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	Tujuan : Menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang professional, Bersinergi dan Berkinerja Tinggi	
1		Seluruh Perangkat Daerah
	Sasaran : Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas	
1		Sekretariat Daerah
2		Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan
3		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Perikanan
6		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
7		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8		Seluruh Kecamatan
9		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
10		Bappelitbangda
11		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12		Dispenda
9		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
Misi 2		
	SASARAN: Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	
	Tujuan : Menciptakan Kualitas SDM yang Mengedepankan Nilai-Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal	
1		Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra)
2		Inspektorat Kabupaten
3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
5		Dinas Komunikasi Dan Informatika
6		Seluruh SKPD/OPD
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai Budaya Lokal	
1		Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra)
2		Inspektorat Kabupaten
3		Badan Keuangan Daerah
4		Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan
5		Bappelitbangda
6		Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
7		Dinas Komunikasi Dan Informatika
8		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
9		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11		Dinas Kesehatan
12		Dinas Administrasi Penduduk Dan Catatan Sipil
13		RSUD La Palalloi
14		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
15		Seluruh Kecamatan
16		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Gender dan Kepemudaan dalam Pembangunan		
1		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		Balitbangda
3		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
4		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
5		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6		Dinas Kesehatan
7		RSUD Salewangang
8		Dinas Sosial
9		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
10		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 3		
Sasaran : Terpenuhinya Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumber Daya Ekonomi Daerah		
Tujuan : Mengoptimalkan Penyelenggaraan urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5		Dinas Kesehatan
6		Dinas Sosial
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
8		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
11		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12		Dan Keluarga Berencana
13		Dinas Pemuda Dan Olahraga
14		Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan
15		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
16		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
17		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI : 4		
SASARAN: Meningkatnya Investasi serta Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha bagi Masyarakat		
Tujuan : Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumber Daya Ekonomi Daerah		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3		Balitbangda
4		Badan Keuangan Daerah
5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
8		Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan
9		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
10		Dinas Perikanan
11		Dinas Kesehatan
12		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
13		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
14		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
15		Dinas Komunikasi Dan Informatika
16		Dinas Pemuda Dan Olahraga
17		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan
19		Seluruh Kecamatan
MISI 5		
Sasaran : Meningkatnya Taraf Hidup Pelaku Ekonomi Kecil dan Menengah serta Masyarakat Kurang Mampu		
Tujuan : Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Ekonomi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan
6		Dinas Perikanan
7		Dinas Sosial
8		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9		Bappeda
10		Balitbangda
11		Seluruh Kecamatan
Sasaran: Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Perkotaan		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
6		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7		Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan
8		Dinas Perikanan
		Dinas Sosial



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Bapelitbangda
MISI 6		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup		
Tujuan : Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
3		Badan Keuangan Daerah;
4		Bappeda;
5		Balitbangda;
6		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan;
7		Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
8		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar;
9		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
10		Seluruh Kecamatan
Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		BPBD;
		Dinas Sosial
		RSUD La Palaloi
3		Bappelitbangda;
4		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan;
5		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar;
6		Seluruh Kecamatan



Program Penunjang Pencapaian Sasaran Kabupaten Tahun 2022

Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan kewenangan masing-masing. Dalam Pelaksanaan urusan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan tersebut berdasarkan urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Tabel Permasalahan dan Solusi
Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PENDIDIKAN	1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan belum tercapai;	1 Penganggaran untuk mendukung fungsi pendidikan perlu ditingkatkan dalam rangka mengentaskan dan meningkatkan angka melek huruf serta untuk mendukung dan memberikan jaminan kepada anak-anak usia sekolah di Kabupaten Maros dapat bersekolah sampai pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi
		2 Angka kelulusan belum mencapai 100 % dari semua tingkatan;	2 Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal
		3 Kapasitas SDM tenaga guru masih perlu ditingkatkan;	3 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
		4 Distribusi penempatan tenaga guru belum merata.	4 Perlu adanya regulasi dan penataan penempatan guru se Kabupaten Maros
		5 Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai (Sekolah Dasar)	5 Penyediaan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerataan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal diseluruh wilayah Kabupaten Maros.
		6 Tugas guru sebagai ASN yang wajib bekerja selama 37,5 jam per pekan belum terpenuhi	6 Perlunya adanya regulasi dan penempatan jam-jam belajar untuk memaksimalkan waktu mengajar
2	KESEHATAN	1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan belum tercapai	1 Penganggaran untuk mendukung program yang berkaitan dengan SPM dan Melakukan perhitungan SPM Kesehatan
		2 Masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat;	2 Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan Penciptaan budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
		3 Perbaikan gizi balita belum maksimal	3 Peningkatan cakupan pelayanan gizi bagi ibu dan anak



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum terakreditasi dan Puskesmas yang sudah terakreditasi perlu dilakukan Reakreditasi untuk mencapai penilaian yang semakin baik dari status Dasar, Madya, Utama dan Paripurna	4 Mengusulkan dan Menganggarkan akreditasi Puskesmas
		5 Sarana dan prasarana puskesmas harus memenuhi standar SPM	5 Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan.
		6 Masih terdapat angka kematian bayi baru lahir	6 Pemetaan wilayah setempat dan pendampingan tenaga kesehatan (bidan) tentang K1
		7 Masih terdapat angka kematian ibu pasca melahirkan	7 Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran Stimulasi makanan tambahan pada Ibu Hamil
		8 Belum maksimalnya pelaksanaan program pencegahan tumbuh kerdil	8 Optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk
		9 Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.	9 Penambahan dan distribusi SDM kesehatan sesuai dengan Abk dan ANJAB.
3	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	<p>1 Tingkat kerusakan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi masih Tinggi</p> <p>2 Sarana dan prasarana termasuk bangunan belum memperhatikan hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentang</p> <p>3 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib</p> <p>4 Banyaknya area hutan produksi yang beralih fungsi menjadi permukiman yang dikelola oleh masyarakat;</p> <p>5 Banyaknya pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai yang tidak sesuai</p> <p>6 Ketersedian sumber air bersih pada kawasan pesisir masih sangat kurang;</p> <p>7 Masih tingginya RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak;</p> <p>8 Produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>9 Banyaknya sarana prasarana air bersih yang sudah terbangun tetapi dalam kondisi yang rusak;</p>	<p>1 Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dan pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana</p> <p>Perlunya sosialisasi Produk tata ruang sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum</p> <p>Perlunya sosialisasi tentang pemahaman pemeliharaan sarana dan prasana infrastruktur</p> <p>Untuk menerbitkan Perbup tentang alih fungsi lahan dan pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1 Pengelolaan perumahan yang layak huni belum maksimal, khususnya dikawasan pesisir; 2 Sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai; 3 Jumlah RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak masih tinggi; 4 Penanganan terhadap kejadian bencana belum sepenuhnya berjalan optimal.	1 Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dalam bidang perumahan sebagai wujud mencapai target 100 % rumah yang pengguna air bersih, 0 % kawasan kumuh, dan 100 % rumah tangga bersanitasi Peningkatan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan.
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 Ketentraman masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi; 2 Belum optimalnya penerapan perda;	1 Mengoptimalkan program kegiatan mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal sosial masyarakat kota yang berbasis TIK 2 Mensosialisasikan penerapan PERDA Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu
6	SOSIAL	1 Angka kemiskinan masih tinggi; 2 Tingkat pengangguran terbuka masih terbilang cukup tinggi;	1 Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha Peningkatan pelaksanaan dan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan baik prespektif gender Peningkatan akses dan penerimaan manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan kerja Peningkatan Peluang Kerja dan Berusaha bagi penduduk kurang mampu Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu 2 Penumbuhan wirausaha muda Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budaya masyarakat bekerja Peningkatkan pelatihan berbasis kompetensi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI		
		3	Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih tinggi;	3	Perlu ada program/kegiatan yang difokuskan kepada pembinaan dan pengembangan kompetensi seperti pelatihan kerja. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi keluarga kurang mampu Peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu
		4	Bencana banjir masih sering melanda pada wilayah-wilayah tertentu;	4	Perlunya sosialisasi tentang menjaga lingkungan.
7	TENAGA KERJA	1	Angka pengangguran masih relatif tinggi.	1	Menekan angka pengangguran dengan menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Dan Meningkatkan investasi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta
		2	Sumberdaya manusia tenaga kerja masih rendah dan belum berdaya saing.	2	Melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan produktifitas tenaga kerja. Dan Meningkatkan program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk kegiatan kewirausahaan
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Masih adanya kejadian kasus kekerasan dalam rumah	1	Penguatan lembaga perlindungan anak.
		2	Anak jalanan, anak terlantar, anak korban narkoba dan anak putus sekolah masih ada.	2	Sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda tentang Narkoba Membuat Pelatihan/keterampilan anak putus sekolah.
9	PANGAN	1	Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal	1	Melakukan sosialisasi Diversifikasi produk pangan lokal
		2	Menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan local	2	Mengembangkan diversifikasi produk pangan olahan
10	PERTANAHAN	1	Penetapan batas wilayah kecamatan belum akurat;	1	Melakukan pengukuran batas wilayah Menetapkan batas wilayah kecamatan lewat PERBUP
11	LINGKUNGAN HIDUP	1	Meningkatnya dampak emisi gas rumah kaca;	1	Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati
		2	Menurunnya ketersediaan dan kualitas sumber air baku;		
		3	Meningkatnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan;	2	Pengawasan bagi industry/usaha di Kabupaten Maros. Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan/ berkelanjutan;	3 Sosialisasi menyeluruh terhadap budaya hidup bersih dimasyarakat lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta sekolah, ormas/lembaga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R secara berkala
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Masih adanya masyarakat yang belum memahami pentingnya kepemilikan KTP	1 Menyusun data kependudukan dengan melibatkan pemerintah ditingkat bawah (kelurahan dan desa).
		2 Layanan administrasi kependudukan masih belum berjalan secara efisien dan efektif;	2 System penataan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan dan desa agar setiap hari lebih up date.
		3 Ketersediaan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan belum maksimal	3 Penambahan sarana dan prasarana kependudukan
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan Dana Desa.	1 Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terhadap pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan perencanaan Melaksanakan Evaluasi dan pemantapan penggunaan aplikasi keuangan Desa Pembinaan terhadap peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
		2 Perlunya dilakukan evaluasi atas pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan.	2 Monitoring dan Evaluasi pengeluaran ADD.
		3 Belum optimalnya perhatian dan pembinaan terhadap masyarakat desa khususnya masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan.	3 Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa Melakukan pembinaan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin Membentuk Labsite Desa Peningkatan alokasi dana desa dalam APBD sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku Melakukan pelatihan Keterampilan dan membentuk Pos pelayanan Teknologi tepat guna Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB;	1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
		2 Laju pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi;	2 Program pemberdayaan keluarga sejatera lebih ditingkatkan. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitar untuk pengendalian terhadap dampak negatif dari pertumbuhan penduduk Pengendalian angka Total Fertility Rate (TFR)
		3 Masih rendahnya tingkat kapasitas tenaga penyuluh KB;	3 Pelatihan kompetensi untuk tenaga penyuluh dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Masih kurangnya sarana prasarana layanan KB.	Menambah jumlah sarana dan prasarana UPTD KB.
15	PERHUBUNGAN	1 Layanan transportasi angkutan umum belum memberikan jaminan 2 Terminal angkutan umum belum berfungsi dengan baik. 3 Masih rendahnya kedisiplinan masyarakat sebagai pengguna jalan 4 Masih rendahnya ketersediaan rambu- rambu lalu lintas	1 Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah Pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum (KIR) sesuai ketentuan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Implementasi e-government dan pelayanan telekomunikasi belum optimal. 2 Infrastruktur sarana dan prasarana data centre harus senantiasa terpelihara. 3 Sarana dan prasarana TIK belum tersedia 4 Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi belum tersed 5 Belum tersedianya jaringan sistem kebencanaan yang terintegrasi	1 Peningkatan prasarana dan sarana jaringan IT pada instansi, tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan sekolah-sekolah didukung kompetensi sumber daya manusia di bidang teknis IT 2 Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) Program pemeliharaan infrastruktur lebih ditingkatkan Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik secara integratif, aman, mudah, murah, dan
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1 Belum tersedianya data pelaku UMKM yang akurat; 2 Tingkat kapasitas SDM pelaku UMKM masih rendah 3 Masih tingginya koperasi yang tidak aktif	1 Melakukan pencatatan data pelaku UMKM yang sudah terlegalitas (memiliki izin) 2 Menyelenggarakan program pelatihan kompetensi SDM Pelaku Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas SDM Usaha mikro dalam usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna 3 Memfasilitasi kemitraan koperasi dengan perusahaan swasta dan Perbankan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berkoperasi Peningkatan Pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi Peningkatan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha
18	PENANAMAN MODAL	1 Pelayanan investasi masih belum optimal 2 Pelayanan perizinan berinvestasi belum efektif	1 Meningkatkan informasi penanaman modal yang berbasis Informasi Teknologi dalam mendukung iklim investasi di daerah. Melakukan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan Melakukan Pelayanan Perizinan keliling di 14 Kecamatan
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 Masih terbatas sarana dan prasarana olah raga;	1 Meningkatkan anggaran pembangunan sarana olahraga.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2 Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan masih relatif rendah;	2 Menggalakkan olahraga di masyarakat dengan penyelenggaraan perlombaan olahraga.
		3 Pembinaan terhadap peningkatan prestasi olahraga masih kurang	3 Meningkatkan pembinaan cabang olahraga dengan memberikan insentif bagi cabang olahraga dan atlet.
20	STATISTIK	1 Profil daerah yang berkualitas harus senantiasa tersedia	1 Menyediakan profil daerah yang mudah diakses (pada website daerah)
		2 Ketersediaan Kabupaten dalam angka dan PDRB harus tepat waktu	2 Merekrut tenaga dalam pengambilan data untuk penyusunan data Kabupaten Data Membuat jejaring ke instansi untuk mengirimkan data yang dibutuhkan
21	PERSANDIAN	1 Jaringan komunikasi persandian belum tersedia	1 Membuat Jaringan komunikasi persandian
		2 Belum terdatanya aplikasi OPD secara menyeluruh	2 Mendata aplikasi OPD secara menyeluruh
22	PERPUSTAKAAN	1 Masih rendahnya minat baca masyarakat.	1 Melakukan sosialisasi Pemasyarakatan literasi Kepada masyarakat dan sekolah tentang Penting Membaca Road Show Gerakan gemar membaca Bagi pelajar
		2 Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan masih terbatas	2 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan
		3 Regulasi tentang Perpustakaan belum berjalan secara maksimal	3 Mengusulkan Regulasi keperputakaan Membuat peraturan Bupati tentang Perpustakaan
23	KEARSIPAN	1 Belum memadainya SDM tentang kearsipan;	1 Perlu penambahan petugas arsip daerah dan peningkatan kompetensinya dalam mengelola arsip.
		2 Sarana prasarana kearsipan masih terbatas	2 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kearsipan
		3 Regulasi tentang kearsipan belum berjalan secara maksimal	3 Mengusulkan Regulasi kearsipan Membuat peraturan Bupati tentang Kearsipan
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Masih tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove.	1 Sosialisasi sangat dibutuhkan kepada masyarakat dan perlu ditingkatkan intensitasnya agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami penting Hutan mangrove
		2 Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok- kelompok petani pembudidaya dan nelayan.	2 Pembinaan Kelompok petani Pembudidaya dan nelayan Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan.
		3 Masih rendahnya pendapatan petani.	3 Bantuan dana dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan Bantuan Pemasaran untuk hasil olah ikan. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Sarana prasarana jalan produksi masih belum optimal	4 Menyediakan sarana dan prasarana jalan produksi
25	KEBUDAYAAN	1 Nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat harus senantiasa dijaga dan dilestraiikan. 2 Ketersediaan dan SDM pelaku budaya masih sangat terbatas	1 Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman kontingen atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan kreatifitas serta promosi seni budaya ke luar daerah.
26	PARIWISATA	1 Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata 2 Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tempat-tempat wisata belum maksimal 3 Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata belum optimal	1 Perlu adanya dukungan penambahan event/kegiatan pariwisata 2 Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat baik itu pelatihan/kursus bahasa, pembuatan produk dan kursus pendukung lainnya 3 Lebih meningkatkan promosi wisata baik ditingkat nasional maupun manca negara.
27	PERTANIAN	1 Berkurangnya lahan / areal persawahan akibat alih fungsi lahan 2 Kontribusi sektor pertanian terhadap 3 Wabah antraks masih sering terjadi; 4 Produksi dan produktivitas perkebunan masih rendah	1 Perlu dibuat regulasi Peraturan daerah tentang penguatan lahan pertanian dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan akibat perkembangan kota maros. dan Cetak sawah baru 2 Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan produksi padi dengan melakukan penerapan Sosialisasi pencegahan wabah antraks 4 Pemenuhan sarana prasarana infrastuktur pertanian Pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan bagi kelompok tani
28	PERDAGANGAN	1 Adanya perdagangan bebas yang menjadi tantangan bagi daerah; 2 Sarana prasarana pasar tradisional belum memadai; 3 Sarana prasarana pasar harus selalu terpelihara dan dalam kondisi yang Baik	1 Sosialisasi kepada pelaku usaha perdagangan tentang perdagangan bebas dan Bimbingan teknis tentang Daya Saing Pemanfaatan Inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam peningkatan produksi dan pemasaran produk usaha 2 Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional 3 Memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pemeliharaan sarana dan prasarana kepada pedagang pasar serta anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ditingkatkan
29	PERINDUSTRIAN	1 Terbatasnya lahan bagi industri berskala menengah dan besar;	1 Membuat regulasi Pengembangan Sentra Industri sebagai cikal bakal kawasan industri Maros yang terintegrasi dengan sumber bahan baku lokal dan pemasaran produksi hasil industri



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2 Industri- industri potensial harus senantiasa dikembangkan	2 Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Produktivitas Pelaku sektor industri kreatif. Pengembangan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
		3 Belum terpromosinya industri-industri kecil;	3 Melakukan promosi hasil produksi masyarakat pelaku IKM (Industri kecil menengah) Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan. Membangun Show Room Untuk Hasil Olahan Masyarakat Pelaku IKM
30	TRANSMIGRASI	1 Animo masyarakat untuk bertransmigrasi lokal relatif rendah dan ketidakpastian transmigrasi;	1 Menyelenggarakan Bimbingan dan fasilitasi serta sosialisasi ketransmigrasian
		2 Semakin rendahnya transmigrasi umum dan transmigrasi swakarya Mandiri	2
32	KEPEGAWAIAN	1 Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah;	1 Peninjauan kembali terhadap kesesuaian lembaga/struktur OPD dengan tugas pokok dan fungsinya. Uji Kompetensi Jabatan struktural dan Fungsional Administrasi Mutasi ASN Peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan, pelatihan, uji kompetensi, pemberian reward, dan penerapan punishment.
		2 Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja;	2 Penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin dan kode etik ASN Penegakan Disiplin Aparatur
		3 Jumlah ASN yang lebih besar daripada beban kerja yang terdapat pada setiap unit kerja utamanya yang berposisi sebagai tenaga administrator dan pengarsipan, sedangkan disisi lain ASN yang berposisi pada jabatan fungsional terutama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu belum mencukupi untuk memenuhi beban kerja yang ada.	3 Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja Perekrutan/penerimaan CPNS dan P3K untuk jabatan fungsional Peningkatan kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan Data dan Informasi yang terpilah sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan Daerah.
33	PERENCANAAN	1 Integrasi perencanaan dan penganggaran yang belum optimal;	1 Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2 Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana;	2 Peningkatan kapasitas tenaga perencana, baik di Bappeda maupun yang ada di masing-masing OPD melalui Diklat/Bimtek perencanaan
		3 Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah	3 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga kemsyarakatan lainnya
		4 Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	
		5 Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	6 Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah
34	KEUANGAN	1 Belum optimalnya pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD pada tahun sebelumnya	1 Mempersingkat Regulasi Pemungutan pajak Membuat Peraturan Tentang Mekanisme pajak BPHTB Pencatatan kembali Pajak Per-Tahun Melakukan Monitoring dan Evaluasi Melakukan sosialisasi Pajak
		2 Kurangnya penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah	2 Dibuatkan aplikasi pelayanan pemungutan pajak (secara Online) Dibuatkan SOP standar pelayanan
		3 Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis acrual	3 Memberikan pelatihan kompetensi tentang manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis acrual



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau Kabupaten/kota dan/atau Desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN.

3.1. Dasar hukum Penyelenggaraan tugas Pembantuan

Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

3.2.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Maros tidak menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat diakibatkan adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19.

3.2.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2022 melakukan tugas pembantuan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

a. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.

Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan. Adapun beberapa tugas pembantuan yang dimaksud untuk kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Turikale yaitu Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat dan Administrasi kegiatan Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.

Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Turikale mendapatkan anggaran sebesar Rp.3.906.390.000 dengan realisasi Rp.3.814.589.744 (97.65%). Pembangunan/Revitalisasi Pasar rakyat sebesar Rp.3.800.000.000 dengan realisasi Rp.3.711.443.000 (97,67%) dan Administrasi kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp.106.390.000 dengan realisasi Rp.103.146.744 (96.95%).

Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :



Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

NO	KEMENTERIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN				
	Kementerian Perdagangan	Keg. Pembangunan Pasar Rakyat Turikale	3.906.390.000	3.814.589.744	97.65
		Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	3.800.000.000	3.711.443.000	97.67
		Administrasi kegiatan Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat	106.390.000	103.146.744	96.95

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, 2023

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian. Adapun beberapa tugas pembantuan yang dimaksud pada bidang Sarana dan Prasarana untuk pembangunan embung, pekerjaan irigasi perpompaan, dan rehabilitasi irigasi/tersier. Kegiatan pembangunan embung mendapatkan anggaran sebesar Rp.120.000.000 dengan realisasi Rp.120.000.000 (100%). Pekerjaan Irigasi Perpompaan sebesar Rp.119.000.000 dengan realisasi Rp.119.000.000 (100%) dan Rehabilitasi Irigasi/Tersier yaitu sebesar Rp.600.000.000 dengan realisasi Rp.600.000.000 (100%).

Tugas pembantuan selanjutnya pada bidang ketahanan pangan untuk Sistem Informasi Stok Pangan (Pemantauan Stok Gabah Beras di Penggilingan) di 11 lokasi penggilingan yaitu maju selangkah, tanah didih, tanah didih jaya, UD Nurul, Pasandang Jaya, Pangamaseang, Samaenre, UD Hamza, Tani Makmur, UD Sahrul, dan Sinar Makmur. Panel Harga (Pemantauan Harga Pangan Tingkat Produsen) yang berlokasi di



3 titik usaha tani dan 3 titik usaha ternak di Bantimurung dan Bontoa. Panel Harga (Pemantauan Harga Pangan Tingkat Konsumen) yang berlokasi di Sentra Pasar Tradisional Kabupaten Maros. P2L (Aspirasi) 5 Kecamatan yaitu Bontoa, Tompobulu, Mallawa, Mandai, dan Tompobulu. Family Farming yang berlokasi di Kecamatan Tompobulu dan Mallawa.

Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

NO	KEMENTERIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (Bidang Sarana dan Prasarana)				
	Kementerian Pertanian	Pembangunan Embung	120.000.000	120.000.000	100
		Pekerjaan Irigasi Perpompaan	119.000.000	119.000.000	100
		Rehabilitasi Irigasi/Tersier	600.000.000	600.000.000	100
2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (Bidang Ketahanan Pangan)				
	Kementerian Pertanian	Sistem Informasi Stok Pangan (Pemantauan Stok Gabah Beras di Penggilingan)			100
		Panel Harga (Pemantauan Harga Pangan Tingkat Produsen)			100
		Panel Harga (Pemantauan Harga Pangan Tingkat Konsumen)			100
		P2L (Aspirasi) 5 Kecamatan	250.000.000	250.000.000	100
		Family Farming Pertanian Keluarga			100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah, 2023



3.3. Permasalahan dan Kendala

Adanya pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada tahun 2022 mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Maros karena masih terdapatnya kektor yang mengalami pembatasan sehingga memunculkan suatu kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan pada daerah-daerah yang masih sangat membutuhkan anggaran tambahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Diharapkan untuk tahun 2022 ini, pemerintah melalui Kementerian tetap menganggarkan ataupun menyalurkan anggaran tugas pembantuan mengingat adanya tren penurunan angka kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang bisa mendorong dan membantu daerah-daerah untuk dapat meningkatkan seluruh aspek yang berdampak baik kepada Masyarakat.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pencapaian dan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai dengan akhir tahun anggaran sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pusat masing-masing bidang SPM dan diharapkan setiap SKPD dapat mengintegrasikan program kegiatan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan ini sangat penting karena indikator-indikator yang terdapat pada setiap bidang SPM merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Penerapan dan pencapaian ini dimaksudkan untuk memenuhi regulasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah, tertanggal 26 Maret 2012 bahwa setiap Pemerintahan Daerah harus melaporkan kegiatan SPMnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Penerapan dan pencapaian ini juga memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta secara teknis dijelaskan secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemahaman yang akurat mengenai kondisi/status penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Maros, sangat membantu penyusunan rencana pencapaian SPM yang lebih realistis dan dapat dicapai. Hal ini dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pencapaian SPM di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disajikan dalam bentuk profil pelayanan dasar.



Profil singkat pelayanan dasar Kabupaten Maros merupakan sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar sebagai bahan masukan dalam menyusun dan mengembangkan rencana pencapaian SPM ke depan. Profil pelayanan dasar disusun melalui pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah tersedia dan/atau data dan informasi yang dihasilkan dari proses diskusi yang dilakukan selama proses penggalian data dan informasi di Kabupaten Maros.

Profil pelayanan dasar menggambarkan kondisi pencapaian SPM di Kabupaten Maros melalui data dan informasi yang dikumpulkan oleh setiap SKPD pemangku SPM dan pemangku kepentingan. Proses pengumpulan data dan informasi melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Penyusunan profil difokuskan kepada data dan informasi merujuk pada indikator-indikator SPM.

Di bawah ini akan diuraikan kompilasi masing-masing bidang SPM yang terdiri atas kriteria indikator yang belum, sudah memenuhi dan melampaui dari target nasional yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisa dalam pengumpulan data dan informasi sesuai dengan indikator bidang masing masing SPM. Hasil analisis untuk kriteria setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM dan setiap indikator sebagai berikut :

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar; dan
3. pendidikan kesetaraan

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalah sebagai berikut :



- a. Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 2. Kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten/Kota.
 4. Perizinan Pendidikan yaitu penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat
- b. Jenis pelayanan minimal Urusan Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun.
 2. Kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar
 3. Pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten.
 4. Perizinan Pendidikan yaitu penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
- c. Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Kesetaraan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun
 2. Kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non Formal
 3. Pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten
 4. Perizinan Pendidikan yaitu penerbitan Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.



4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal :

Tabel. 2.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	15.272	15.272	100 %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	66.206	66.206	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	420	420	100 %

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat di deskripsikan bahwa rencana target capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan adalah 100 %, hal ini sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4.1.3. Anggaran

Alokasi Anggaran untuk pemenuhan SPM Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel.2.2
Alokasi Anggaran SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	10.896.268.600,-	10.629.143.000,-	97,55 %	APBD
2	Pendidikan Dasar	82.468.026.350,-	64.277.383.543,-	77,94 %	APBD
3	Pendidikan Kesetaraan	724.440.000,-	523.800.000,-	77,30 %	APBD
Total Anggaran SPM		94.088.734.950,-	75.430.326.543,-	80,17 %	
Total Anggaran SKPD		381.666.920.053,-	343.785.988.399,-	90,72 %	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		24,62 %	21,94 %		

4.1.4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Berdasarkan Golongan

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	40	17	57
2	GOL. III	25	28	53
3	GOL. II	13	8	21
4	GOL. I	1	0	1
JUMLAH		79	53	132

Sumber data : BPKSDM

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :



Tabel. 2.4
Daftar Guru PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Jenis PAUD

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK PAUD		TOTAL
		TK/KB	RA	
1	Bantimurung	71	7	78
2	Camba	48	0	48
3	Cenrana	55	0	55
4	Lau	58	10	68
5	Mallawa	51	0	51
6	Mandai	96	28	124
7	Maros Baru	72	3	75
8	Bontoa	88	5	93
9	Marusu	61	4	65
10	Moncongloe	79	6	85
11	Simbang	68	13	81
12	Tanralili	91	17	108
13	Tompobulu	39	4	43
14	Turikale	107	28	135
JUMLAH		984	125	1109

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2023

Sedangkan Penilik PAUD yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.5
Daftar Penilik PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah Kecamatan	Penilik PAUD		
		L	P	JUMLAH
1	Turikale	2	1	3
2	Maros Baru	-	2	2
3	Mandai	2	-	2



No.	Wilayah Kecamatan	Penilik PAUD		
		L	P	JUMLAH
4	Bontoa	3	-	3
5	Lau	1	-	1
6	Tanralili	2	1	3
7	Tompobulu	1	-	1
8	Moncongkoe	1	-	1
9	Bantimurung	1	-	1
10	Simbang	2	-	2
11	Cenrana	1	-	1
12	Camba	2	-	2
13	Mallawa	2	-	2
14	Marusu	1	-	1
	JUMLAH	21	4	25

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Secara umum jumlah Lembaga dan jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.6
Jumlah Lembaga PAUD Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA		Total
		PAUD/KB	RA	
1	Bantimurung	16	2	18
2	Camba	15	0	15
3	Cenrana	17	0	17
4	Lau	12	3	15
5	Mallawa	14	0	14
6	Mandai	30	5	35
7	Maros Baru	19	1	20
8	Bontoa	22	1	23



9	Marusu	13	1	14
10	Moncongloe	21	1	22
11	Simbang	21	4	25
12	Tanralili	28	4	32
13	Tompobulu	12	1	13
14	Turikale	27	7	34
JUMLAH		267	30	297

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2023

Tabel.2.7
Jumlah Peserta Didik PAUD Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA DIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Bantimurung	443	511	954
2	Camba	178	193	371
3	Cenrana	251	268	519
4	Lau	477	385	862
5	Mallawa	172	175	347
6	Mandai	881	826	1707
7	Maros Baru	415	450	865
8	Bontoa	575	594	1169
9	Marusu	464	484	948
10	Moncongloe	484	430	914
11	Simbang	275	388	663
12	Tanralili	764	709	1473
13	Tompobulu	253	262	515
14	Turikale	914	794	1708
JUMLAH		6.546	6.469	13.015

Sumber data :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2023

**b. Pendidikan Dasar**

Jumlah guru SD sebagai berikut :

Tabel 2.8
Daftar Guru SD Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Bantimurung	59	186	245
2	Camba	43	101	144
3	Cenrana	44	101	145
4	Lau	41	136	177
5	Mallawa	48	90	138
6	Mandai	53	219	272
7	Maros Baru	41	128	169
8	Bontoa	54	156	210
9	Marusu	58	122	180
10	Moncongloe	24	75	99
11	Simbang	45	118	163
12	Tanralili	41	148	189
13	Tompobulu	40	75	115
14	Turikale	56	254	310
JUMLAH		647	1.909	2.556

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Tabel 2.9
Daftar Guru SMP Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Bantimurung	52	97	149
2	Camba	47	51	98
3	Cenrana	27	48	75



NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
4	Lau	42	102	144
5	Mallawa	34	42	76
6	Mandai	49	141	190
7	Maros Baru	32	59	91
8	Bontoa	43	67	110
9	Marusu	45	57	102
10	Moncongloe	36	41	77
11	Simbang	38	64	102
12	Tanralili	32	50	82
13	Tompobulu	27	34	61
14	Turikale	44	120	164
JUMLAH		548	973	1521

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Sedangkan Pengawas Sekolah yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.10
Daftar Pengawas SD Sekabupaten Maros Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah Kecamatan	Pengawas SD		
		L	P	JUMLAH
1	Mallawa	1	1	2
2	Camba	2	-	2
3	Cenrana	2	-	2
4	Simbang	1	1	2
5	Bantimurung	2	1	3
6	Turikale	1	1	2



No.	Wilayah Kecamatan	Pengawas SD		
		L	P	JUMLAH
7	Tompobulu	2	-	2
8	Maros Baru	2	-	2
9	Lau	1	1	2
10	Bontoa	2	1	3
11	Marusu	1	1	2
12	Mandai	1	-	1
13	Tanralili	2	-	2
14	Moncongloe	1	-	1
	JUMLAH	21	7	28

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Tabel. 2.11
Daftar Pengawas SMP Kabupaten Maros Berdasarkan Bidang Studi

No.	Bidang Studi	Pengawas SMP		
		L	P	Jumlah
1	Matematika	1	-	1
2	IPA	2	-	2
3	IPS	-	-	-
4	Bahasa Inggris	2	-	2
5	Bahasa Indonesia	-	-	-
6	PKN	1	-	1
7	PAI	-	-	-
8	Seni Budaya	-	-	-
9	Prakarya	-	-	-
10	Muatan Lokal	-	-	-



No.	Bidang Studi	Pengawas SMP		
		L	P	Jumlah
11	Penjaskes	-	-	-
	JUMLAH	6	-	6

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Secara umum kondisi Pendidikan di Kabupaten Maros dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan Dasar

Tabel.2.12
Jumlah Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah Sekolah	Keterangan
1	SD	243	
2	MI	28	
3	SMP	75	
4	MTs	44	
	TOTAL	390	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

2. Peserta Didik

Tabel 2.13
Jumlah Peserta Didik Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah Peserta Didik	Keterangan
1	SD	42.386	
2	MI	3.455	
	Jumlah	45.841	
3	SMP	16.582	



NO	Uraian	Jumlah Peserta Didik	Keterangan
4	MTs	5.037	
	Jumlah	21.619	
	TOTAL	67.460	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

3. Ruang Kelas

Tabel 2.14
Jumlah Ruang Kelas Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah Ruang Kelas	Keterangan
1	SD	1.724	
2	MI	-	
3	SMP	576	
4	MTs	-	
	TOTAL	2.300	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

4. Rombongan Belajar

Tabel 2.15
Jumlah Rombongan Belajar Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah Rombongan Belajar	Keterangan
1	SD	1.724	
2	MI		
3	SMP	576	
4	MTs		
	TOTAL	2.300	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

c. Pendidikan Kesetaraan



Daftar Tutor Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.16
Daftar Tutor Paket A Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket A		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	-	4	4
2	Camba	-	-	-
3	Cenrana	-	4	4
4	Lau	-	-	-
5	Mallawa	-	-	-
6	Mandai	5	4	9
7	Maros Baru	-	-	-
8	Bontoa	-	-	-
9	Marusu	-	-	-
10	Moncongloe	-	-	-
11	Simbang	-	-	-
12	Tanralili	1	3	4
13	Tompobulu	2	3	5
14	Turikale	-	-	-
	JUMLAH	8	18	26

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Tabel. 2.17
Daftar Tutor Paket B Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket B		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	4	5	



No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket B		
		L	P	JUMLAH
2	Camba	-	-	
3	Cenrana	1	5	
4	Lau	1	5	
5	Mallawa	-	-	
6	Mandai	4	3	
7	Maros Baru	-	-	
8	Bontoa	-	-	
9	Marusu	-	-	
10	Moncongloe	-	-	
11	Simbang	-	-	
12	Tanralili	-	-	
13	Tompobulu	2	5	
14	Turikale	-	-	
	JUMLAH	12	23	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Tabel. 2.18
Daftar Tutor Paket C Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket C		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	5	6	
2	Camba	-	-	
3	Cenrana	2	5	
4	Lau	2	5	
5	Mallawa	-	-	
6	Mandai	6	5	



No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket C		
		L	P	JUMLAH
7	Maros Baru	-	-	
8	Bontoa	-	-	
9	Marusu	-	-	
10	Moncongloe	-	-	
11	Simbang	-	-	
12	Tanralili	3	8	
13	Tompobulu	3	7	
14	Turikale	-	-	
	JUMLAH	21	36	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Gambaran Pendidikan Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan

Tabel. 2.19
Lembaga Yang Penyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan
Di Kabupaten Maros

NO	LEMBAGA	KECAMATAN	STATUS LEMBAGA	
			NEGERI	SWASTA
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	Bantimurung	√	-
2	PKBM MAWAR	Lau	-	√
3	PKBM MATTIRO SAWE	Mandai	-	√
4	PKBM TANRALILI	Tanralili	-	√
5	PKBM TOMPOBULU	Tompobulu	-	√
6	PKBM DELIA CENRANA	Cenrana	-	√

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023



2. Warga belajar

Tabel 2.20
Jumlah Peserta Paket A Kabupaten Maros Tahun 2022

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1	Bantimurung	10
2	Camba	0
3	Cenrana	15
4	Lau	10
5	Mallawa	0
6	Mandai	15
7	Maros Baru	0
8	Bontoa	0
9	Marusu	0
10	Moncongloe	0
11	Simbang	18
12	Tanralili	0
13	Tompobulu	10
14	Turikale	21
	JUMLAH	99

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Tabel 2.21
Jumlah Peserta Paket B Kabupaten Maros Tahun 2022

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1	Bantimurung	15
2	Camba	0
3	Cenrana	20
4	Lau	20



No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
5	Mallawa	0
6	Mandai	21
7	Maros Baru	0
8	Bontoa	0
9	Marusu	0
10	Moncongloe	0
11	Simbang	27
12	Tanralili	0
13	Tompobulu	13
14	Turikale	25
	JUMLAH	141

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Tabel 2.22
Jumlah Peserta Paket C Kabupaten Maros Tahun 2022

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1	Bantimurung	25
2	Camba	0
3	Cenrana	25
4	Lau	30
5	Mallawa	0
6	Mandai	24
7	Maros Baru	0
8	Bontoa	0
9	Marusu	0
10	Moncongloe	0



No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
11	Simbang	25
12	Tanralili	0
13	Tompobulu	17
14	Turikale	34
	JUMLAH	180

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

3. Ruang kelas

Tabel 2.23

Jumlah Ruang Kelas SPNF dan PKBM Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Ruang Belajar	Keterangan
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	7	
2	PKBM MAWAR	3	
3	PKBM MATTIRO SAWE	7	
4	PKBM TANRALILI	3	
5	PKBM TOMPOBULU	6	
6	PKBM DELIA CENRANA	7	
	JUMLAH	33	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

4. Rombongan belajar

Tabel 2.24

Jumlah Rombongan Belajar Kesetaraan Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Rombel	Keterangan
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	7	
2	PKBM MAWAR	3	
3	PKBM MATTIRO SAWE	7	
4	PKBM TANRALILI	2	
5	PKBM TOMPOBULU	6	
6	PKBM DELIA CENRANA	7	



No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Rombel	Keterangan
	JUMLAH	32	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

4.1.5. Hasil Capaian

Realisasi target pencapaian SPM Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.25
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	15.272	13.015	85,22%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	66.206	66.160	93,93 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	420	420	100 %

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2023

Berdasarkan Tabel 2.25 di atas dapat di deskripsikan bahwa target capaian SPM untuk Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 85,22 %, Pendidikan Dasar 99,93 % dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 100 %. Pada tahun 2022



ini capaian SPM Bidang Pendidikan yang mencapai target yang telah ditentukan terdapat pada Layanan Layanan Pendidikan Kesetaraan telah mencapai 100 %. Sementara untuk Layanan SPM Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar capaiannya masih dibawah target yang telah ditentukan berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021.

Capaian SPM dan Capaian Mutu Layanan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.26

Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
		15.272	13.015	2.257	85,22
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Buku gambar	16,396	10,463	5,933	63,81
	Alat mewarnai	8,198	7,535	0,663	91,91
	Penyediaan biaya personil Peserta Didik	4,606	2,5	2,106	54,28
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	245	183	62	74,69
	Pendidikan Anak Usia Dini				
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
				Tersedia	
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	638	332	306	52,04

Sumber Data : Aplikasi E SPM Bangsa Kemendagri Tahun 2023

2. Pendidikan Dasar

Tabel 2.27

Capaian SPM Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar				
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
		66.206	66.160	46	99,93
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Buku teks pelajaran	110.104	63.442	46.662	57,62
	Perlengkapan belajar	16.035	10.335	5.700	64,45
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	305	298	7	97,70
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.107	861	246	77,78
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.833	2.300	533	81,19



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Penyediaan biaya personil peserta didik	47.140	17.838	29.302	37,84
	Pendidikan Dasar				
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	4.315	3.766	549	87,28
	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	316	304	12	96,20

Sumber Data : Aplikasi E SPM Bangda Kemendagri Tahun 2023

3. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 2.28

Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
		420	420	0	100,00
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Modul belajar	990	420	570	42,42
	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	53	42	11	79,25



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Penyediaan biaya personil peserta didik	250	135	115	54,00
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	126	72	54	57,14
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	7	6	1	85,71
Pendidikan Kesetaraan					
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	7	6	1	85,71
	Perlengkapan belajar	200	120	80	60,00
	PKBM Terakreditasi minimal C	7	6	1	85,71

5. Kendala yang dihadapi Daerah dalam penerapan SPM

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	a. Struktur Pendataan yang belum terstandarisasi b. Entri data/penginputan data yang tidak konsisten.	Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada



No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none">c. ketidakakuratan data / informasi yang diperoleh dari pengelola data.d. Adanya Perbedaan data dari beberapa indicator.e. terdapatnya informasi ganda dalam pengumpulan dan pengolahan data.	Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Pendidikan.
2.	Penghitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">a. Perhitungan Anak tidak Sekolah yang dilakukan <i>by name by adress</i>b. Perhitungan kebutuhan biaya Pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPDc. Perhitungan jumlah tenaga pendidik pada satiap wilayah.d. Perhitungan kebutuhan penanganan social bagi anak putus sekolah belum memadai.	<ul style="list-style-type: none">a. Perhitungan Kebutuhan Anak tidak sekolah memungkinkan untuk dilakukan oleh pihak ketiga yang secara khusus menangani/ mengumpulkan data anak tidak sekolah.b. Menyesuaikan jumlah siswa, sekolah dan tenaga pendidik yang terdapat dalam satu wilayah.
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none">a. Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.b. Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak sekolah.	Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM. Mengalokasikan dana/ Anggaran
4.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">a. Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah/ lokasi pemenuhan.b. Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh bebepa factor sehingga beberapa layanan tidak dapat dapat dipenuhi.c. Minimannya sumberdaya yang tersedia	Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan.
5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	-	-



4.1. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- h. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- i. Cakupan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- j. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.32
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	6.434	6.434	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	6.434	6.434	100 %



3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar			
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.434	6.434	100 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	29.782	29.782	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	58.275	58.275	100 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	157.077	157.077	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	27.918	27.918	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	2.401	2.401	100 %
10	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	871	871	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5.708	5.708	100 %



12	Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang-orang terduga berisiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	8.123	8.123	100 %
----	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2023

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.36
Realisasi Capaian SPM urusan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	6.434	6.535	101,57%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	6.434	6.584	102,33%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	6.434	6.533	101,54%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	29.782	29.341	98,52%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	58.275	59.644	102,35%



6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	157.077	140.280	89,31%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	27.918	23.381	83,75%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	24.315	8.872	36,49%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	2.401	1.714	71,39%
10	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	871	823	94,49%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5.708	5.433	95,18%
12	Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	8.123	8.487	104,48%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros 2023



4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.37
Alokasi Anggaran SPM urusan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.641.691.600	1.150.925.200	43,57	DAK NF (BOK)
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	382.275.200	227.447.200	59,50	DAK NF (BOK)
3	Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	144.020.000	99.560.000	69,13	DAK NF (BOK)
4	Pelayanan kesehatan Balita	1.906.867.000	1.701.532.000	89,23	DAK NF (BOK)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	608.835.000	461.870.000	75,86	DAK NF (BOK)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	954.894.600	542.389.000	56,80	DAK NF (BOK)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	51.037.200	45.577.200	89,30	DAK NF (BOK)
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	215.460.000	128.660.000	59,71	DAK NF (BOK))
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)			0,0	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	489.200.000	322.820.000	65,99	DAK NF (BOK)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	356.240.000	247.250.000	69,41	DAK NF (BOK)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	457.633.000	308.350.000	67,38	DAK NF (BOK)
Total Anggaran SPM		4.210.118.000	8.208.153.600	5.236.380.600	63,79
Total Anggaran SKPD			215.460.000	128.660.000	59,71
Persentase Alokasi Anggaran SPM		200.783.636.889			



4.2.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Daftar Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Berdasarkan Golongan

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	18	48	66
2	GOL. III	155	906	1.061
3	GOL. II	41	136	177
4	GOL. I	0	0	1
	JUMLAH	214	1.090	1.304

Sumber data BPKSDM

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten Maros pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none">Struktur Pendataan yang belum terstandarisasiEntri data/penginputan data yang tidak konsisten.ketidakakuratan data / informasi yang diperoleh dari pengelola data.Adanya Perbedaan data dari beberapa indicator.terdapatnya informasi ganda dalam pengumpulan dan pengolahan data.	Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Pendidikan.
2.	Penghitungan Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none">Perhitungan Anak tidak Sekolah yang dilakukan by name by	1. Perhitungan Kebutuhan Anak tidak sekolah



		<p>adress</p> <p>b. Perhitungan kebutuhan biaya Pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPD</p> <p>c. Perhitungan jumlah tenaga pendidik pada setiap wilayah.</p> <p>d. Perhitungan kebutuhan penanganan social bagi anak putus sekolah belum memadai.</p>	<p>memungkinkan untuk dilakukan oleh pihak ketiga yang secara khusus menangani/ mengumpulkan data anak tidak sekolah.</p> <p>2. Menyesuaikan jumlah siswa, sekolah dan tenaga pendidik yang terdapat dalam satu wilayah.</p>
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<p>a. Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.</p> <p>b. Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak sekolah.</p>	<p>Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM. Mengalokasikan dana/ Anggaran</p>
4.	Pelaksanaan	<p>a. Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah/ lokasi pemenuhan.</p> <p>b. Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh bebepa factor sehingga beberapa layanan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>c. Minimannya sumberdaya yang tersedia</p>	<p>Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan.</p>
5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	-	-



Realisasi SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2022 belum semuanya mencapai target 100%. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu :

1. Indikator pelayanan kesehatan Balita dengan capaian 98,52% karena belum semua orang tua yang memiliki Balita berkunjung ke Posyandu terutama bagi kedua orang tua yang bekerja sehingga masih terdapat 441 Balita yang belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 8 (Delapan) kali dalam setahun berupa penimbangan berat badan; pengukuran panjang/tinggi badan; pemantauan perkembangan; pemberian kapsul vitamin A; pemberian imunisasi dasar lengkap (IDL) dan imunisasi lanjutan pada Balita meskipun Petugas Kesehatan telah melaksanakan sweeping namun masih belum ditemukan dirumah karena kesibukan orang tua yang bekerja di sawah, kebun maupun kantor.
2. Indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 89,31%, yang disebabkan karena :
 - a. Sasaran usia produktif banyak yang bekerja di luar wilayah Kabupaten Maros sehingga menyulitkan Tenaga Kesehatan untuk melakukan screening di hari kerja.
 - b. Belum semua sasaran usia produktif melakukan screening sesuai dengan standar akibat kurangnya ketersediaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) pada awal tahun 2022.
3. Indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia dengan capaian 83,75% karena tidak tersedianya bahan medis habis pakai (BMHP) sejak awal tahun 2022.
4. Indikator pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi dengan capaian 36,49%, yang disebabkan karena :
 - a. Penderita Hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin sehingga menyebabkan DO (setiap penderita Hipertensi wajib mendapatkan pelayanan kesehatan setiap bulan selama satu tahun).
 - b. Data hasil pelayanan penderita Hipertensi dari jejaring Puskesmas (Klinik, Dokter praktek mandiri, dll) masih kurang maksimal.



5. Indikator pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus dengan capaian 71,39%, yang disebabkan karena :
 - a. Ketersediaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) masih kurang.
 - b. Penderita Diabetes Mellitus tidak melakukan pengobatan secara rutin sehingga menyebabkan DO (setiap penderita Hipertensi wajib mendapatkan pelayanan kesehatan setiap bulan selama satu tahun).
 - c. Data hasil pelayanan penderita Diabetes Mellitus dari jejaring Puskesmas (Klinik, Dokter praktek mandiri, dll) masih kurang maksimal.
6. Indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 94,49%, yang disebabkan karena :
 - a. Ketersediaan obat penyakit ODGJ berat masih kurang.
 - b. Belum semua penderita ODGJ berat terdaftar sebagai peserta BPJS
 - c. Beberapa penderita ODGJ berat yang telah meninggal dunia dan pindah wilayah dari Kabupaten Maros
 - d. Masih kurangnya *supporting* dari keluarga penderita ODGJ berat untuk melakukan pengobatan secara rutin.
7. Indikator pelayanan kesehatan orang terduga TB dengan capaian 95,18% yang disebabkan oleh :
 - a. Target untuk pelayanan kesehatan orang terduga TB merupakan data proyeksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan data riil yang berada di wilayah kerja Kabupaten Maros.
 - b. Keluhan pada saat batuk masih dianggap hal yang biasa karena sebagian masyarakat yang menganggap batuk bukan masalah kesehatan yang serius dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain sehingga bagi penderita batuk tersebut malas memeriksakan diri ke fasyankes meskipun telah diberikan edukasi dari kader/petugas kesehatan.
 - c. Belum semuanya suspek penderita TB mematuhi aturan dalam memeriksakan diri seperti, masih ada beberapa yang belum mengembalikan hasil dahak mereka yang di *Pot Sputum* (wadah lender untuk penderita Batuk)



- d. Kepatuhan meminum obat bagi penderita TB yang belum semuanya pasien memiliki pendamping minum obat (PMO).

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2022 terdiri dari :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik
Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.38
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Dinas PUPR Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.445	2.445	100



2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	3.000	3.000	100
---	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-----

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39

**Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Dinas PUPR Kabupaten Maros Tahun 2022**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.445	2.295	93,87
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.000	2.900	96,67%

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan 2023

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.40
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum
Dinas PUPR Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	14.630.603.000	14.075.655.623,51	96.2	APBD
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	5.499.224.550	5.385.806.550	97.94 %	(DAK dan DAU)
Total Anggaran SPM		20.129.827.550	19.461.462.173,51	96.67	APBD
Total Anggaran SKPD		275.525.120.556	225.038.456.694,74	81.68	(DAK dan DAU)
Persentase Alokasi Anggaran SPM		8,96%	8,64		

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan 2023

4.3.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.4
Daftar Pegawai Dinas PUPR Kab. Maros

NO	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	2	3	5
2	III	35	28	63
3	II	22	9	31
4	I		1	1
Total				100

Sumber data : BKPSDM Kab.Maros Tahun 2023

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang



yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum, sanitasi, drainase dan persampahan dengan sistem terpusat berbasis masyarakat	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terhadap penting air minum layak, sanitasi dan pengelolaan sampah yang aman	Sudah dilakukan upaya pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan serta pengelolaan air limbah dan sampah yang terpadu (TPS3R)
Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Universal akses air minum yang belum tercapai, layanan provinsi hanya pada air minum curah regional	Belum semua kabupaten memiliki kegiatan prioritas penyediaan air minum	Urusan penyediaan air minum merupakan pelayanan dasar yang bersifat wajib (SPM)
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Universal akses air limbah domestik yang belum tercapai, layanan provinsi hanya pada pengolahan limbah regional	Pengolahan limbah domestik belum menjadi prioritas beberapa kabupaten	Sosialisasi terhadap kab/kota bahwa pengolahan limbah domestik merupakan bagian dari SPM kab/kota

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros terdiri dari :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten



4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	245	245	100 %	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	0	0	0 %	Tidak Ada Program Pemerintah Daerah Kab. Maros Tahun 2022 yang mengaktifkan adanya warga negara yang terkena relokasi

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2023

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.42
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	245	245	100 %	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	0	0	0 %	Tidak Ada Program Pemerintah Daerah Kab. Maros Tahun 2022 yang mengakibatkan adanya warga negara yang terkena relokasi

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2023

4.4.4. Alokasi Anggaran

Adapun Alokasi Anggaran urusan perumahan rakyat oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :



Tabel 2.44
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	160.000.000	140.000.000	87,5%	APBD
		884.800.000	884.800.000	100%	Provinsi
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	0	0	0%	
Total Anggaran SPM		1.044.800.000	1.024.800.000	98%	
Total Anggaran SKPD		4.836.040.000	4.031.639.000	83,37%	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		21,60%	25,41%		

Sumber data : Dinas Peumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 2023

4.4.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat digambarkan sebagai berikut :

NO	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	2	3	5
2	III	35	28	63
3	II	22	9	31
4	I		1	1
Total				100



4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	f. Lokasi Jauh g. Sulitnya berkoordinasi dengan Aparat Desa h. Pengumpulan Data ditingkat Desa Masih Kurang	Menyiapkan Standarisasi permintahan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat
2.	Penghitungan Kebutuhan	e. Data yang Masuk Lebih Banyak dari pada rencana Realisasinya f. Perencanaan Pendataan lebih banyak dari pada usulan kegiatan	c. Perhitungan Kebutuhan Rumah Korban Bencana Harus Disesuaikan berdasarkan tingkat kerusakan Rumah Masyarakat d. Menyesuaikan jumlah kebutuhan pemenuhan rumah korban bencana
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	c. Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. d. Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam Penanganan Korban Bencana	Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM. Mengalokasikan dana/ Anggaran
4.	Pelaksanaan	d. Pendistribusian Material yang susah dijangkau kendaraan 4 roda e. Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh beberapa factor sehingga beberapa layanan tidak dapat dapat dipenuhi. f. Minimannya sumberdaya yang tersedia	Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan.
5.	Pelaporan	-	-



No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
6.	Lain-lain	-	-

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 pada 2 (dua) Organisasi Pemerintahan Daerah yaitu :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Adapun mutu pelayanan terkait ketentraman dan ketertiban Umum meliputi

- standar operasional prosedur Satpol PP
- standar sarana prasarana Satpol PP;
- standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

- b) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran meliputi:

- layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;



- layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	118	118	100 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	50	36	72 %

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2023



4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46

**Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros
Tahun 2022**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	118	118	100 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	50	36	72 %

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2023

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.47

**Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros
Tahun 2022**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	3.808.830.000	3.755.740.000	98,61 %	APBD
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.165.578.700	2.148.048.700	99,19%	APBD
3	penegakan kebijakan dan peraturan perundangan daerah	Rp. 25.160.000	Rp. 25.160.000	100%	APBD
Total Anggaran SPM		Rp. 5.999.568.700	Rp.5.928.948.700	98,82%	
Total Anggaran SKPD		Rp. 14.438.427.225	Rp. 14.051.811.737	97,32%	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		41,55%	42,19%		

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2023

4.5.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digambarkan sebagai berikut :



NO	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	9	2	11
2	III	27	10	37
3	II	47	5	52
4	I	3	0	3
Total				103

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Tidak tersedianya data (tidak terdokumen secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan tetapi tidak tercatat karena Kurangnya sumber daya aparatur yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan mahir;	Memberikan kesempatan kepada perencana dan pelaksana teknis untuk mengikuti pelatihan mengenai Standar Pelayanan Minimal
2.	Penghitungan Kebutuhan	a. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran; b. Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada di peruntukan untuk	a. Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan penambahan beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran; b. Mengajukan untuk melakukan



		<p>memenuhi jasa tenaga honor;</p> <p>c. c Kondisi sarana prasarana masih perlu di tambah utamanya mobil operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Pemadam Kebakaran masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum memiliki Armada dan Penempatan personil Sektor di Kecamatan (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, MarosBaru dan Mandai).</p>	<p>pengangkatan khusus kepada tenaga honor Satpol PP dan Damkar serta melakukan seleksi kembali untuk mengurangi jumlah tenaga honor yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;</p> <p>c. Penambahan jumlah sarana prasaran berupa armada pengangkut petugas</p>
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<p>a. Kurangnya Anggaran dalam mendukung program dan kegiatan</p> <p>b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;</p>	<p>Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional;</p>
4.	Pelaksanaan	<p>a. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;</p> <p>b. Masih banyaknya Aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018</p>	<p>a. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</p> <p>b. Mengirim Aparatur untuk mengikuti Diklat pengembangan SDA Aparatur Satpol PP dan Damkar</p>



		tentang Satpol PP	
5.	Pelaporan	Pelaporan Belum Berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Sebaiknya Pelaporan Berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Segera di Terapkan Agar Lebih Efisien dan Cepat
6.	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran;b. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran;c. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK;	<ul style="list-style-type: none">a. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah pos pemadam kebakaran;b. Perbaiki jalan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil damkar;c. Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di WMK sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

a. Pelayanan Informasi rawan bencana

Pelayanan Informasi rawan bencana meliputi :

- penyusunan kajian risiko bencana;
- Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana



Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi

- penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- pembuatan rencana kontinjensi;
- pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana meliputi

- respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- respon cepat darurat bencana;
- aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi	Jumlah warga negara yang	387.984	387.984	100 %



	rawan bencana	memproleh layanan informasi rawan bencana			
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100 %
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memproleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	21.842	15	0,07%

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros 2023

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memproleh layanan informasi rawan bencana	387.984	387.984	100 %
2	Pelayanan pencegahan	Jumlah warga yang	100	100	100 %



	dan kesiapsiagaan terhadap bencana	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	21.842	15	0,07%

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros 2023

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	17.400.000	17.400.000	100	DAU
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	511.883.250	142.383.250	27,82	DAU
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	241.755.000	192.490.000	79,62	DAU
Total Anggaran SPM		771.038.250	352.273.250	45,69	
Total Anggaran SKPD		5.512.037.945	4.741.541.028	86,02	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		13,99	7,42		

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros 2023



4.5.5. Dukungan Personil

Sumber Daya Aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Daftar Sumber Daya Manusia

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	5	-	5
2	III	12	11	23
3	II	8	1	9
4	I	-	-	-
5	SATGAS	35	13	48
Total		60	25	85

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros 2023

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Sulitnya menghimpun data yang lengkap dan akuntabel dari Bidang yang mengampu	Dibutuhkan data base yang dapat diakses bersama
2.	Penghitungan Kebutuhan	Belum ada kesamaan standar proses penghitungan	Melakukan bimbingan teknis untuk menyamakan persepsi
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Program pelayanan SPM belum masuk skala prioritas dalam perencanaan.	Pemangku kepentingan harus memanfaatkan anggaran skala prioritas terkait pemenuhan SPM
4.	Pelaksanaan	Terbatasnya realisasi Anggaran 2022	Menambah realisasi anggaran



5.	Pelaporan	Tidak tersedianya data, perbedaan penghitungan, perbedaan skala prioritas, dan terbatasnya anggaran pelaksanaan berdampak pada penyusunan pelaporan yang lambat dan tidak akurat.	Dibutuhkan dukungan sumber daya yang profesional untuk menyusun laporan SPM
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.50
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5) : (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	105	105	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	118	118	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	21	21	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	61	61	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1.015	1.015	100%

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Maros 2023



4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 2.51
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	105	105	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	118	118	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	21	21	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti	61	61	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh	1.015	1.015	100%



	tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	perlindungan dan jaminan sosial			
--	--------------------------------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Maros 2023

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.52
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	37.900.000	37.350.000	99%	APBD
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	7.200.000	0	0%	APBD
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	12.350.000	12.350.000	100 %	APBD
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	70.270.000	70.270.000	100 %	APBD
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	174.000.000	173.000.000	99%	APBD
Total Anggaran SPM		366.270.000	292.920.000	80%	
Total Anggaran SKPD		1.994.905.560	1.923.416.755	96%	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		18,38%	15,23%		

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Maros 2023



4.6.5. Dukungan Personil

Capaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Maros tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Maros didukung oleh personil sebanyak 75 orang PNS, 96 orang TAGANA aktif, 54 Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 14 orang, pendamping SLRT sebanyak 8 orang, pendamping Peksos 4 orang.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang sosial yang dilakukan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Belum sempurnanya data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).	Melakukan pendataan minimal 1 kali dalam 3 tahun dan updating data setiap Bulan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) .
2.	Penghitungan Kebutuhan	-	-
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	a. Terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah yang diperuntukkan penanganan kesejahteraan sosial. b. Terbatasnya pemahaman pelaksana tentang standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	a. Mengusulkan/maksimal anggaran untuk ditambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) b. Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai SOP.
4.	Pelaksanaan	Saran prasarana pendukung pelayanan kurang memadai.	Peningkatan sarana prasarana yang memudahkan akses



			pelayanan kesejahteraan sosial.
5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	-	-



BAB V

PENUTUP

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa tahun yang lalu yang telah direvisi melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang pada akhirnya mendorong meningkatnya partisipasi publik. Hal ini sangat diperlukan dan merupakan nilai-nilai dasar yang harus diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Maros kepada publik yang menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Pembahasan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diuraikan secara lengkap pada BAB I menggambarkan tentang informasi tentang profil daerah Kabupaten Maros secara umum, perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan umum penerapan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari : capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. diuraikan secara lengkap pada BAB II. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dijelaskan pada BAB III menguraikan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun penerapan dan pencapaian Standar



Pelayanan Minimal yang dijelaskan pada BAB IV menguraikan tentang pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yaitu : Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Maros.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros tahun 2022 diwujudkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi dana baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang berasal dari sumber pendanaan lainnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah mampu mendorong perkembangan pembangunan di Kabupaten Maros. Banyaknya program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan mendesak sementara sumber pendanaan masih terbatas sehingga, menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan harus didasarkan pada skala prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Maros.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Kabupaten Maros telah melalui tahapan review dan Evaluasi Mandiri terhadap seluruh capaian indikator kinerja kunci urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang tertuang dalam Surat Perintah Inspektur Nomor 094/30/A.4/ITDA tanggal 15 Februari 2023 untuk melakukan Review dan Evaluasi terhadap Seluruh Dokumen Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten Maros Tahun 2022 yang berlangsung dari tanggal 15 Februari s/d 21 Maret 2023 di Ruang Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini belum dapat memuaskan semua pihak dan menyelesaikan semua masalah yang ada, namun dengan berbagai usaha dan upaya sungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah membawa perubahan yang jauh lebih baik dari tahun-



tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 ini kami buat untuk menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2023, dengan harapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini benar-benar menjadi bahan evaluasi Pemerintah dalam mengambil kebijakan secara adil dan bijaksana dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat memberikan manfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, dan Pemerintah Kabupaten Maros akan terus melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BUPATI MAROS

H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M. H